

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu selama satu periode pelaporan.

Adapun tujuan penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan yang dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu (*accountability*);
2. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan evaluasi keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu serta efektivitas kesinambungan pengendalian aset, utang dan ekuitas; dan
3. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu, sebagai akibat dari aktivitas keuangan selama tahun anggaran yang berkenaan.

Sampai dengan Tahun Anggaran (TA) 2014 Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menyusun laporan keuangan masih menggunakan metode *Cash Toward Accrual* (CTA) yang hanya menghasilkan 4 (empat) jenis Laporan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Kemudian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Bab VIII Pasal 10 menyebutkan bahwa Penerapan Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah paling lambat mulai TA 2015. Akibat dari perubahan kebijakan akutansi tersebut maka laporan Keuangan yang disajikan bertambah menjadi 7 (tujuh) jenis laporan. Selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VII huruf A.1 Ketentuan Umum, menyebutkan bahwa Akutansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akutansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Terkait hal tersebut diatas didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur beberapa ketentuan salah satunya pada huruf H. Yaitu Struktur BAS yang digunakan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Terhadap hal ini maka BAS yang dipergunakan dalam pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
Merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Merupakan laporan secara komparatif atas penggunaan saldo anggaran lebih dalam satu periode dengan periode sebelumnya dan perubahan yang diakibatkan dari koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.
3. Neraca
Merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana.
4. Laporan Operasional
Merupakan Laporan yang menyajikan pos-pos pendapatan dan beban dari kegiatan operasional serta surplus/defisit dari kegiatan non operasional.
5. Laporan Arus Kas
Merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan dan perubahan kas selama satu tahun anggaran serta saldo kas pada akhir tahun anggaran.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas akibat dari surplus/defisit pada satu periode dan koreksi atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi yang mendasar seperti kesalahan dari persediaan periode sebelumnya serta perubahan nilai aset karena revaluasi aset tetap.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan
Menyajikan penjelasan naratif, analisa atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Arus Kas. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu menyajikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu;
14. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 34 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu; dan
15. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD
- 3.2. Ikhtisar Perkembangan Realisasi dan Kinerja Keuangan

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Penjelasan Pos-pos Neraca
- 5.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 5.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
- 5.6. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.7. Kejadian Setelah Tanggal Neraca

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- 6.1. Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi
- 6.2. Penjelasan mengenai Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok
- 6.3. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Kegiatan Operasional

BAB VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Kebijakan Ekonomi Makro Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 diprioritaskan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan rakyat serta untuk menjamin penanggulangan kemiskinan, kecukupan pangan dan gizi serta kesempatan pendidikan yang berarti juga mendukung pencapaian komitmen *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Prioritas-prioritas tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Reformasi Birokrasi;
2. Perekonomian rakyat dan iklim investasi;
3. Sumber daya manusia;
4. Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan;
5. Revitalisasi pertanian, ketahanan pangan serta pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan;
6. Infrastruktur dasar;
7. Sumber daya alam, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana;
8. Pariwisata, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi; dan
9. Pemerintahan, hukum, dan ketertiban umum.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran (TA) 2021, tujuan pembangunan daerah harus sejalan dengan tujuan pembangunan nasional dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan.

Kualitas pertumbuhan ekonomi didorong dengan meningkatkan investasi dan ekspor peningkatan investasi dan daya saing ekspor dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan prosedur perizinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, menyederhanakan prosedur perpajakan, dan meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada sektor usaha.

Selain meningkatkan investasi dan ekspor, kualitas pertumbuhan ekonomi juga didorong dengan pemerataan pembangunan dengan meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan dan juga melalui perbaikan kualitas sumberdaya manusia dan iklim ketenagakerjaan dengan meningkatkan penciptaan lapangan kerja dengan tetap mengontrol Upah Minimum Regional (UMR) dan memastikan biaya-biaya non UMR mengarah pada produktivitas tenaga kerja, serta membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja. Kualitas pertumbuhan ekonomi juga didorong dengan meningkatkan akses Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Koperasi terhadap sumber daya pembangunan.

Sedangkan upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yaitu dengan kebijakan lintas sektoral yang mengarahkan pada penciptaan kesempatan usaha bagi masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan masyarakat miskin serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun.

Berdasarkan data dari Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu Pandemi Covid-19 berdampak terhadap perekonomian Provinsi Bengkulu tahun 2021. Perekonomian Provinsi Bengkulu tahun 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp79,58 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp47,84 triliun.

Ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,24 persen (c-to-c) jika dibandingkan tahun 2020. Dari sisi produksi, kenaikan tertinggi terjadi pada Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,58 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,52 persen.

Ekonomi Provinsi Bengkulu Triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,57 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami kenaikan tertinggi sebesar 17,13 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,23 persen.

Secara spasial, struktur perekonomian di Pulau Sumatera pada Tahun 2021 didominasi oleh provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatera sebesar 23,37 persen; diikuti Provinsi Riau sebesar 22,92 persen; dan Provinsi Sumatera Selatan 13,36 persen. Sementara itu, Provinsi Bengkulu memiliki kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatera sebesar 2,16 persen.

Ekonomi di Pulau Sumatera pada Tahun 2021 (c-to-c) tumbuh sebesar 3,18 persen. Secara spasial, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kenaikan (c-to-c) tertinggi di Pulau Sumatera, yakni sebesar 5,05 persen. Sementara itu, Provinsi Bengkulu menempati posisi ke 7 dari 10 provinsi di Pulau Sumatera dengan kenaikan (c-to-c) sebesar 3,24 persen.

1.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Pada tahun 2021, ekonomi Provinsi Bengkulu naik sebesar 3,24 persen. Kenaikan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Jasa Perusahaan yang mengalami kontraksi kenaikan sebesar 0,81 persen. Tiga lapangan usaha yang mengalami kenaikan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,58 persen; diikuti oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,09 persen; dan Pertambangan dan Penggalian

sebesar 6,94 persen. Adapun lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan mengalami kenaikan sebesar 2,45 persen.

Ekonomi Provinsi Bengkulu Triwulan IV-2021 dibanding triwulan IV-2020 (y-on-y) mengalami kenaikan sebesar 5,57 persen. Kenaikan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Konstruksi yang mengalami kontraksi kenaikan sebesar 0,64 persen. Tiga lapangan usaha yang mengalami kenaikan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 17,13 persen; diikuti oleh Pertambangan dan Penggalan sebesar 15,62 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 13,72 persen. Adapun lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 3,15 persen.

Pada triwulan IV-2021 ini ekonomi Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan bila dibandingkan triwulan III-2021 (q-to-q). Pertumbuhan terjadi pada sebelas lapangan usaha, sementara enam lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi pertumbuhan. Tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 18,32 persen; Jasa Perusahaan sebesar 9,64 persen; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 4,96 persen. Sementara itu, tiga lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi adalah Industri Pengolahan sebesar minus 4,97 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang sebesar minus 3,58 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar minus 2,63 persen.

1.2. PDRB Menurut Pengeluaran

Mengamati kondisi perekonomian dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,24 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020. Kenaikan terjadi pada semua komponen pengeluaran, kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang berkontraksi sebesar 3,04 persen. Kenaikan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,52 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,01 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 3,30 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 2,75 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 3,47 persen.

Struktur PDRB Provinsi Bengkulu menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku Tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Provinsi Bengkulu masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Bengkulu yaitu sebesar 60,51 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 41,18 persen; Ekspor Barang dan Jasa sebesar 35,74 persen; PK-P sebesar 18,56 persen; PK-LNPRT sebesar 2,14 persen; dan Perubahan Inventori sebesar 0,04 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 58,18 persen.

Sementara itu, ekonomi Provinsi Bengkulu pada Triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 (y-on-y) naik sebesar 5,57 persen. Kenaikan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 7,23 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 6,20 persen; komponen PK-RT sebesar 5,14 persen; dan Komponen PK-P sebesar 2,35 persen. Sedangkan, komponen PK-LNPRT berkontraksi sebesar 4,49 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB tumbuh sebesar 3,70 persen.

Perekonomi Provinsi Bengkulu Triwulan IV-2021 dibanding Triwulan III-2021 naik sebesar 2,06 persen (q-to-q). Kenaikan terjadi pada hampir seluruh Komponen Pengeluaran, kecuali komponen Ekspor Barang dan Jasa yang berkontraksi sebesar 3,65 persen. Kenaikan tertinggi terjadi pada komponen PK-P yang naik sebesar 15,76 persen; diikuti komponen PMTB sebesar 8,73 persen; PK-LNPRT sebesar 5,74 persen; dan PK-RT sebesar 2,86 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 6,39 persen.

**Tabel 2.1 PDRB Provinsi Bengkulu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha**

(Miliar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
		2020	2021	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	20.782,22	22.445,16	12.795,99	13.109,72
2	Pertambangan dan Penggalian	2.392,82	4.044,98	1.535,08	1.641,59
3	Industri Pengolahan	4.385,81	4.628,45	2.713,44	2.777,63
4	Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	78,70	85,99	49,16	53,14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan DaurUlang	145,73	149,56	100,69	101,94
6	Konstruksi	3.869,51	4.103,84	2.189,12	2.227,93
7	Perdagangan Besar dan Eceran, ReparasiKendaraan	10.592,33	11.457,52	7.189,34	7.567,45
8	Transportasi dan Pergudangan	6.031,09	6.303,42	3.671,99	3.738,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.331,70	1.377,35	804,65	816,22
10	Informasi dan Komunikasi	2.784,29	3.000,65	2.250,40	2.393,52
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.464,65	2.763,78	1.609,65	1.720,79
12	<i>Real Estate</i>	2.797,39	2.842,81	2.065,76	2.068,23
13	Jasa Perusahaan	1.600,21	1.665,78	1.023,70	1.015,44
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan	7.429,98	7.660,69	4.187,38	4.288,56
15	Jasa Pendidikan	4.578,90	4.776,65	2.916,99	2.988,39
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.403,21	1.589,77	849,04	938,86
17	JasaLainya	636,74	679,92	386,05	391,48
PDRB		73.305,27	79.576,33	46.338,43	47.839,68

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bengkulu Menurut Lapangan Usaha

(persen)

No	Lapangan Usaha	Triw III2021 Terhadap Triw II-2021	Triw IV2021 Terhadap Triw III2021	Triw III2021 Terhadap Triw III2020	Triw IV2021 Terhadap Triw IV2020	Tw I s.d IV-2021 Terhadap Tw I s.d IV-2020	Sumber Pertumb uhan 2021
		(q-to-q)	(q-to-q)	(y-on-y)	(y-on-y)	(c-to-c)	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(3,16)	(0,05)	3,12	3,15	2,45	0,68
2	Pertambangan dan Penggalian	9,83	(0,29)	13,53	15,62	6,94	0,23
3	Industri Pengolahan	1,40	(4,97)	5,96	0,59	2,37	0,14
4	Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	0,24	1,68	4,82	4,90	8,09	0,01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	5,08	(3,58)	5,04	1,13	1,24	0,00
6	Konstruksi	6,71	1,67	0,41	(0,64)	1,77	0,08
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Kendaraan	(1,57)	3,58	7,27	13,72	5,26	0,82
8	Transportasi dan Pergudangan	(11,06)	18,32	(11,25)	7,71	1,82	0,14
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(4,20)	1,40	0,59	1,81	1,44	0,02
10	Informasi dan Komunikasi	1,09	1,16	7,84	9,79	6,36	0,31
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,27	(2,34)	3,70	0,36	6,90	0,24
12	<i>Real Estate</i>	0,50	3,21	0,21	4,25	0,12	0,01
13	Jasa Perusahaan	(0,25)	9,64	(2,94)	8,70	(0,81)	(0,02)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan	(6,75)	1,49	0,56	0,81	2,42	0,22
15	Jasa Pendidikan	(1,09)	(2,63)	2,54	2,74	2,45	0,15
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,48	4,96	12,90	17,13	10,58	0,19
17	Jasa Lainnya	(5,24)	4,12	(0,17)	4,53	1,41	0,01
PDRB		(1,72)	37,37	54,13	96,30	60,81	3,23

Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Bengkulu Menurut Lapangan Usaha

(persen)

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010		Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku	
		2020	2021	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,38	2,45	28,35	28,21
2	Pertambangan dan Penggalian	(1,70)	6,94	3,26	5,08
3	Industri Pengolahan	(2,44)	2,37	5,98	5,82
4	Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	12,04	8,09	0,11	0,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,85	1,24	0,20	0,19
6	Konstruksi	0,35	1,77	5,28	5,16
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Kendaraan	(3,88)	5,26	14,45	14,40
8	Transportasi dan Pergudangan	(2,86)	1,82	8,23	7,92
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(1,04)	1,44	1,82	1,73
10	Informasi dan Komunikasi	3,73	6,36	3,80	3,77
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	15,50	6,90	3,36	3,47
12	<i>Real Estate</i>	0,98	0,12	3,82	3,57
13	Jasa Perusahaan	(2,85)	(0,81)	2,18	2,09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan	1,55	2,42	10,14	9,63
15	Jasa Pendidikan	1,21	2,45	6,25	6,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,96	10,58	1,91	2,00
17	Jasa Lainnya	(0,50)	1,41	0,87	0,85
PDRB		27,28	60,81	100,01	100,00

**Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Provinsi Bengkulu
Menurut Pengeluaran**

(persen)

No	Komponen	Tw III2021 Terhadap Tw II-2021 (q-to-q)	Triw IV2021 Terhadap Triw III2021 (q-to-q)	Triw III2021 Terhadap Triw III2020 (y-on-y)	Triw IV2021 Terhadap Triw IV2020 (y-on-y)	Tw I s.d IV-2021 Terhadap Tw I s.d IV-2020 (c-to-c)	Sumber Pertumbuhan Tahun 2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	(3,78)	2,86	1,51	5,14	2,75	1,75
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	(0,71)	5,74	(5,03)	(4,49)	(3,04)	(0,08)
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(3,38)	15,76	0,22	2,35	3,30	0,62
4	Pembentuk Modal Tetap Domestik Bruto	0,29	8,73	2,16	6,20	4,01	1,74
5	Perubahan <i>Inventory</i>	-	-	-	-	-	
6	Ekspor Barang dan Jasa	4,12	(3,65)	15,26	7,23	6,52	2,27
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1,74	6,39	6,50	3,70	3,47	2,23
PDRB		(1,72)	35,83	20,62	20,13	17,01	8,53

**Tabel 2.5 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2010
Menurut Pengeluaran**

(Miliar Rupiah)

No	Komponen	Harga Berlaku		Harga Konstan 2010	
		2020	2021	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	46.310,87	45.181,63	29.548,54	30.360,37
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.721,94	1.705,97	1.219,66	1.182,56
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14.261,87	14.773,05	8.751,07	9.039,70
4	Pembentuk Modal Tetap Domestik Bruto	30.102,40	32.767,97	20.134,11	20.942,39
5	Perubahan <i>Inventory</i>	960,38	28,89	393,72	7,87
6	Ekspor Barang dan Jasa	24.451,40	28.443,42	16.114,69	17.164,76
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	44.503,59	46.294,61	29.823,35	30.857,96
PDRB		162.312,45	169.195,54	105.985,14	109.555,61

Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran

(persen)

No	Komponen	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010		Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku	
		2020	2021	2020	2021
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,15	2,75	63,18	60,51
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	(6,12)	(3,04)	2,35	2,14
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,58	3,30	19,46	18,56
4	Pembentuk Modal Tetap Domestik Bruto	(1,65)	4,01	41,06	41,18
5	Perubahan <i>Inventory</i>	-	-	1,31	0,04
6	Ekspor Barang dan Jasa	(2,60)	6,52	33,36	35,74
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	(2,15)	3,47	60,71	58,18
PDRB		(11,79)	17,01	221,43	216,35

2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam analisis pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat. Mengingat pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada akhirnya akan menghasilkan balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi akan meningkat.

Perekonomian Provinsi Bengkulu naik sebesar 3,24 persen. Kenaikan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Jasa Perusahaan yang mengalami kontraksi kenaikan sebesar 0,81 persen. Tiga lapangan usaha yang mengalami kenaikan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,58 persen; diikuti oleh Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 8,09 persen; dan Pertambangan dan Penggalian sebesar 6,94 persen. Adapun lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki peran dominan mengalami kenaikan sebesar 2,45 persen.

3. Jumlah dan Laju pertumbuhan Penduduk

Menurut Berita Resmi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu penduduk Provinsi Bengkulu pada bulan September 2020 sebanyak 2.010.670 jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk tahun 1971, jumlah penduduk Provinsi Bengkulu terus mengalami peningkatan. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 295.152 jiwa atau rata-rata sebanyak 24.596 jiwa setiap tahun.

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2010-2020), laju pertumbuhan penduduk Provinsi Bengkulu sebesar 1,55 persen per tahun. Terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,12 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk periode 2000-2010 yang sebesar 1,67 persen.

Mayoritas penduduk Provinsi Bengkulu didominasi oleh generasi Z dan milenial. Proporsi generasi Z sebanyak 29,16 persen dari total populasi (2.010.670 jiwa) dan generasi milenial sebanyak 26,86 persen dari total populasi Provinsi Bengkulu. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Post Generasi Z Lahir tahun 2013 dst Perkiraan usia sekarang s.d. 7 tahun, generasi Z Lahir tahun 1997-2012 Perkiraan usia sekarang 8-23 tahun, Milenial Lahir tahun 1981-1996 Perkiraan usia sekarang 24-39 tahun, Generasi X Lahir tahun 1965-1980 Perkiraan usia sekarang 40-55 tahun, *Baby Boomer* Lahir tahun 1946-1964 Perkiraan usia sekarang 56-74 tahun, *Pre-Boomer* Lahir sebelum tahun 1945 Perkiraan usia sekarang +75 tahun.

Persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat sejak tahun 2010. Pada tahun 2010 proporsi penduduk usia produktif adalah sebesar 65,58 persen dari total populasi dan meningkat menjadi 70,74 persen di tahun 2020.

Perbedaan antara persentase penduduk usia produktif dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terlihat lebih tajam di tahun 2020. Hal ini mencerminkan bahwa Provinsi Bengkulu masih berada dalam masa bonus demografi karena sebesar 70,74 persen penduduknya masih berada diusia produktif.

4. Ketenagakerjaan

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan target pembangunan. Di satu sisi, jumlah tenaga kerja yang berlimpah menjadi modal dasar sebagai SDM penggerak perekonomian negara. Namun, di sisi lain, banyaknya tenaga kerja tersebut tanpa adanya upaya pemberdayaan dan pengelolaan yang tepat hanya akan membuat keberadaan tenaga kerja tersebut sia-sia. Bahkan, ketersediaan tenaga kerja tersebut justru akan menimbulkan masalah pengangguran dan menjadi beban pembangunan. Jumlah tenaga kerja yang besar membuat para pencari kerja saling bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Namun, rendahnya kualitas akan membuat banyak pencari kerja tersingkir.

Oleh karena itu, selain upaya penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya, diperlukan pula upaya untuk mendidik dan meningkatkan kualitas para pencari kerja, baik dari segi pendidikan maupun keterampilan agar dapat terserap dalam pasar tenaga kerja guna menyokong pembangunan nasional. Dampak yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran tidak hanya meliputi kehidupan ekonomi, namun juga aspek sosial lainnya.

Dari sisi ekonomi, tanpa adanya pekerjaan sebagai sumber penghasilan, rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup anggota rumah tangga. Masalah pengangguran ini dapat menyebabkan menurunnya kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan angka kemiskinan. Hal ini tentunya juga akan menjadi beban bagi negara untuk memberikan bantuan dan perlindungan terhadap rakyatnya yang tidak mampu. Sementara itu, dari sisi sosial masyarakat, tingginya akan pengangguran dapat memicu tindak kejahatan/kriminalitas atau tindakan lain yang dapat mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat, seperti tindak pencurian, dll. Hal ini selanjutnya dapat mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat secara umum.

4.1. Penduduk yang Bekerja

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu Ditinjau dari segi pendidikan yang ditamatkan, kebanyakan penduduk yang bekerja atau pekerja di Provinsi Bengkulu berpendidikan SD ke bawah, yakni sebanyak 46 persen. Sementara itu, pekerja yang berpendidikan tinggi masih cukup sedikit, sekitar 18% yang menamatkan perguruan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kebanyakan sektor lapangan pekerjaan di Provinsi Bengkulu tidak menuntut SDM dengan kualitas pendidikan yang tinggi. Namun, kondisi ini juga dapat menjadi penyebab kurang berkembangnya sektor-sektor ekonomi di wilayah Provinsi Bengkulu.

SDM dengan pendidikan tinggi cenderung mencari pekerjaan di daerah perkotaan dan di bidang lapangan usaha formal. Sementara itu, SDM dengan pendidikan rendah cenderung menerima pekerjaan apapun yang tersedia.

Sektor usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi sektor penyerap tenaga kerja terbanyak di Provinsi Bengkulu yakni sebesar 43,78 persen. Selanjutnya disusul oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang menyerap tenaga kerja sebanyak 16,31%. Sejalan dengan banyaknya pekerja yang berpendidikan rendah, kedua sektor ini memang cenderung tidak menyaratkan pendidikan yang tinggi bagi pekerjanya.

Sektor pertanian dan perdagangan umumnya bersifat informal yang melibatkan anggota-anggota rumah tangga sendiri sebagai pekerjanya sehingga menjadikan penduduk lepas dari status menganggur. Sementara itu, sektor dengan penyerapan tenaga kerja terendah terjadi pada sektor real estat jasa kemasyarakatan, yakni sebesar 0,03 persen. Relatif rendahnya penyerapan tenaga kerja di sektor ini tidak terlepas dari jumlah usaha di sektor tersebut yang memang tidak banyak di Provinsi Bengkulu dan kebutuhan akan SDM dengan kualitas pendidikan tinggi dan keterampilan tertentu. Hal ini membuat sektor ini lebih selektif dalam memilih tenaga kerja sehingga jumlah tenaga kerja yang terserap pun relatif sedikit.

4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran merupakan salah satu masalah yang menjadi prioritas setiap daerah sekaligus menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut. Tinggi rendahnya tingkat pengangguran juga sering digunakan untuk menganalisis kesehatan ekonomi suatu wilayah. Hal ini karena tingkat pengangguran yang tinggi dapat berdampak negatif bagi kehidupan ekonomi maupun sosial, seperti: menurunnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup; meningkatnya angka kemiskinan; meningkatnya tindak kriminalitas; dll.

Dengan data tingkat pengangguran, pemerintah dapat menganalisis dan merencanakan penciptaan lapangan kerja untuk menampung dan menyerap tenaga kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran di suatu wilayah diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang menganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Bengkulu adalah sebesar 3,39. Artinya, dari setiap 100 orang penduduk terdapat 3 s.d. 4 orang penduduk yang menganggur. Namun, TPT Provinsi Bengkulu tahun 2019 ini mengalami penurunan dibanding tahun 2018 yang sebesar 3,51. Hal ini menjadi salah satu indikasi adanya perbaikan pembangunan di Provinsi Bengkulu dalam mengatasi masalah pengangguran.

Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, TPT penduduk perempuan tampak lebih tinggi dibandingkan TPT penduduk laki-laki, masing masing sebesar

2,66 persen dan 4,55 persen. Ruang lingkup jenis pekerjaan cenderung tersedia lebih luas bagi penduduk laki-laki daripada perempuan. Terdapat pekerjaan-pekerjaan yang kualifikasinya tidak diperuntukkan penduduk perempuan. Misalnya, pekerjaan di bidang konstruksi lebih banyak membutuhkan pekerja laki-laki daripada perempuan. Oleh sebab itu, tingkat pengangguran perempuan menjadi lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu, TPT penduduk perempuan pada tahun 2019 juga terlihat mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 4,24 persen sedangkan TPT laki-laki menurun dibanding tahun 2018 yang sebesar 3,04 persen.

Ditinjau dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, pengangguran tertinggi pada tahun 2019 berasal dari angkatan kerja lulusan SMA/SMK/MA sebesar 49,56 persen. Tingginya pengangguran dari lulusan SMA/SMK/MA ini diduga karena kurangnya keterampilan dan keahlian sementara perusahaan penyerap tenaga kerja cenderung mencari tenaga kerja yang terampil. Sementara itu, pengangguran dari tamatan SMP/MTs ke bawah relatif lebih kecil karena tamatan SMP/MTs ke bawah cenderung menerima saja pekerjaan yang tersedia, termasuk pekerjaan buruh kasar. Salah satu upaya untuk mengurangi pengangguran tersebut adalah dengan memberikan pelatihan pengetahuan dan keterampilan bagi angkatan kerja sehingga dapat meningkatkan kualitas pencari kerja. Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong dan membina para pencari kerja untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau berwiraswasta. Dengan demikian, juga akan tercipta lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja lainnya.

Tingkat pengangguran cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan daerah pedesaan. Gambar 7.7 menunjukkan distribusi tingkat pengangguran di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu pada tahun 2019. TPT tertinggi terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 4,63 persen sedangkan TPT di Kota Bengkulu menjadi TPT tertinggi kedua, yakni sebesar 4,29 persen. Kabupaten Seluma merupakan wilayah dengan tingkat pengangguran terendah, yakni sebesar 2,23 persen.

2.2. Kebijakan Keuangan

1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target pendapatan adalah:

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun sumber-sumber penerimaan baru;
- b. Kebijakan dalam meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak;
- c. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi yang nyaman dan sederhana;

- d. Meningkatkan peranan dan fungsi UPTD dan Samsat Keliling dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak;
- e. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
- f. Meningkatkan dana dari Pusat diluar DAU dan DAK; dan
- g. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2. Kebijakan Belanja Daerah

Penyusunan rencana Belanja Daerah dilakukan dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

- a. Belanja Tidak Langsung diarahkan pada:
 - 1) Belanja Pegawai diarahkan untuk membiayai pembayaran gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 2) Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan.
 - a) Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
 - b) Penganggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.
 - c) Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang bantuan keuangan.
- b. Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam, bencana sosial, dan lain sebagainya.
- c. Belanja Langsung
 - 1) Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat;
 - 2) Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir TA 2021 dihindari dan dapat direncanakan dalam APBD tahun anggaran berikutnya;
 - 3) Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (konstruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir pembayaran pekerjaan pada minggu terakhir Desember 2021 dan tidak

dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali mengalami *force majeure*; dan

- 4) Belanja Pegawai berupa pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga tahun 2020.
- 5) Belanja Barang dan Jasa
 - a) Belanja Barang dan Jasa disetiap OPD digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, tidak menambah nilai aset/modal, termasuk belanja pemeliharaan;
 - b) Belanja Barang Habis Pakai disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan; dan
 - c) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.
- 6) Belanja Modal
 - a) Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset;
 - b) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut; dan
 - c) Penganggaran belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya.
- d. Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan TA 2021 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu.

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan digambarkan dari realisasi pencapaian target APBD dan perkembangan realisasi APBD tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD

APBD Provinsi Bengkulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu TA 2021 dengan komposisi pagu anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Awal TA 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Anggaran
Pendapatan Daerah	3.062.274.137.387,00
Belanja Daerah	3.052.194.137.387,00
Surplus/Defisit	10.080.000.000,00
Pembiayaan	
Penerimaan Pembiayaan	5.000.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	15.080.000.000,00
Pembiayaan Neto	(10.080.000.000,00)
SILPA	0,00

Pandemi Covid-19 yang melanda Negara Indonesia juga telah menginfeksi penduduk provinsi Bengkulu. Pandemi tersebut berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat provinsi Bengkulu. Hal ini memaksa Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk melakukan *refocusing*, pergeseran maupun rasionalisasi APBD guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19.

Refocusing anggaran, pergeseran dan perubahan anggaran dilakukan dengan memindahkan anggaran belanja satu OPD menjadi kegiatan untuk menangani dampak pandemi yang tercermin dalam Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu TA 2021. Rasionalisasi dilakukan dengan memangkas anggaran pendapatan sehingga anggaran pendapatan daerah pada APBD awal sebesar Rp3.062.874.137.387,00 turun menjadi Rp2.954.014.615.065,00 dan anggaran pendapatan transfer pada APBD awal Rp2.112.512.125.000,00 turun menjadi Rp2.068.643.597.000,00.

Realisasi pencapaian target kinerja APBD TA 2021 dan 2020, diikhtisarkan sebagai berikut.

Tabel 3.2 Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran				
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	Peningkatan %
Pendapatan daerah	2.954.014.615.065,00	3.051.751.862.802,73	103,31	2.786.928.036.207,91	9,50
Belanja Daerah	3.056.477.210.118,00	2.880.225.046.730,80	94,23	2.698.458.077.971,87	6,74
Surplus/Defisit	(102.462.595.053,00)	171.526.816.071,93	(167,40)	88.469.958.236,05	93,88
Pembiayaan					
Penerimaan Pembiayaan	102.542.595.053,00	102.542.595.053,49	100,00	29.072.636.817,45	252,71
Pengeluaran Pembiayaan	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00	(99,47)
Pembiayaan Neto	102.462.595.053,00	102.462.595.053,49	100,00	14.072.636.817,45	628,10
SiLPA		273.989.411.125,42		102.542.595.053,49	167,20

Tabel di atas menunjukkan pencapaian target APBD TA 2021 sebagai berikut.

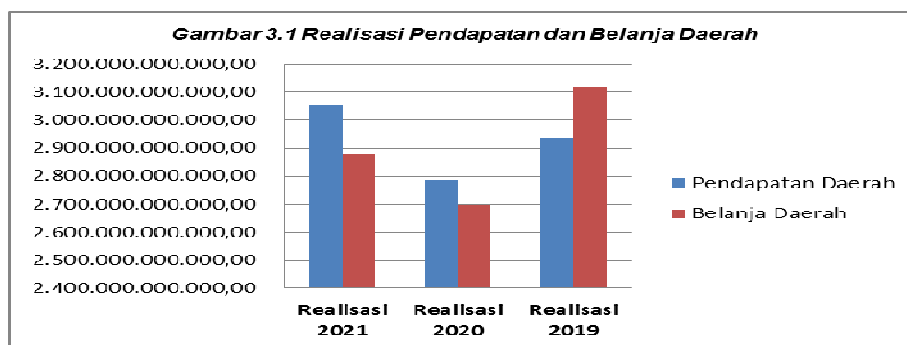
1. Pendapatan TA 2021 terealisasi diatas target APBD. Target pendapatan TA 2021 sebesar Rp2.954.014.615.065,00 sedangkan realisasi pendapatan TA 2021 sebesar Rp3.051.751.862.802,73 atau 103,31% dari anggaran. Pendapatan TA 2021 naik sebesar Rp264.823.826.594,82 atau 9,50% dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp2.786.928.036.207,91;
2. Realisasi belanja daerah TA 2021 dibawah pagu anggaran belanja daerah. Pagu belanja daerah TA 2021 sebesar Rp3.056.477.210.118,00 dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp2.880.225.046.730,80 atau 94,23% dari anggaran. Belanja daerah TA 2021 naik sebesar Rp181.766.968.758,93 atau 6,74% dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp2.698.458.077.971,87;
3. Penerimaan Pembiayaan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp102.542.595.053,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp102.542.595.053,00 atau 100,00% dari anggaran. Penerimaan pembiayaan TA 2021 naik sebesar Rp73.469.958.236,04 atau turun 252,71% dibandingkan TA 2020 sebesar Rp29.072.636.817,45;
4. Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp80.000.000,00 atau 100% dari anggaran. Pengeluaran pembiayaan TA 2021 turun sebesar Rp14.920.000.000,00 atau turun 252,71% dibandingkan TA 2020 sebesar Rp15.000.000.000,00;
5. SiLPA TA 2021 dianggarkan sebesar Rp0,00 sedangkan realisasi SiLPA TA 2021 adalah sebesar Rp273.989.411.125,42 SiLPA TA 2021 naik sebesar Rp171.446.816.071,93 atau 167,20% dibanding TA 2020 sebesar Rp102.542.595.053,49.

Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2021, 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Realisasi 2019
Pendapatan daerah	3.051.751.862.802,73	2.786.928.036.207,91	2.934.057.941.393,87
Belanja daerah	2.880.225.046.730,80	2.698.458.077.971,87	3.118.303.518.797,46

Perkembangan tiga tahun terakhir atas ikhtisar realisasi pencapaian target APBD dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terjadi fluktuasi pendapatan dan belanja, jika dibandingkan dari tahun 2019 ke tahun 2020 terlihat adanya penurunan baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja daerah. Tetapi pada tahun 2021, terlihat adanya kenaikan baik dari sisi realisasi pendapatan dan belanja daerah dari tahun sebelumnya.

3.2 Ikhtisar Perkembangan Realisasi dan Kinerja Keuangan

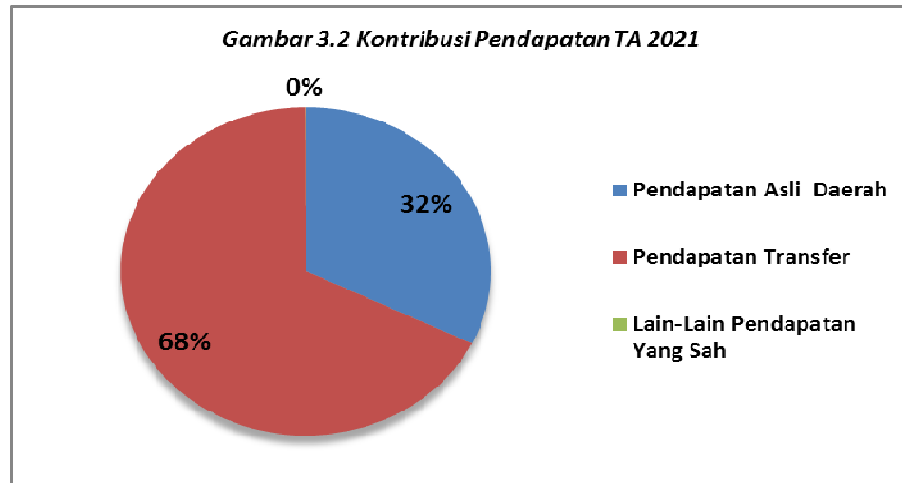
Perkembangan realisasi dan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4 Rincian Laporan Realisasi Anggaran TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran		Kenaikan/Penurunan	%
	Realisasi 2021	Realisasi 2020		
Pendapatan Asli Daerah	984.420.164.399,73	712.345.548.601,91	272.074.615.797,82	38,19
Pendapatan Transfer	2.066.215.698.403,00	2.053.310.368.606,00	12.905.329.797,00	0,63
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	1.116.000.000,00	21.272.119.000,00	(20.156.119.000,00)	(94,75)
Jumlah	3.051.751.862.802,73	2.786.928.036.207,91	264.823.826.594,82	9,50
Belanja Operasi	2.120.610.505.189,51	2.140.236.748.400,10	(19.626.243.210,59)	(0,92)
Belanja Modal	324.342.084.410,29	417.095.645.164,70	(92.753.560.754,41)	(22,24)
Belanja Tak Terduga	5.699.939.753,00	12.515.896.300,00	(6.815.956.547,00)	(54,46)
Transfer	429.572.517.378,00	128.609.788.107,07	300.962.729.270,93	234,01
Jumlah	2.880.225.046.730,80	2.698.458.077.971,87	181.766.968.758,93	6,74
Surplus / (Defisit)	171.526.816.071,93	88.469.958.236,05	83.056.857.835,88	93,88

Pendapatan Asli Daerah TA 2021 naik sebesar Rp272.074.615.797,82 atau sebesar 38,19% di atas realisasi Pendapatan TA 2020. Kenaikan tertinggi pendapatan terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 38,19%.

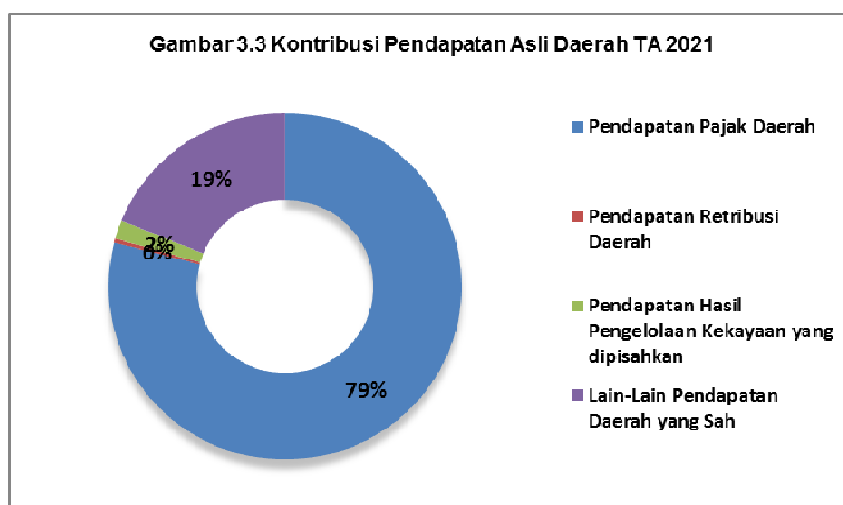


Tabel 3.5 Rincian Pendapatan Asli Daerah TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran				
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
Pendapatan Asli Daerah	884.255.018.065,00	984.420.164.399,73	111,33	712.345.548.601,91	38,19
Pendapatan Pajak Daerah	694.280.970.370,00	778.550.698.250,00	112,14	561.784.480.872,00	38,59
Pendapatan Retribusi Daerah	4.775.123.226,00	3.734.241.835,00	78,20	3.007.003.756,00	24,18
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	17.310.732.877,00	17.125.198.290,04	98,93	14.669.299.693,56	16,74
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	167.888.191.592,00	185.010.026.024,69	110,20	132.884.764.280,35	39,23

Pendapatan Asli Daerah TA 2021 naik dikarenakan komponen Pendapatan Asli Daerah TA 2021 juga naik dari TA 2020, peningkatan terjadi diseluruh komponen Pendapatan Asli Daerah. Kenaikan tertinggi terjadi pada komponen Pendapatan Pajak Daerah sebesar 112,14%.

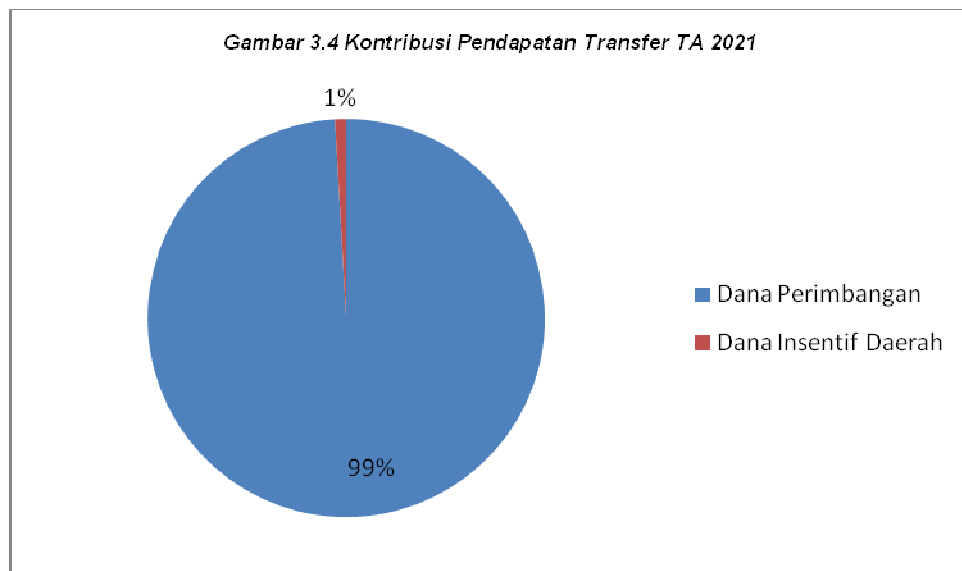


Tabel 3.6 Rincian Pendapatan Transfer TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran				
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
Pendapatan Transfer	2.068.643.597.000,00	2.066.215.698.403,00	99,88	2.053.310.368.606,00	0,63
Dana Perimbangan	2.049.812.349.000,00	2.047.384.450.403,00	99,88	2.053.310.368.606,00	1,26
Dana Insentif Daerah (DIDI)	18.831.248.000,00	18.831.248.000,00	100,00	31.396.339.000,00	(40,02)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer mengalami perubahan pada Objek Pendapatan Transfer yang dimana terbagi atas Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah (DID). Pada Pendapatan Transfer TA 2021 komponen Dana Perimbangan turun sebesar 0,29% dan pada DID sebesar 40,02%.

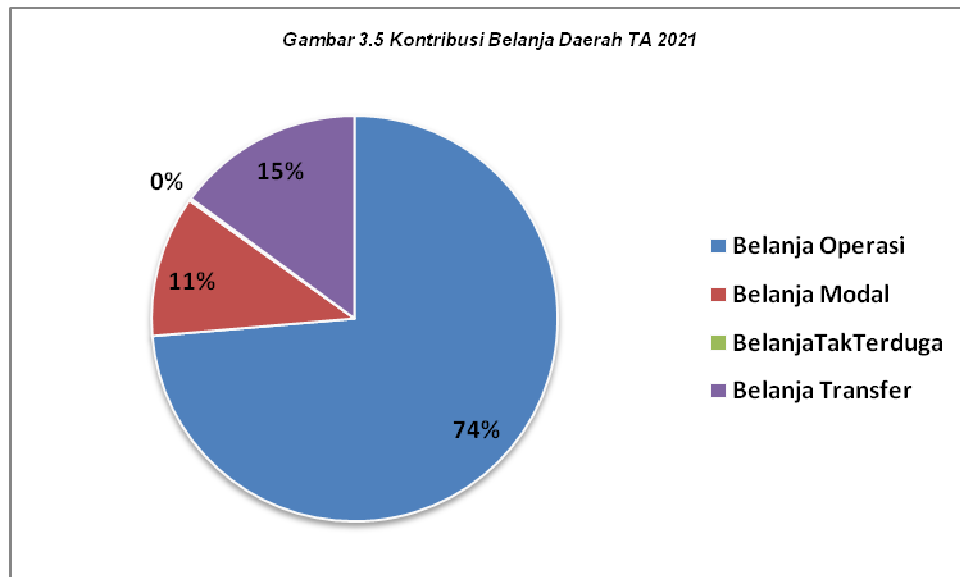


Tabel 3.7 Rincian Belanja TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran				
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
Belanja Daerah	3.056.477.210.118,00	2.880.225.046.730,80	94,23	2.698.458.077.971,87	6,74
Belanja Operasi	2.192.230.635.048,00	2.120.610.505.189,51	96,73	2.140.236.748.400,10	(0,92)
Belanja Modal	422.048.654.531,00	324.342.084.410,29	76,85	417.095.645.164,70	(22,24)
Belanja TakTerduga	12.624.576.166,00	5.699.939.753,00	45,15	12.515.896.300,00	(54,46)
Belanja Transfer	429.573.344.373,00	429.572.517.378,00	100,00	128.609.788.107,07	234,01

Belanja Daerah TA 2021 naik sebesar Rp181.766.968.758,93 atau 6,74% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2020. Kenaikan paling tinggi terjadi pada komponen Belanja Transfer sebesar 234,01%.

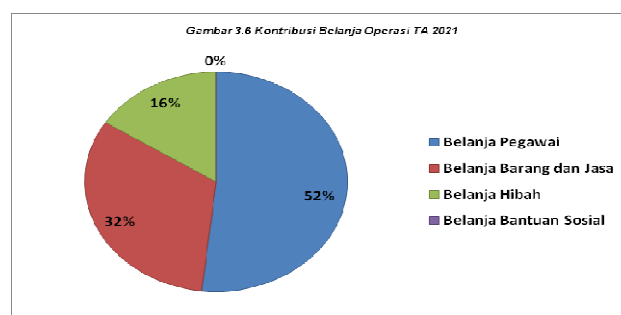


Tabel 3.8 Rincian Belanja Operasi TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran				
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
Belanja Operasi	2.192.230.635.048,00	2.120.610.505.189,51	96,73	2.140.236.748.400,10	(0,92)
Belanja Pegawai	1.145.281.659.574,00	1.097.398.109.416,40	95,82	1.066.821.278.776,00	2,87
Belanja Barang dan Jasa	1.002.252.975.474,00	685.841.963.893,11	68,43	559.001.307.176,10	22,69
Belanja Hibah	44.596.000.000,00	337.271.451.880,00	756,28	512.620.480.000,00	(34,21)
Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	98.980.000,00	98,98	1.793.682.448,00	(94,48)

Serapan Belanja Operasi TA 2021 turun jika dibandingkan dengan Belanja Operasi TA 2020, namun terdapat komponen Belanja Operasi yang mengalami kenaikan yaitu pada komponen Belanja Pegawai naik sebesar 2,87% dan Belanja Barang dan Jasa naik sebesar 22,69%, sedangkan Belanja Hibah turun sebesar 34,21 % dan Belanja Bantuan Sosial turun sebesar 94,48%.

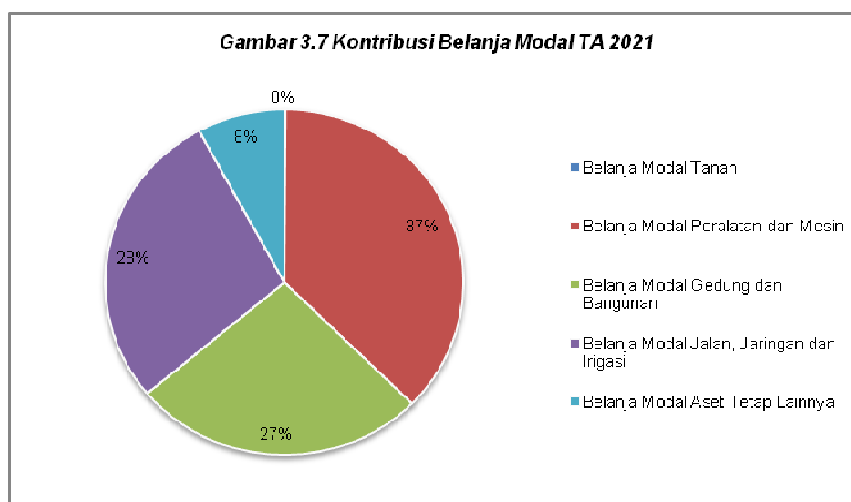


Tabel 3.9 Rincian Belanja Modal TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran				
	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
Belanja Modal	422.048.654.531,00	324.342.084.410,29	76,85	417.095.645.164,70	(22,24)
Belanja Modal Tanah	468.400.000,00	351.833.957,00	75,11	910.700.000,00	(61,37)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.947.652.266,00	120.896.451.954,30	72,85	187.117.183.962,70	(35,39)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.711.399.987,00	85.977.703.079,72	88,90	61.322.534.260,23	40,21
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	104.421.690.738,00	91.465.065.504,27	87,59	134.069.776.163,63	(31,78)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	54.499.511.540,00	25.651.029.915,00	47,07	33.675.450.778,14	(23,83)

Penyerapan Belanja Modal TA 2021 turun jika dibandingkan dengan serapan Belanja Modal TA 2020, dimana Belanja Modal Tanah turun sebesar 61,37%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin turun sebesar 35,39%, Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi turun sebesar 31,78% dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya turun sebesar 23,83%. Sementara Belanja Modal Gedung dan Bangunan naik sebesar 40,21%



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pembentukan Provinsi Bengkulu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828). Domisili kantor Pemerintah Provinsi Bengkulu berada di Jalan Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan, Bengkulu.

Pemerintah Provinsi Bengkulu pada TA 2021 menjalankan kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan dengan struktur organisasi sebagai berikut.

Tabel 4.1 Nama Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Bengkulu

No	Kode	Nama Satuan Kerja
1	1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	1.02.01	Dinas Kesehatan
3	1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus
4	1.02.03	Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto
5	1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
7	1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja
8	1.05.02	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9	1.06.01	Dinas Sosial
10	2.01.01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
11	2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan
13	2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14	2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16	2.09.01	Dinas Perhubungan
17	2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
18	2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19	2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	2.13.01	Dinas Pemuda dan Olahraga
21	2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan
23	3.02.01	Dinas Pariwisata
24	3.03.01	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
25	3.03.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
26	3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
27	3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
28	4.01.01	Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
29	4.02.01	Inspektorat
30	4.03.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Kode	Nama Satuan Kerja
31	4.04.11	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
32	4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah
33	4.06.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
34	4.08.01	Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah
35	4.09.01	Badan Penghubung Provinsi Bengkulu
36	4.12.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber dana untuk menjalankan aktivitas pemerintah Provinsi Bengkulu berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan, antara lain berupa Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil dari PBB, BPHTB, PPh dan SDA serta Pendapatan Lain-Lain yang Sah. Penggunaan dana tersebut adalah untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan pembiayaan serta distribusi bagi hasil pendapatan ke kabupaten/kota.

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 dilakukan oleh Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu dengan cara konsolidasi dan rekonsiliasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada.

Sistem penyusunan, penatausahaan pelaksanaan APBD dan APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Bengkulu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi, Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Asumsi Dasar

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 berdasarkan asumsi:

- Pemerintah Provinsi Bengkulu merupakan organisasi yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai Entitas Pelaporan, sedangkan Dinas/Badan/Instansi/Kantor merupakan entitas akuntansi.
- Pemerintah Provinsi Bengkulu akan berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan.
- Keterukuran dalam satuan uang, bahwa setiap kejadian dan transaksi dapat dinilai dengan satuan uang.

2. Pertimbangan Pemilihan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Kebijakan Akuntansi Nomor 25 Tahun 2014. Adapun prinsip-prinsip akuntansi, pengakuan dan pengukuran yang diterapkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut.

a. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah basis akrual, dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, maka disusun berdasarkan basis kas.

b. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- 3) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan – LO diakui pada saat :

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan/atau
- 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- 4) Sebagian pendapatan menggunakan system *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
- 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pmda tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

- 6) Akuntansi pendapatan diterapkan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluarannya).

c. Pengakuan Belanja

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

d. Pengakuan Beban

Beban diakui pada:

- 1) Saat timbulnya kewajiban;
- 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

e. Pengakuan Investasi

Pengeluaran kas diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Penggunaan metode penilaian investasi didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

f. Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual dan dibagikan kepada pihak lain.
- 3) Batas kapitalisasi untuk klasifikasi Peralatan dan Mesin ditetapkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit aset.

- 4) Batas kapitalisasi untuk klasifikasi Gedung dan Bangunan ditetapkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Nilai aset berwujud dicatat sesuai nilai perolehan dalam hal ini sebesar nilai kontrak untuk pekerjaan yang telah selesai 100%. Sedangkan untuk aset dalam pengerjaan dicatat sebesar jumlah realisasi pembayaran.

g. Kebijakan Kapitalisasi Pengeluaran

Pengeluaran belanja pemeliharaan akan dikapitalisasikan menjadi aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut.

- 1) Manfaat ekonomis atas barang/aset tetap yang dipelihara bertambah nilai ekonomisnya/efisiensi.
- 2) Bertambah umur ekonomisnya.
- 3) Bertambah volumenya.
- 4) Bertambah kapasitas produksinya.

h. Pengakuan Belanja Transfer

Belanja transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.

i. Pengakuan Pembiayaan

- 1) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

j. Pengakuan Piutang

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitasi/jasa dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas.
- 2) Jumlah piutang dapat diukur.
- 3) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
- 4) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang Lancar; (0 – 2 tahun);
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar; (lebih dari 2 – 5 tahun);
- 3) Kualitas Piutang Diragukan; (lebih dari 5 – 10 tahun); dan
- 4) Kualitas Piutang Macet. (lebih dari 10 tahun).

Kebijakan penyisihan piutang dilakukan dengan membuat daftar umur piutang dengan perhitungan sebagai berikut.

- 1) Umur piutang 0 s.d 2 tahun disisihkan sebesar 0%.
- 2) Umur piutang lebih dari 2 tahun s.d 3 tahun disisihkan sebesar 5%.

- 3) Umur piutang lebih dari 3 tahun s.d 4 tahun disisihkan sebesar 10%.
- 4) Umur piutang lebih dari 4 tahun s.d 5 tahun disisihkan sebesar 20%.
- 5) Umur piutang lebih dari 5 tahun s.d 6 tahun disisihkan sebesar 30%.
- 6) Umur piutang lebih dari 6 tahun s.d 7 tahun disisihkan sebesar 40%.
- 7) Umur piutang lebih dari 7 tahun s.d 8 tahun disisihkan sebesar 60%.
- 8) Umur piutang lebih dari 8 tahun s.d 10 tahun disisihkan sebesar 80%.
- 9) Umur piutang lebih dari 10 tahun disisihkan sebesar 100%.

k. Pengakuan Persediaan

- 1) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
- 2) Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan laporan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilakukan oleh OPD.

l. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Untuk perhitungan penyusutan, dihitung pada tahun berkenaan perolehan asset tetap.

Penyusutan aset tetap dihitung menggunakan nilai perolehan asset tetap atau nilai buku akhir aset (setelah pelaksanaan inventarisasi / penilaian kembali / koreksi perubahan nilai) dengan tetap berpedoman pada tahun perolehan aset dan masa manfaat asset tersebut.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

m. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari :

- 1) Transaksi dengan pertukaran.
- 2) Transaksi tanpa pertukaran sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan tanggal pelaporan.
- 3) Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- 4) Kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Bengkulu.

4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 didasarkan pada nilai uang rupiah. Ini berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dinilai dengan uang. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan digunakan nilai mata uang

asing, maka ketika penyusunan laporan keuangan harus dikonfversikan menjadi rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Neraca. Dari pelaksanaan APBD TA 2021 seluruh kegiatan telah dinilai dengan rupiah, tidak terdapat kegiatan yang pelaksanaannya dengan mata uang asing.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi sesuai SAP.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pendapatan - LRA

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Penjelasan pos-pos pendapatan didasarkan pada jenis pendapatan. Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Pendapatan Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp2.954.014.615.065,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.051.751.862.802,73 atau 103,31%. Realisasi Pendapatan TA 2020 tersebut naik sebesar Rp264.823.826.594,82 atau 9,50% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan TA 2020 sebesar Rp2.786.928.036.207,91.

Realisasi Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp984.420.164.399,73 atau 111,33%, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.066.215.698.403,00 atau 99,88%, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp1.116.000.000,00 atau 100,00%.

Tabel 5.1 Pendapatan Daerah TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	884.255.018.065,00	984.420.164.399,73	111,33	712.345.548.601,91	38,19
Pendapatan Transfer	2.068.643.597.000,00	2.066.215.698.403,00	99,88	2.053.310.368.606,00	0,63
Lain-Lain Pendapatan Daerah	1.116.000.000,00	1.116.000.000,00	100,00	21.272.119.000,00	(94,75)
Jumlah	2.954.014.615.065,00	3.051.751.862.802,73	103,31	2.786.928.036.207,91	9,50

Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan PAD TA 2021 sebesar Rp884.255.018.065,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp984.420.164.399,73 atau 111,33%. Realisasi PAD TA 2021 tersebut naik sebesar Rp272.074.615.797,82 atau 38,19% dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2020 sebesar Rp712.345.548.601,91.

Peningkatan pada sumber PAD TA 2021 ini, meliputi Pendapatan Pajak Daerah dengan realisasi sebesar Rp778.550.698.250,00 naik sebesar 38,59%, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp3.734.241.835,00 naik sebesar 24,18%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp17.125.198.290,04 naik sebesar

16,74%, dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp185.010.026.024,69 naik sebesar 39,23%.

Tabel 5.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
Pendapatan Pajak Daerah	694.280.970.370,00	778.550.698.250,00	112,14	561.784.480.872,00	38,59
Hasil Retribusi Daerah	4.775.123.226,00	3.734.241.835,00	78,20	3.007.003.756,00	24,18
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	17.310.732.877,00	17.125.198.290,04	98,93	14.669.299.693,56	16,74
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	167.888.191.592,00	185.010.026.024,69	110,20	132.884.764.280,35	39,23
Jumlah	884.255.018.065,00	984.420.164.399,73	111,33	712.345.548.601,91	38,19

Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi PAD TA 2021 disampaikan sebagai berikut.

1) Pendapatan Pajak Daerah

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp694.280.970.370,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp778.550.698.250,00 atau 112,14%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1	Pajak Kendaraan Bermotor	239.507.002.188,00	246.925.853.225,00	103,10	230.746.716.600,00	7,01
2	Bea Balik Nama Kend Bermotor	107.782.495.625,00	128.240.934.000,00	118,98	99.173.107.000,00	29,31
3	Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor	209.422.484.252,00	240.884.453.924,00	115,02	122.462.644.744,00	96,70
4	Pajak Air Permukaan	9.840.256.345,00	9.975.412.613,00	101,37	8.293.420.238,00	20,23
5	Pajak Rokok	127.728.731.960,00	152.524.044.488,00	119,41	101.108.592.290,00	50,85
	Jumlah	694.280.970.370,00	778.550.698.250,00	112,14	561.784.480.872,00	38,59

Pencapaian Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 melebihi dari target yang telah ditetapkan, dimana Pendapatan Pajak Daerah mencapai 112,14% dari anggaran yang telah ditetapkan. Pelampauan target meliputi pada seluruh objek pajak dengan rata-rata sebesar 12,14%, Pelampauan target tertinggi pada objek Pajak Rokok yaitu sebesar 19,41% hal ini disebabkan oleh transfer pemerintah pusat yang melebihi dari rencana anggaran pendapatan daerah. Sedangkan Pelampauan target yang belum signifikan pada objek Pajak Air Permukaan yaitu sebesar 1,37%.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2021 naik sebesar Rp216.766.217.378,00 atau 38,59%, dibandingkan dengan realisasi

Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp561.784.480.872,00. Naiknya realisasi pendapatan Pajak Daerah tersebut terjadi pada seluruh Objek pendapatan pajak daerah. Peningkatan terbesar terjadi pada Objek Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang naik sebesar Rp118.421.809.180,00 atau 96,70%, Hal ini tidak terlepas dari Kebijakan Gubernur Bengkulu terkait dengan peningkatan tarif pajak bagi Wajib Pungut (WaPu) dari tarif 5% menjadi 10%. Sedangkan peningkatan yang terjadi belum signifikan pada Objek Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 7,01%.

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber PAD, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 sebesar Rp4.775.123.226,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.734.241.835,00 atau 78,20%. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 naik sebesar Rp727.238.079,00 atau 24,18% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 sebesar Rp3.007.003.756,00.

Didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS) pada Jenis Pendapatan Retribusi Daerah mengalami perbedaan pada Objek pendapatan di TA 2021 dengan Objek Pendapatan di TA 2020, meliputi sebagai berikut :

Tabel 5.4 Klasifikasi Objek Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian Objek Pendapatan	
	TA 2021	TA 2020
1.	Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Umum Retribusi Pengganti Cetak Peta
2..	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Retribusi Tempat Rekreasi Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	Retribusi Pelayanan dan Perizinan Usaha Perikanan Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja asing

Rincian Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.5 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 dan 2020*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1	Retribusi Jasa Umum	69.400.000,00	37.000.000,00	53,31	113.519.000,00	(67,41)
2	Retribusi Jasa Usaha	4.692.973.226,00	3.684.466.835,00	78,51	2.853.661.556,00	29,11
3	Retribusi Perizinan Tertentu	12.750.000,00	12.775.000,00	100,20	39.823.200,00	(67,92)
Jumlah		4.775.123.226,00	3.734.241.835,00	78,20	3.007.003.756,00	24,18

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per Objek Layanan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2021 adalah sebagai berikut.

a) Retribusi Jasa Umum

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Retribusi Jasa Umum TA 2021 sebesar Rp69.400.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp37.000.000,00 atau 53,31%. Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2021 tersebut turun sebesar sebesar Rp76.519.000,00 atau 67,41% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2020 sebesar Rp113.519.000,00.

Berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat perubahan pada Rincian Objek Retribusi Jasa Umum, dimana Retribusi Pelayanan Kesehatan di TA 2021 tidak ada pada BAS yang berlaku, sehingga di TA 2021 Retribusi Jasa Umum terdiri atas Retribusi Pengganti Cetak Peta dan Retribusi Pelayanan Pendidikan.

Adapun rincian Retribusi Jasa Umum TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.6 Rincian Retribusi Jasa Umum TA 2021 dan 2020*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	0,00	2.219.000,00	(100,00)
2	Retribusi Pengganti Cetak Peta	67.000.000,00	37.000.000,00	55,22	111.300.000,00	(66,76)
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		69.400.000,00	37.000.000,00	53,31	113.519.000,00	(67,41)

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Retribusi Pengganti Cetak Peta sebesar Rp67.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp37.000.000,00 atau 55,22% yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Realisasi pendapatan Retribusi Pengganti Cetak Peta turun sebesar Rp74.300.000,00 atau 66,76% dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp111.300.000,00.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp2.400.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Nihil atau 0,00% yang terdapat pada Dinas Kesehatan.

b) Retribusi Jasa Usaha

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Retribusi Jasa Usaha TA 2021 sebesar Rp4.692.973.226,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.684.466.835,00 atau 78,51%. Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2021 tersebut meningkat sebesar Rp830.805.279,00 atau 29,11% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2020 sebesar Rp2.853.661.556,00.

Berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat perubahan pada Rincian Objek Retribusi Jasa Usaha, dimana Rincian Objek Pendapatan Retribusi TA 2021 merupakan Objek Pendapatan Retribusi di TA 2020, yang meliputi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Adapun Rincian Objek Retribusi Jasa Usaha TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.7 Rincian Retribusi Jasa Usaha TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1.	Ret. Pemakaian Kekayaan Daerah	2.437.573.606,00	1.840.990.085,00	75,53	1.074.264.056,00	71,37
2.	Ret. Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	1.064.700.000,00	727.025.000,00	68,28	479.735.000,00	51,55
3.	Ret. Pelayanan Kepelabuhan	325.600.000,00	342.840.750,00	105,30	286.197.000,00	19,79
4.	Ret. Tempat Rekreasi dan Olahraga	396.685.000,00	228.987.000,00	57,73	157.535.500,00	45,36
5.	Ret. Penjualan Produksi Usaha daerah	468.414.620,00	544.624.000,00	116,27	855.930.000,00	(36,37)
Jumlah		4.692.973.226,00	3.684.466.835,00	78,51	2.853.661.556,00	29,11

b.1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2021 sebesar Rp2.437.573.606,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.840.990.085,00 atau 75,53%. Realisasi pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah naik sebesar Rp766.726.029,00 atau 71,37% dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp1.074.264.056,00. Sub Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.8 Rincian Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah TA 2021 dan TA 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	628.760.000,00	336.860.000,00	53,58	267.640.000,00	25,86
2.	Retribusi Pemakaian Laboratorium	740.213.606,00	968.800.085,00	130,88	449.389.056,00	115,58
3.	Retribusi Pemakaian Ruangan	818.600.000,00	310.165.000,00	37,89	104.990.000,00	195,42
4.	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	250.000.000,00	225.165.000,00	90,07	252.245.000,00	(10,74)
Jumlah		2.437.573.606,00	1.840.990.085,00	75,53	1.074.264.056,00	71,37

Selanjutnya masing masing Sub Rincian Objek Retribusi Jasa Usaha dapat diuraikan sumber pendapatannya sebagai berikut.

Tabel 5.9 Rincian Sumber Pendapatan dari Sub Rincian Objek Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan TA 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi TA 2021
1	Sewa Parkir Terminal B Gn. Ayu BS	2.000.000,00
2	Sewa Lahan Sport Center	13.000.000,00
3	Sewa Lahan Buffet Tris	18.060.000,00
4	Sewa Lahan Parkir Sport Center Pantai Panjang	20.000.000,00
5	Sewa Lahan Parkir Sport Center Sawah Lebar	6.000.000,00
6	Sewa Lahan Parkir Kolam Renang Rafflesia	3.000.000,00
7	Gedung Balai Buntar	244.500.000,00
8	Gedung STQ dan Tribun	5.500.000,00
9	Kantin BPKD	24.800.000,00
Jumlah		336.860.000,00

Tabel 5.10 Rincian Sumber Pendapatan dari Sub Rincian Objek Retribusi Pemakaian Laboratorium TA 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi TA 2021
1	Laboratorium Dinas Kesehatan	859.200,00
2	Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	649.306.900,00
3	Laboratorium Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	8.450.000,00
4	Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	203.662.250,00
5	Laboratorium Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	83.536.335,00
6	Laboratorium Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	18.235.400,00
7	Laboratorium Dinas Energi Sumber Daya Mineral	3.500.000,00
8	Laboratorium Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.250.000,00
Jumlah		968.800.085,00

Tabel 5.11 Rincian Sumber Pendapatan dari Sub Rincian Objek Retribusi Pemakaian Ruangan TA 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi TA 2021
1	Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	109.350.000,00
2	Aula Dinas Kesehatan	89.400.000,00
3	Aula Dinas Sosial	1.800.000,00

No	Uraian	Realisasi TA 2021
4	Aula Dinas Koperasi, UKM	42.265.000,00
5	Aula Dinas Kelautan dan Perikanan	300.000,00
6	Aula Bada Pengembangan Sumber Daya Manusia	67.050.000,00
Jumlah		310.165.000,00

Untuk Rincian Sumber Pendapatan dari Sub Rincian Objek Retribusi Penyewaan Kendaraan Bermotor merupakan pendapatan dari Penyewaan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu sebesar Rp225.165.000,00.

b.2) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Rincian Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa TA 2021 sebesar Rp1.064.700.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp727.025.000,00 atau 68,28%. Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa meningkat sebesar Rp247.290.000,00 atau 51,55% dari TA 2020 sebesar Rp479.735.000,00. Sub Rincian Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.12 Sub Rincian Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	1.064.700.000,00	727.025.000,00	68,28	479.735.000,00	51,55
	Jumlah	1.064.700.000,00	727.025.000,00	68,28	479.735.000,00	51,55

Lebih rinci untuk pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.13 Rincian Sumber Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa TA 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi TA 2021
1	Sewa Hotel Pinus SMKN 7 Kota Bengkulu	14.530.000,00
2	Sewa Kamar Bapelkes	294.850.000,00
3	Sewa Mess Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	35.600.000,00
4	Sewa Wisma Atlet Dinas Pemuda dan Olahraga	19.320.000,00
5	Sewa Kamar Badan Penghubung	77.325.000,00
6	Sewa Kamar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	285.400.000,00
Jumlah		727.025.000,00

b.3) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan TA 2021 sebesar

Rp325.600.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp342.840.750,00 atau 105,30%. Realisasi Pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kepelabuhan naik sebesar Rp56.643.750,00 atau sebesar 19,79% dari TA 2020 sebesar Rp286.197.000,00. Sub Rincian Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.14 Rincian Retribusi Pelayanan Kepelabuhan TA 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	325.600.000,00	342.840.750,00	105,30	286.197.000,00	19,79
	Jumlah	325.600.000,00	342.840.750,00	105,30	286.197.000,00	19,79

Lebih rinci untuk pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.15 Rincian Sumber Retribusi Pelayanan Kepelabuhan TA 2021
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1.	Dinas Perhubungan	228.460.750,00
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	114.380.000,00
	Jumlah	342.840.750,00

b.4) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Rincian Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2021 sebesar Rp396.685.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp228.987.000,00 atau 57,73%. Realisasi Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga naik sebesar Rp71.451.500,00 atau naik 45,36% dari TA 2020 sebesar Rp157.535.500,00. Sub Rincian Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.16 Rincian Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	396.685.000,00	228.987.000,00	57,73	157.535.500,00	45,36
	Jumlah	396.685.000,00	228.987.000,00	57,73	157.535.500,00	45,36

Lebih rinci sumber retribusi tempat pariwisata dan tempat olahraga dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.17 Rincian Sumber Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga TA 2021
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realiasi TA 2021
1	Museum Negeri	3.388.000,00
2	Benteng Marlborough	61.881.000,00
3	Rumah Pengasingan Bung Karno	32.473.000,00
4	Rumah Fatmawati	5.851.000,00
5	Lapangan Tenis Indor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.680.000,00
7	Stadion Olahraga	10.500.000,00
8	Gedung Olah Raga (GOR)	26.470.000,00
9	Kolam Renang Rafflesia	74.294.000,00
10	Plaza Terbuka Sawah Lebar	750.000,00
11	Lapangan Tenis Indoor Biro Umum	9.700.000,00
Jumlah		228.987.000,00

b.5) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Rincian Objek Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah TA 2021 sebesar Rp468.414.620,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp544.624.000,00 atau 116,27%. Realisasi Pendapatan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah turun sebesar Rp311.306.000,00 atau turun 36,37% dari TA 2020 sebesar Rp855.930.000,00. Sub Rincian Objek Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah TA 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.18 Rincian Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah TA 2021
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1.	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	468.414.620,00	544.624.000,00	116,27	855.930.000,00	(36,37)
	Jumlah	468.414.620,00	544.624.000,00	116,27	855.930.000,00	(36,37)

Lebih rinci sumber Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.19 Rincian Sumber Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah TA 2021
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021
1	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	98.740.000,00
2	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	415.384.000,00
3	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	30.500.000,00
Jumlah		544.624.000,00

c) Retribusi Perizinan Tertentu

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2021 sebesar Rp12.750.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp12.775.000,00 atau 100,20%. Realisasi pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu turun sebesar Rp27.048.200,00 atau 67,92% jika dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp39.823.200,00.

Berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat perubahan pada Rincian Objek Retribusi Perizinan Tertentu, dimana Rincian Objek Pendapatan Retribusi TA 2021 merupakan Objek Pendapatan Retribusi di TA 2020, yang meliputi Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum, Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Adapun Rincian Objek Retribusi Perizinan Tertentu TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.20 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu TA 2021 dan TA 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	10.500.000,00	12.775.000,00	121,67	13.920.000,00	(8,23)
3	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0,00	0,00	0,00	25.903.200,00	(100,00)
Jumlah		12.750.000,00	12.775.000,00	100,20	39.823.200,00	(67,92)

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah oleh pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 sebesar Rp17.310.732.877,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp17.125.198.290,04 atau 98,93%. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar Rp2.455.898.596,48 atau 16,74% dari TA 2020 sebesar Rp14.669.299.693,56. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.21 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan TA 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019	%
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	100.516.907,00	37.440.514,00	37,25	0,00	100,00
2.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	17.210.215.970,00	17.087.757.776,04	99,29	14.669.299.693,56	16,49
Jumlah		17.310.732.877,00	17.125.198.290,04	98,93	14.669.299.693,56	16,74

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan deviden dari Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Penyertaan Modal dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.22 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
TA 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	%
1.	PT Bank Bengkulu	16.661.724.776,04	14.110.759.619,56	18,08
2.	PT Sarana Mandiri Mukti	426.033.000,00	520.919.615,00	(18,22)
3.	PT Askrida	37.440.514,00	37.620.459,00	(0,48)
Jumlah		17.125.198.290,04	14.669.299.693,56	16,74

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersumber dari penerimaan dividen PT Bank Bengkulu sebesar Rp16.661.724.776,04 naik sebesar Rp2.550.965.156,48 atau 18,08% dari TA 2020 sebesar Rp14.110.759.619,56, PT Sarana Mandiri Mukti sebesar Rp426.033.000,00 turun sebesar Rp94.886.615,00 atau 18,22% dari TA 2020 sebesar Rp520.919.615,00, PT Askrida sebesar Rp37.440.514,00 turun sebesar Rp179.945,00 atau 0,48% dari TA 2020 sebesar Rp37.620.459,00.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 sebesar Rp167.888.191.592,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp185.010.026.024,69 atau 110,20%. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 tersebut naik sebesar Rp52.662.150.245,27 atau 28,38%. Rincian Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.23 Rincian Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	-	130.400.000,00	100,00	-	100,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	390.776.000,00	381.226.000,00	97,56	26.125.000,00	1.359,24
3	Jasa Giro	6.711.911.440,00	4.449.339.517,00	66,29	2.056.641.186,00	116,34
4	Pendapatan Bunga	2.000.000.000,00	1.410.833.320,00	70,54	379.166.666,68	272,09

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
5	Penerimaan atas TGR Keuangan Daerah	-	18.000.000,00	100,00	17.500.000,00	2,86
6	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain	37.898.697.973,00	27.438.148.208,60	72,40	-	100,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	460.323.381,00	916.320.610,69	199,06	1.065.802.999,44	(14,03)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	6.772.041.326,00	7.530.609.008,00	111,20	4.765.770.683,00	58,01
9	Pendapatan dari Pengembalian	1.020.297.658,00	1.583.797.421,00	155,23	10.427.173.270,23	(84,81)
10	Pendapatan Dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	65.018.000,00	100,00
11	Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan	0,00	0,00	0,00	680.644.599,00	100,00
12	Pendapatan BLUD	112.634.143.814,00	141.151.351.939,40	125,32	110.498.255.114,00	27,74
13	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.902.666.762,00	(100,00)
Jumlah		167.888.191.592,00	185.010.026.024,69	110,20	132.884.764.280,35	39,23

Penjelasan lebih lanjut realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2021, antara lain sebagai berikut.

a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan TA 2021 terealisasi sebesar Rp130.400.00,00.

b) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 2021 sebesar Rp390.776.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp381.226.000,00 atau 97,56%. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan TA 2021 tersebut naik sebesar Rp355.101.000,00 atau 1.359,24% dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp26.125.000,00.

c) Jasa Giro

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Jasa Giro TA 2021 sebesar Rp6.711.911.440,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.449.339.517,00 atau 66,29%. Realisasi Jasa Giro TA 2021 tersebut naik sebesar Rp2.392.698.331,00 atau 116,34% dibandingkan dengan realisasi Jasa Giro TA 2020 sebesar Rp2.056.641.186,00.

d) Pendapatan Bunga

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Pendapatan Bunga TA 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.410.833.320,00 atau 70,54%. Realisasi Pendapatan Bunga TA 2021 tersebut naik sebesar Rp1.031.666.653,32 atau 272,09% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Bunga TA 2020 sebesar Rp379.166.666,68.

Pendapatan Bunga merupakan pendapatan dari penempatan deposito di Bank Bengkulu sebesar Rp20.000.000.000,00.

e) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah TA 2021 terealisasi sebesar Rp18.000.000,00. Pendapatan dari Penerimaan atas Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah Merupakan setoran atas Tuntutan ganti rugi kepada Sdr. NA sebesar Rp18.000.000,00. Realisasi pada TA 2021 tersebut naik sebesar Rp500.000,00 atau 2,86% dibandingkan dengan realisasi Penerimaan atas TGR Keuangan Daerah TA 2020 sebesar Rp17.500.000,00..

f) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Hasil Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain TA 2021 sebesar Rp37.898.697.973,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp27.438.148.208,60 atau 72,40%.

g) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Pendapatan Denda atas keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2021 sebesar Rp460.323.381,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp916.320.610,69 atau 199,06%. Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan turun sebesar Rp149.482.388,75 atau 14,03% dibandingkan realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan TA 2020 sebesar Rp1.065.802.999,44.

h) Pendapatan Denda Pajak Daerah

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2021 sebesar Rp6.772.041.326,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp7.530.609.008,00 atau 111,20%. Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2021 tersebut naik sebesar Rp2.764.838.325,00 atau 58,01% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp4.765.770.683,00.

i) Pendapatan dari Pengembalian

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Pendapatan dari Pengembalian TA 2021 sebesar Rp1.020.297.658,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.583.797.421,00 atau 155,23%. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2021 tersebut turun sebesar Rp8.843.375.849,23 atau 84,81% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan dari Pengembalian TA 2020 sebesar Rp10.427.173.270,23.

j) Pendapatan BLUD

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Pendapatan BLUD TA 2021 sebesar Rp112.634.143.814,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp141.151.351.939,40 atau 125,32%. Realisasi Pendapatan BLUD TA 2021 tersebut naik sebesar Rp30.653.096.825,40 atau 27,74% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan BLUD TA 2020 sebesar Rp110.498.255.144,00.

b. Pendapatan Transfer

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Pendapatan Transfer TA 2021 sebesar Rp2.068.643.597.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.066.215.698.403,00 atau 99,88%. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 tersebut naik sebesar Rp12.905.329.797,00 atau 0,63% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 sebesar Rp2.053.310.368.606,00. Rincian Pendapatan Transfer TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.24 Rincian Pendapatan Transfer TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1	Dana Perimbangan	2.049.812.349.000,00	2.047.384.450.403,00	99,88	2.053.310.368.606,00	(0,29)
2	Dana Insentif Daerah (DID)	18.831.248.000,00	18.831.248.000,00	100,00	0,00	100,00
Jumlah		2.068.643.597.000,00	2.066.215.698.403,00	99,88	2.053.310.368.606,00	0,63

Didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS) pada Jenis Pendapatan Transfer mengalami perbedaan pada Objek pendapatan di TA 2021 dengan Objek Pendapatan di TA 2020, meliputi sebagai berikut :

Tabel 5.25 Klasifikasi Objek Pendapatan Transfer

No.	Uraian Objek Pendapatan	
	TA 2021	TA 2020
1.	Dana Perimbangan	Bagi Hasil Pajak
		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
		Dana Alokasi Umum
		Dana Alokasi Khusus
2..	Dana Insentif Daerah	Dana Penyesuaian

Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi Pendapatan Transfer disampaikan berikut ini:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a) Dana Perimbangan

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Dana Perimbangan TA 2021 sebesar Rp2.049.812.349.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.047.384.450.403,00 atau 99,88%. Realisasi Dana Perimbangan 2021 tersebut naik sebesar Rp25.470.420.797,00 atau 1,26% dibandingkan dengan realisasi Dana Perimbangan TA 2021 sebesar Rp2.021.914.029.606,00. Rincian Dana Perimbangan TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.26 Rincian Dana Perimbangan TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1	Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil	61.617.044.000,00	83.245.032.380,00	135,10	71.140.797.650,00	17,01
2	Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum	1.213.764.868.000,00	1.213.764.868.000,00	100,00	1.219.949.535.000,00	(0,51)
3	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (Fisik)	196.789.535.000,00	177.195.802.118,00	90,04	136.449.090.558,00	29,86
4	Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	577.640.902.000,00	573.178.747.905,00	99,23	594.374.606.398,00	(3,57)
Jumlah		2.049.812.349.000,00	2.047.384.450.403,00	99,88	2.021.914.029.606,00	1,26

Penjelasan lebih lanjut realisasi Dana Perimbangan TA 2021, antara lain sebagai berikut.

a.1) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021 sebesar Rp61.617.044.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp83.245.032.380,00 atau 135,10%. Realisasi Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021 tersebut meningkat sebesar Rp12.104.234.730,00 atau 17,01% dibandingkan dengan realisasi Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2020 sebesar Rp71.140.797.650,00.

Berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat perubahan pada Rincian Objek Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021 dengan TA 2020 yaitu sebagai berikut :

**Tabel 5.27 Rincian Objek Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil
TA 2021 dan 2020**

Uraian Rincian Objek TA 2021		Uraian Rincian Objek TA 2020	
Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)		Bagi Hasil Pajak	
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
2.	DBH PPh Pasal 21	2.	Bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29

Uraian Rincian Objek TA 2021		Uraian Rincian Objek TA 2020	
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND		
		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	2.	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi
6.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)
7.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	4.	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
8.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi		
9.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)		

Adapun Rincian Objek Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021 dengan TA 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.28 Rincian Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021 dengan TA 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.088.057.000,00	17.787.415.414,00	250,95	4.885.326.423,00	264,10
2.	DBH PPh Pasal 21	13.190.678.000,00	35.486.419.665,00	269,03	37.345.498.891,00	(4,98)
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	16.000.000.000,00	1.247.058.784,00	7,79	0,00	0,00
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	155.905.000,00	347.202.017,00	222,70	0,00	0,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.692.588.000,00	662.583.525,00	39,15	1.443.178.486,00	(54,09)
6.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	23.000.000.000,00	25.844.002.700,00	112,37	27.062.134.605,00	(4,50)
7.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	75.379.000,00	164.583.776,00	218,34	114.046.997,00	44,31
8.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	0,00	369.936.000,00	100,00	0,00	0,00
9.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	414.437.000,00	1.335.830.499,00	322,32	290.612.248,00	359,66
Jumlah		61.617.044.000,00	83.245.032.380,00	135,10	71.140.797.650,00	17,01

a.2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Dana Alokasi Umum TA 2021 sebesar Rp1.213.764.868.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar

Rp1.213.764.868.000,00 atau 100,00%. Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2021 tersebut turun sebesar Rp6.184.667.000,00 atau 0,51% dibandingkan dengan realisasi Dana Alokasi Umum TA 2020 sebesar Rp1.219.949.535.000,00.

a.3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan DAK Fisik TA 2021 sebesar Rp196.789.535.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp177.195.802.118,00 atau 90,04%. Realisasi DAK Fisik TA 2021 tersebut naik sebesar Rp40.746.711.560,00 atau 29,86% dibandingkan dengan realisasi DAK Fisik TA 2020 sebesar Rp136.449.090.558,00.

Berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat perubahan pada Rincian Objek Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2021 dengan TA 2020 yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.29 Rincian Objek Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2021 dan 2020

Uraian Rincian Objek TA 2021		Uraian Rincian Objek TA 2020	
Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		Dana Alokasi Khusus	
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
2.	DBH PPh Pasal 21	2.	Bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN		
		Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	2.	Bagi Hasil Dari Dana Reboisasi
6.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.	Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)
7.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	4.	Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)
8.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi		
9.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)		

Adapun Rincian Objek Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021 dengan TA 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.30 Rincian Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021 dengan TA 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.088.057.000,00	17.787.415.414,00	250,95	4.885.326.423,00	264,10
2.	DBH PPh Pasal 21	13.190.678.000,00	35.486.419.665,00	269,03	37.345.498.891,00	(4,98)
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	16.000.000.000,00	1.247.058.784,00	7,79	0,00	0,00
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	155.905.000,00	347.202.017,00	222,70	0,00	0,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.692.588.000,00	662.583.525,00	39,15	1.443.178.486,00	(54,09)
6.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	23.000.000.000,00	25.844.002.700,00	112,37	27.062.134.605,00	(4,50)
7.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	75.379.000,00	164.583.776,00	218,34	114.046.997,00	44,31
8.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	0,00	369.936.000,00	100,00	0,00	0,00
9.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	414.437.000,00	1.335.830.499,00	322,32	290.612.248,00	359,66
Jumlah		61.617.044.000,00	83.245.032.380,00	135,10	71.140.797.650,00	17,01

a. DAK Non Fisik

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan DAK Non Fisik TA 2021 sebesar Rp577.640.902.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp573.178.747.905,00 atau 99,23%. Realisasi DAK Non Fisik TA 2021 tersebut turun sebesar Rp52.592.197.493,00 atau 8,40% dibandingkan dengan realisasi DAK Non Fisik TA 2020 sebesar Rp625.770.945.398,00.

b) Dana Insentif Daerah (DID)

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Dana Insentif Daerah TA 2021 sebesar Rp18.831.248.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp18.831.248.000,00 atau 100%.

c. Lain – lain Pendapatan yang Sah

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 sebesar Rp1.116.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.116.000.000,00 atau 100,00%. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 tersebut turun sebesar Rp20.156.119.000,00 atau 94,75% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2021 sebesar Rp21.272.119.000,00. Rincian

Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.31 Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1	Pendapatan Hibah	1.116.000.000,00	1.116.000.000,00	100,00	20.156.119.000,00	(94,46)
2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.116.000.000,00	(100,00)
Jumlah		1.116.000.000,00	1.116.000.000,00	100,00	21.272.119.000,00	(94,75)

Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi Pendapatan Transfer disampaikan berikut ini:

Pendapatan Hibah

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Pendapatan Hibah TA 2021 sebesar Rp1.116.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.116.000.000,00 atau 100,00%. Pendapatan hibah merupakan Pembayaran dari PT. Jasa Raharja.

5.1.2. Belanja Daerah

Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Belanja meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan belanja disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsi OPD (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Belanja Daerah TA 2021 sebesar Rp3.056.477.210.118,00 realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.880.225.046.730,80 atau 94,23%. Realisasi Belanja Daerah TA 2021 tersebut naik sebesar Rp181.766.968.758,93 atau 6,74% dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2020 sebesar Rp2.698.458.077.971,87. Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi Belanja Daerah dilihat pada tabel berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Hibah dan Bantuan Sosial. Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Belanja Operasi TA 2021 sebesar Rp2.192.230.635.048,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp2.120.610.505.189,51 atau 96,73%.

Didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah, Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS) pada Kelompok Belanja Operasi mengalami perbedaan di TA 2021 dengan Kelompok Belanja Operasi di TA 2020, meliputi sebagai berikut :

Tabel 5.32 Klasifikasi Kelompok Belanja Operasi

No.	Uraian Kelompok Belanja Operasi	
	TA 2021	TA 2020
1.	Belanja Pegawai	Belanja Pegawai
2.	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang
3.	Belanja Hibah	Belanja Hibah
4.	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Operasi TA 2021 tersebut turun sebesar Rp17.832.560.762,59 atau 0,83% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2020 sebesar Rp2.138.443.065.952,10. Rincian Belanja Operasi TA 2021 dan TA 2020 berdasarkan penggunaan Bagan Akun Standar (BAS) yang berlaku adalah sebagai berikut.

Tabel 5.33 Rincian Belanja Operasi TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1	Belanja Pegawai	1.145.281.659.574,00	1.097.398.109.416,40	95,82	1.066.821.278.776,00	2,87
2	Belanja Barang dan Jasa	1.002.252.975.474,00	685.841.963.893,11	68,43	559.001.307.176,10	22,69
3	Belanja Hibah	44.596.000.000,00	337.271.451.880,00	756,28	512.620.480.000,00	(34,21)
4	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	98.980.000,00	98,98	0,00	100,00
	Jumlah	2.192.230.635.048,00	2.120.610.505.189,51	96,73	2.138.443.065.952,10	(0,83)

Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian Belanja Operasi sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp1.145.281.659.574,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.097.398.109.416,40 atau 95,82%. Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 naik sebesar Rp30.576.830.640,40 atau 2,87% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp1.066.821.278.776,00. Realisasi belanja tersebut merupakan belanja pegawai yang dibayarkan kepada seluruh pegawai yang tersebar di 36 Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu. Rincian Belanja Pegawai TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.34 Rincian Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	717.170.870.639,00	696.245.777.034,40	97,08	715.183.202.088,00	(2,65)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	212.608.898.830,00	198.606.111.842,00	93,41	327.670.223.995,00	(39,39)
3	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	174.222.203.180,00	163.912.706.953,00	94,08	0,00	100,00
4	Belanja gaji dan Tunjangan DPRD	31.630.976.860,00	29.349.463.120,00	92,79	0,00	100,00
5	Belanja gaji dan Tunjangan KDH/WKH	269.368.820,00	242.595.820,00	90,06	0,00	100,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.791.300.000,00	1.579.121.401,00	88,16	1.187.500.134,00	32,98
7	Belanja Pegawai BOS	2.568.993.245,00	2.699.046.000,00	105,06	0,00	100,00
8	Belanja Pegawai BLUD	5.019.048.000,00	4.763.287.246,00	94,90	5.070.454.659,00	(6,06)
9	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10	Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	16.786.509.900,00	(100,00)
11	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	898.800.000,00	(100,00)
12	Belanja Untuk Diberikan ke Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Belanja Honorarium Tim Teknis BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	24.588.000,00	(100,00)
	Jumlah	1.145.281.659.574,00	1.097.398.109.416,40	95,82	1.066.821.278.776,00	2,87

2) Belanja Barang dan Jasa

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp1.002.252.975.474,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp685.841.963.893,11 atau 68,43%.. Rendahnya serapan belanja barang dan jasa diakibatkan karena kesalahan dalam penganggaran Belanja Barang dan Jasa BOS, yang seharusnya alokasi penempatan anggaran sebagai Belanja Hibah BOS ke Kabupaten/Kota namun dalam APBD dialokasikan ke dalam Belanja Barang dan Jasa pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan realisasi belanja Hibah BOS sebesar Rp296.263.368.000,00.

Didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS) pada Jenis Belanja Barang dan Jasa mengalami perbedaan pada Objek Belanja Barang dan Jasa di TA 2021 dengan Objek Belanja Barang dan Jasa di TA 2020, meliputi sebagai berikut :

Tabel 5.35 Klasifikasi Objek Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian Objek Belanja Barang dan Jasa	
	TA 2021	TA 2020
1.	Belanja Barang	Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Material Belanja Makanan dan Minuman Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

No.	Uraian Objek Belanja Barang dan Jasa	
	TA 2021	TA 2020
		Belanja Pakaian Kerja
		Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
		Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
		Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
2..	Belanja Jasa	Belanja Jasa Kantor
		Belanja Iuran Asuransi
		Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
		Belanja Cetak dan Penggandaan
		Belanja Sewa Rumah/gedung/gudang/parkir
		Belanja Sewa Sarana Mobilitas
		Belanja Sewa Alat Berat
		Biaya Penanganan Perkara
		Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
		Belanja Jasa Konsultansi
		Belanja Seleksi
3.	Belanja Pemeliharaan	Belanja Pemeliharaan
4.	Belanja Perjalanan Dinas	Belanja Perjalanan Dinas
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
		Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis
		Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga / masyarakat
6.	Belanja Barang dan Jasa Bos	Belanja Operasional Sekolah
7.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 tersebut naik sebesar Rp126.840.656.717,01 atau 22,69% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 sebesar Rp559.001.307.176,10 Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.36 Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1	Belanja Barang	123.629.723.406,00	105.808.368.105,38	83,27	16.267.904.474,00	550,41
2	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	28.152.302.464,00	(100,00)
3	Belanja Jasa	291.545.102.892,00	245.620.341.311,10	83,93	149.077.386.767,00	64,14
4	Belanja Premi Asuransi	0,00	0,00	0,00	7.112.764.188,00	(100,00)
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	9.394.154.703,00	(100,00)
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00	7.614.052.238,00	(100,00)
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/parkir	0,00	0,00	0,00	1.030.514.100,00	(100,00)
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00	350.970.000,00	(100,00)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
9	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00	2.703.000.000,00	(100,00)
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	941.093.100,00	(100,00)
11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00	25.157.228.818,00	(100,00)
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00	1.452.324.000,00	(100,00)
13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	0,00	0,00	76.500.000,00	(100,00)
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	0,00	0,00	1.077.844.150,00	(100,00)
15	Belanja Perjalanan Dinas	113.411.512.931,00	97.050.783.491,00	85,12	96.986.146.506,00	(0,46)
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	51.500.000,00	(100,00)
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	0,00	0,00	3.849.868.357,00	(100,00)
18	Belanja Pemeliharaan	58.666.410.093,00	51.242.594.496,39	87,08	12.039.285.543,89	324,34
19	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	0,00	0,00	6.359.861.592,68	(100,00)
20	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	12.275.243.947,60	(100,00)
21	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat	4.280.200.000,00	4.121.795.953,00	96,30	678.646.000,00	507,36
24	Belanja Jasa Pemenangan Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Operasional Sekolah	0,00	0,00	0,00	79.305.399.341,00	(100,00)
26	Belanja Barang dan Jasa Bos	317.247.734.090,00	85.510.904.000,00	26,95	0,00	0,00
27	Belanja Seleksi	0,00	0,00	0,00	35.700.000,00	(100,00)
28	Belanja Barang dan Jasa BLUD	93.472.292.062,00	96.487.176.535,84	103,23	97.011.616.885,93	(0,54)
	Jumlah	1.002.252.975.474,00	685.841.963.893,11	67,98	559.001.307.176,10	21,89

Adapun realisasi belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp96.487.176.535,84 meliputi Belanja Barang dan Jasa pada BLUD RSUD Dr. M. Yunus sebesar Rp89.968.204.442,64 dan Belanja Barang dan Jasa pada BLUD RSKJ Soeprapto sebesar Rp6.518.972.093,20 seperti dijelaskan dalam tabel 5.33 berikut.

Tabel 5.37 Rincian Belanja Barang Dan Jasa BLUD RSUD TA 2021
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	RSUD. Dr. M. Yunus	93.072.952.000,00	89.968.204.442,64	96,66
2	RSKJ Soeprapto	399.320.000,00	6.518.972.093,20	1632,52
	Jumlah	93.472.272.000,00	96.487.176.535,84	103,23

3) Belanja Hibah

Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Belanja Hibah TA 2021 sebesar Rp44.596.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp337.271.451.880,00 atau 756,28%. Realisasi Belanja Hibah yang melebihi anggaran disebabkan penempatan realisasi Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp296.263.368.000,00 tidak teranggarkan di Belanja Hibah melainkan di Belanja Barang dan Jasa BOS.

Didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Penggunaan Bagan Akun Standar (BAS) pada Jenis Belanja Hibah mengalami perbedaan pada Objek Belanja Hibah di TA 2021 dengan Objek Belanja Hibah di TA 2020, meliputi sebagai berikut :

Tabel 5.38 Klasifikasi Objek Belanja Hibah

No.	Uraian Objek Belanja Hibah	
	TA 2021	TA 2020
1.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi
2.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	Belanja Hibah Dana BOS
3.	Belanja Hibah Dana BOS	
4.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	

Realisasi Belanja Hibah TA 2021 tersebut turun sebesar Rp175.349.028.120,00 atau 34,21% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA 2020 sebesar Rp512.620.480.000,00. Realisasi tersebut merupakan belanja hibah kepada Pemerintah Pusat, belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik, pemberian hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, Belanja Hibah Dana BOS. Rincian Belanja Hibah TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.39 Rincian Belanja Hibah TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	0,00	100,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	36.800.000.000,00	33.318.535.000,00	90,54	0,00	100,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.796.000.000,00	1.689.548.880,00	94,073	0,00	100,00
4	Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi swasta	0,00	0,00	0,00	185.310.400.000,00	(100,00)
5	Belanja Hibah Dana BOS	0,00	296.263.368.000,00	100,00	327.310.080.000,00	(9,49)
	Jumlah	44.596.000.000,00	337.271.451.880,00	756,28	512.620.480.000,00	(34,21)

Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2021 sebesar Rp33.318.535.000,00 dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.40 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	13.750.000.000,00	11.378.535.000,00	82,75
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	100,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan	21.300.000.000,00	20.190.000.000,00	94,79
	Jumlah	36.800.000.000,00	33.318.535.000,00	90,54

Realisasi Belanja Hibah Dana Bos TA 2021 sebesar Rp296.263.368.000,00 dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.41 Belanja Hibah Dana Bos TA 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	0,00	261.346.086.000,00	100,00
2	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	34.917.282.000,00	100,00
	Jumlah	0,00	296.263.368.000,00	100,00

Realisasi Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri meliputi 10 Kabupaten dan Kota dengan rincian penyaluran melalui KPPN sebagai berikut :

Tabel 5.42 Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Yang diterima oleh Satdikdas Negeri TA 2021

(dalam Rupiah)

No	Kab/Kota	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri				
		SD Negeri	SMP Negeri	Kinerja	Afirmasi	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Bengkulu	25.033.860.000	16.367.120.000	60.000.000	-	41.460.980.000
2	Kab. Seluma	18.219.330.000	9.284.990.000	-	120.000.000	27.624.320.000
3	Kab. Bengkulu Selatan	13.608.000.000	8.478.690.000	840.000.000	-	22.926.690.000
4	Kab. Kaur	12.157.156.000	6.901.014.000		160.000.000	19.218.170.000
5	Kab. Bengkulu Tengah	10.656.550.000	5.948.150.000	60.000.000	40.000.000	16.704.700.000
6	Kab. Kepahiang	11.213.538.000	6.062.080.000			17.275.618.000
7	Kab. Rejang Lebong	21.538.980.000	12.232.660.000	1.070.000.000	120.000.000	34.961.640.000
8	Kab. Lebong	8.527.076.000	5.216.288.000		40.000.000	13.783.364.000
9	Kab. Bengkulu Utara	27.930.864.000	13.512.136.000		40.000.000	41.483.000.000
10	Kab. Mukomuko	18.045.706.000	7.681.898.000	180.000.000		25.907.604.000
	TOTAL	166.931.060.000	91.685.026.000	2.210.000.000	520.000.000	261.346.086.000

Realisasi Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta meliputi 10 Kabupaten, Kota dan Provinsi dengan rincian penyaluran melalui KPPN sebagai berikut :

Tabel 5.43 Realisasi Belanja Hibah Dana BOS Yang diterima oleh Satdikdas Swasta TA 2021
(dalam Rupiah)

No	Kab/Kota	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta					
		SD Swasta	SMP Swasta	SMA Swasta	SMK Swasta	SLB Swasta	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Provinsi Bengkulu			3.516.969.000	6.794.845.000	776.850.000	11.088.664.000
2	Kota Bengkulu	6.780.240.000	2.908.730.000				9.688.970.000
3	Kab. Seluma	384.210.000	-				384.210.000
4	Kab. Bengkulu Selatan	736.380.000	342.430.000				1.078.810.000
5	Kab. Kaur	609.608.000	124.744.000				734.352.000
6	Kab. Bengkulu Tengah	110.356.000	272.484.000				382.840.000
7	Kab. Kepahiang	713.496.000	207.524.000				921.020.000
8	Kab. Rejang Lebong	3.283.290.000	1.718.090.000				5.001.380.000
9	Kab. Lebong	686.576.000	76.212.000				762.788.000
10	Kab. Bengkulu Utara	2.001.272.000	620.484.000				2.621.756.000
11	Kab. Mukomuko	1.420.540.000	831.952.000				2.252.492.000
	TOTAL	16.725.968.000	7.102.650.000	3.516.969.000	6.794.845.000	776.850.000	34.917.282.000

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya). Pemerintah Provinsi Bengkulu Menganggarkan Belanja Bantuan Sosial TA 2021 sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp98.980.000,000. Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.44 Rincian Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1	Belanja Bantuan Sosial barang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya)	100.000.000,00	98.980.000,00	98,98	0,00	100,00
	Jumlah	100.000.000,00	98.980.000,00	98,98	0,00	100,00

b. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp422.048.654.531,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp324.342.084.410,29 atau 76,85%. Realisasi

Belanja Modal TA 2021 tersebut turun sebesar Rp92.753.560.754,41 atau 22,24% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2020 sebesar Rp417.095.645.164,70. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.45 Rincian Belanja Modal TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020	%
1	Belanja Modal Tanah	468.400.000,00	351.833.957,00	75,11	910.700.000,00	(61,37)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	165.947.652.266,00	120.896.451.954,30	72,85	187.117.183.962,70	(35,39)
3	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	96.711.399.987,00	85.977.703.079,72	88,90	61.322.534.260,23	40,21
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	104.421.690.738,00	91.465.065.504,27	87,59	134.069.776.163,63	(31,78)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	54.499.511.540,00	25.651.029.915,00	47,07	33.675.450.778,14	(23,83)
	Jumlah	422.048.654.531,00	324.342.084.410,29	76,85	417.095.645.164,70	(22,24)

1) Belanja Modal Tanah

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Belanja Modal Tanah TA 2021 sebesar Rp468.400.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp351.833.957,00 atau 75,11%. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 tersebut turun sebesar Rp558.866.043,00 atau 61,37% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020 sebesar Rp910.700.000,00.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp165.947.652.266,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp120.896.451.954,30 atau 72,85%. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 tersebut turun sebesar Rp66.220.732.008,40 atau 35,39% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 sebesar Rp187.117.183.962,70. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Tabel 5.46 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per OPD TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

NO	KODE	OPD	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020	%
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	124.179.850.126,00	86.337.746.590,57	69,53	124.101.372.692,00	(30,43)
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN	1.050.000.000,00	892.500.000,00	85,00	433.755.687,00	105,76
3	1.02.02	RSUD Dr. M. YUNUS	5.294.918.500,00	4.149.364.525,00	78,37	40.471.884.068,70	(89,75)
4	1.02.03	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO	1.810.000.000,00	1.209.352.642,00	66,82	3.767.039.645,00	(67,90)
5	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	502.590.600,00	418.586.150,00	83,29	804.329.800,00	(47,96)

NO	KODE	OPD	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020	%
6	1.04.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	19.726.000,00	19.690.000,00	99,82	0,00	100,00
7	1.05.01	BADAN KESATUAN BANGSAN DAN POLITIK	526.969.300,00	513.579.000,00	97,46	0,00	100,00
8	1.05.02	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	472.230.000,00	467.461.150,00	98,99	0,00	100,00
9	1.05.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	331.855.000,00	11.990.000,00	3,61	0,00	100,00
10	1.06.01	DINAS SOSIAL	76.281.800,00	73.019.292,00	95,72	9.312.500,00	684,10
11	2.01.01	DINAS TENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI	445.010.000,00	194.347.120,00	43,67	0,00	100,00
12	2.02.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	170.428.600,00	169.867.008,30	99,67	0,00	100,00
13	2.03.01	DINAS KETAHANAN PANGAN	12.313.400,00	12.000.000,00	97,45	18.950.000,00	(36,68)
14	2.03.02	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	93.509.200,00	90.094.100,00	96,35	0,00	100,00
15	2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	40.000.000,00	39.199.820,00	98,00	0,00	100,00
16	2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	2.07.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	0,00	0,00	132.241.000,00	(100,00)
18	2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	265.918.300,00	124.740.000,00	46,91	52.547.000,00	137,39
19	2.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK	0,00	0,00	0,00	178.950.000,00	(100,00)
20	2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	418.000.000,00	388.803.800,00	93,02	0,00	100,00
21	2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	30.171.400,00	29.250.000,00	96,95	18.019.000,00	62,33
22	2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	206.786.000,00	205.865.000,00	99,55	196.995.000,00	4,50
23	2.17.01	BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.777.938.600,00	3.731.808.453,00	98,78	33.050.000,00	11.191,40
24	3.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	793.570.700,00	655.258.600,00	82,57	0,00	100,00
25	3.02.01	DINAS PARIWISATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.03.01	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	2.363.387.900,00	1.240.073.150,00	52,47	10.669.568.000,00	(88,38)

NO	KODE	OPD	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020	%
27	3.05.01	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	412.056.500,00	412.000.000,00	99,99	0,00	100,00
28	3.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	259.900.300,00	257.999.985,43	99,27	68.770.900,00	275,16
29	4.01.04	SEKRETARIAT DPRD	3.947.361.500,00	3.163.970.805,00	80,15	269.814.930,00	1.072,64
30	4.01.05	BADAN PENGHUBUNG	2.817.900.000,00	2.678.119.000,00	95,04	970.668.600,00	175,90
31	4.01.07	BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL	7.625.120.500,00	5.765.960.079,00	75,62	3.053.581.800,00	88,83
32	4.02.01	INSPEKTORAT	100.000.000,00	99.220.000,00	99,22	0,00	100,00
33	4.03.01	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	332.903.900,00	329.561.000,00	99,00	897.655.000,00	(63,29)
34	4.04.11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	7.147.529.340,00	6.804.183.104,00	95,20	968.678.340,00	602,42
35	4.05.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	212.424.800,00	199.841.580,00	94,08	0,00	100,00
36	4.06.01	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	211.000.000,00	211.000.000,00	100,00	0,00	100,00
JUMLAH			165.947.652.266,00	120.896.451.954,30	72,85	187.117.183.962,70	(35,39)

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar Rp96.711.399.987,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp85.977.703.079,72 atau 88,90%. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 tersebut naik sebesar Rp 24.655.168.819,49 atau 40,21% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2020 sebesar Rp61.322.534.260,23. Atas realisasi Belanja Modal tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Tabel 5.47 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per OPD TA 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

NO	KODE	OPD	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020	%
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	51.472.125.248,00	47.665.381.372,86	92,60	50.966.166.850,60	(6,48)
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN	16.618.585.391,00	16.095.080.120,00	96,85	1.171.092.578,00	1.274,36
3	1.02.02	RSUD Dr. M. YUNUS	390.830.000,00	389.528.000,00	99,67	2.924.876.000,00	(86,68)
4	1.02.03	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO	0,00	0,00	0,00	1.458.176.191,55	(100,00)
5	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14.238.126.607,00	10.993.049.857,00	77,21	1.031.162.043,82	966,08
6	1.03.01	CIPTA KARYA	0,00	0,00	0,00	1.041.786.078,95	(100,00)
	1.06.01	DINAS SOSIAL	27.300.000,00	26.000.000,00	95,24		0,00

NO	KODE	OPD	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020	%
7	2.01.01	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRASMIGRASI	1.552.586.681,00	1.490.682.200,00	96,01	0,00	0,00
8	2.03.02	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2.05.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2.09.01	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	2.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK	0,00	0,00	0,00	206.194.999,00	(100,00)
12	2.11.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	3.611.688.764,00	1.298.644.542,69	35,96	636.118.985,00	104,15
15	2.17.01	BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	4.326.000.000,00	4.208.254.726,98	97,28	0,00	0,00
16	3.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.202.900.000,00	2.035.383.381,81	92,40	0,00	0,00
17	3.02.01	DINAS PARIWISATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.03.01	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	195.000.000,00	194.500.000,00	99,74	816.387.648,50	(76,18)
19	3.07.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4.01.04	SEKRETARIAT DPRD	1.567.602.362,00	1.383.726.200,00	88,27	34.995.087,00	3.854,06
21	4.01.05	BADAN PENGHUBUNG	0,00	0,00	0,00	109.311.088,00	(100,00)
22	4.01.07	BIRO UMUM, HUMAS DAN PROTOKOL	508.654.934,00	197.472.678,38	38,82	157.683.662,32	25,23
23	4.04.11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	768.583.047,49	(100,00)
24	4.06.01	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH			96.711.399.987,00	85.977.703.079,72	88,90	61.322.534.260,23	40,21

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasikan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 sebesar Rp104.421.690.738,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp91.465.065.504,27 atau 87,59%. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021 tersebut turun sebesar Rp42.604.710.659,63 atau 31,78% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020 sebesar Rp134.069.776.163,63. Atas realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2021 dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

**Tabel 5.48 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan Per OPD
TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

NO	KODE	OPD	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020	%
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	497.000.000,00	495.001.501,11	99,60	0,00	0,00
2	1.02.02	RSUD Dr. M. YUNUS	112.000.000,00	111.861.000,00	99,88	0,00	0,00
3	1.02.03	RUMAH SAKIT KHUSUS JIWA SOEPRAPTO	900.000.000,00	880.000.000,00	97,78	0,00	0,00
4	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	79.198.940.373,00	72.103.973.401,40	91,04	73.476.969.504,58	(1,87)
5	1.03.01	BINA MARGA	0,00	0,00	0,00	51.402.563.655,24	(100,00)
6	1.05.03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	18.956.250.365,00	14.876.668.319,69	78,48	7.492.333.138,81	98,56
7	3.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.010.000.000,00	1.924.720.000,00	95,76	430.580.070,00	347,01
8	3.03.01	DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	2.747.500.000,00	1.072.841.282,07	39,05	1.267.329.795,00	(15,35)
9	4.04.11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH			104.421.690.738,00	91.465.065.504,27	87,59	134.069.776.163,63	(31,78)

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 sebesar Rp54.499.511.540,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp25.651.029.915,00 atau 47,07%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 tersebut turun sebesar Rp8.024.420.863,14 atau 23,83% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020 sebesar Rp33.675.450.778,14. Atas realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021 dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

**Tabel 5.49 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per OPD
TA 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

NO	KODE	OPD	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020	%
1	1.01.01	DINAS PENDIDIKAN	47.215.041.540,00	18.408.955.915,00	38,99	18.962.318.644,00	(2,92)
2	1.02.01	DINAS KESEHATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0,00	0,00	0,00	8.663.176.512,67	(100,00)
4	1.03.01	CIPTA KARYA	0,00	0,00	0,00	5.884.155.621,47	(100,00)
5	2.10.01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN STATISTIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2.12.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	(100,00)

NO	KODE	OPD	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%	REALISASI 2020	%
7	2.13.01	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	158.800.000,00	(100,00)
8	2.17.01	BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6.670.470.000,00	6.635.693.000,00	99,48	0,00	0,00
9	3.01.01	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	500.000.000,00	495.721.000,00	99,14	0,00	0,00
10	4.01.04	SEKRETARIAT DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	4.01.05	BADAN PENGHUBUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	4.03.07	BIRO UMU, HUMAS DAN PROTOKOL	64.000.000,00	61.050.000,00	95,39	0,00	0,00
14	4.04.11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	50.000.000,00	49.610.000,00	99,22	0,00	0,00
JUMLAH			54.499.511.540,00	25.651.029.915,00	47,07	33.675.450.778,14	(23,83)

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia di akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang berdampak pula pada negara Republik Indonesia dan Provinsi Bengkulu pada khususnya. Pandemi tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat Provinsi Bengkulu namun juga berdampak pada kehidupan sosial dan perekonomian. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasikan Belanja Tidak Terduga yang merupakan hasil *refocusing* anggaran TA 2021 untuk menangani dampak dari pandemi Covid-19 baik dampak kesehatan masyarakat, dampak sosial maupun dampak terhadap perekonomian sebesar Rp12.624.576.166,00 dengan realisasi sebesar Rp5.699.939.753,00 atau sebesar 45,15%, meliputi sebesar Rp3.239.152.792,00 direalisasikan guna penanggulangan dampak pandemi Covid-19 dan sebesar Rp2.460.786.961,00 direalisasikan guna pengembalian sisa dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2019/2020.

Proses pencairan belanja tidak terduga untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 dimulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani dampak pandemi Covid-19 mengajukan draft kebutuhan dana penanganan Covid-19 ke Satuan Tugas (Satgas) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang kemudian memverifikasi draft usulan tersebut dan menyampaikan nota persetujuan pencairan Belanja Tidak Terduga ke Gubernur, selanjutnya nota persetujuan tersebut diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) untuk

dilakukan proses pencairan dana BTT dan kemudian ditrasfer ke rekening BTT masing-masing OPD yang mengelola dana BTT.

Terdapat 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapat tugas untuk menangani dampak pandemi dengan menggunakan dana BTT yaitu : Rumah Sakit Umum Daerah M Yunus, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial. Dengan rincian penggunaan dana BTT adalah sebagai berikut :

Tabel 5.50 Rincian Penggunaan Belanja Tidak Terduga Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Organisasi perangkat Daerah	Uraian	Anggaran	Realisasi
	BPKD	Belanja Tidak Terduga	12.624.576.166,00	5.699.939.753,00
1	RSUD M Yunus	Penanganan Dampak Kesehatan		1.140.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	Penanganan Dampak Kesehatan		1.312.982.792,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanganan Dampak Sosial		586.170.000,00
4	Dinas Sosial	Penanganan Dampak Sosial		200.000.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengembalian sisa dana hibah		2.460.786.961,00

Lebih rinci lagi dapat diuraikan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga per jenis dampak yang ditanggulangi adalah sebagai berikut :

Tabel 5.51 Rincian Penggunaan Belanja Tidak Terduga Menurut jenis Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 yang ditanggulangi per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi
1	Bidang Kesehatan	3.039.152.792,00
	a. Alkes	1.294.000.000,00
	b. Obat-obatan	586.170.000,00
	c. Habis Pakai/Material Kesehatan	0,00
	d. Insentif Tenaga Kesehatan	1.010.066.070,00
	e. Lainnya	148.916.722,00
2	Bidang Sosial	200.000.000,00
	a. Bantuan Tunai	-
	b. Dapur Umum	-
	c. Lainnya	200.000.000,00
3	Bidang Penanganan Dampak Ekonomi	0,00
	a. Bantuan Keuangan	0,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 sebesar Rp5.699.939.753,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2021 tersebut turun sebesar Rp6.815.956.547,00 atau 54,46% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2020 sebesar Rp12.515.896.300,00.

Selain penggunaan anggaran BTT untuk penanganan dampak covid-19, terdapat pula anggaran dalam bentuk kegiatan yang dikelola oleh OPD Dinas Kesehatan, RSUD. Dr. M. Yunus, Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto, Satpol PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Inspektorat, Dinas Komunikasi Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Biro Umum dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.52 Rincian Penggunaan Anggaran Penangan Covid-19 pada OPD per 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

No	Organisasi Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	%
A.	BIDANG KESEHATAN			
1	Dinas Kesehatan	77.695.599.873,00	65.618.493.696,00	84,46
2	RSUD. Dr. M. Yunus	29.397.285.789,00	20.478.120.520,00	69,66
3	Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto	880.486.000,00	666.816.450,00	75,73
4	Satuan Polisi Pamong Praja	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	970.408.000,00	817.422.600,00	84,23
6	Inspektorat	1.178.050.000,00	1.178.050.000,00	100,00
7	Dinas Komunikasi Informatika	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.700.000.000,00	7.116.186.463,00	92,42
9	Biro Umum	200.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH	119.321.829.662,00	97.175.089.729,00	81,44
B.	BIDANG SOSIAL			
1	Dinas Sosial	100.000.000,00	98.980.000,00	98,98
	JUMLAH	100.000.000,00	98.980.000,00	98,98
C.	BIDANG PENANGANAN DAMPAK EKONOMI			
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	867.464.000,00	685.450.720,00	79,02
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.485.000.000,00	702.062.101,00	47,28
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.532.079.800,00	2.495.348.882,00	98,55
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00
	JUMLAH	49.884.543.800,00	48.882.861.703,00	97,99

Tabel 5.53 Rincian Penggunaan Anggaran Menurut Jenis Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 pada OPD per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Bidang Kesehatan	119.321.829.662,00	97.175.089.729,00
	a. Belanja Pegawai	65.302.629.089,00	46.712.313.922,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	18.997.334.191,00	18.305.796.411,00
	c. Belanja Modal	18.450.000.000,00	15.793.439.311,00
	d. Belanja Bantuan Sosial	15.024.866.382,00	14.816.540.085,00
	e. Belanja Lainnya	1.547.000.000,00	1.547.000.000,00
2	Bidang Sosial	-	-
	a. Belanja Pegawai	-	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	-	-
	c. Belanja Modal	-	-
	d. Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	98.980.000,00
	e. Belanja Lainnya	-	-
3	Bidang Penanganan Dampak Ekonomi	-	-

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
	a. Belanja Pegawai	-	-
	b. Belanja Barang dan Jasa	49.884.543.800,00	48.882.861.703,00
	c. Belanja Modal	-	-
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-
	e. Belanja Lainnya	-	-

d. Belanja Transfer

Pemerintah Provinsi Bengkulu Menganggarkan Belanja Transfer berupa Bagi Hasil Pajak Daerah ke Pemerintah Kabupaten/Kota TA 2021 sebesar Rp429.573.344.373,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp429.573.517.378,00 atau 100,00%. Anggaran tersebut direalisasikan untuk pembayaran bagi hasil tahun berjalan dan juga pembayaran kekurangan bagi hasil tahun anggaran periode sebelumnya. Adapun realisasi atas pembayaran bagi hasil tahun berjalan tersebut dilakukan atas dasar Surat Keputusan Gubernur. Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2021 tersebut naik sebesar Rp300.963.729.270,93 atau 234,01% dibandingkan dengan realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2020 sebesar Rp128.609.788.107,07.

5.1.3. Surplus/Defisit

Pemerintah Provinsi Bengkulu menetapkan defisit anggaran TA 2021 sebesar Rp102.462.595.053,00 dengan realisasi defisit sebesar Rp171.526.816.071,93 naik sebesar Rp83.056.857.835,89 atau 93,88% dibanding TA 2020, dimana saat itu terdapat defisit sebesar Rp88.469.958.236,04.

5.1.4. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Penerimaan Pembiayaan TA 2021 sebesar Rp102.542.595.053,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp102.542.595.053,49 atau 100% yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2020 yang terdiri dari Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD dan Kas lainnya yang merupakan saldo kas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penerimaan pembiayaan ini turun sebesar Rp73.469.958.236,04 atau 252,71% dari Penerimaan Pembiayaan TA 2020 sebesar Rp29.072.636.817,45. Rincian penerimaan pembiayaan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.54 Rincian Penerimaan Pembiayaan per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020
1.	Dari Kas Daerah	77.751.750.922,45	7.479.752.415,48
2.	Dari Kas di Bendahara Pengeluaran	138.829.753,00	1.259.525.621,00
3.	Dari Kas di BLUD	1.078.245.672,04	516.414.354,97
4.	Dari Kas Lainnya	3.573.768.706,00	19.816.944.426,00

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020
5	Setara Kas (Deposito)	20.000.000.000,00	0,00
Jumlah		102.542.595.053,49	29.072.636.817,45

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Provinsi Bengkulu menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan TA 2021 sebesar Rp80.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp80.000.000,00 atau 100%. Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan penyertaan modal pada PT. Askrida. Pengeluaran pembiayaan ini turun sebesar Rp14.920.000.000,00 atau 99,47% dari pengeluaran pembiayaan TA. 2020 sebesar Rp15.000.000.000,00.

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan SAL adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir. Uraian laporan perubahan Sal TA 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.55 Laporan Perubahan SAL TA 2021

(dalam Rupiah)

URAIAN	2021	2020
Saldo Anggaran Lebih Awal	102.542.595.053,49	29.072.636.817,45
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	102.542.595.053,49	29.072.636.817,45
Sub Total	0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	273.989.411.125,42	102.542.595.053,49
Sub Total	273.989.411.125,42	102.542.595.053,49
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	273.989.411.125,42	102.542.595.053,49

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2021 sebesar Rp102.542.595.053,49 SAL awal TA 2021 meningkat sebesar Rp73.469.958.236,04 atau 252,71% dibandingkan SAL awal TA 2020 sebesar Rp29.072.636.817,45 Sumber Rincian SAL awal dapat dilihat pada tabel 5.31 tabel tentang rincian penerimaan pembiayaan.

2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan TA 2021 sebesar Rp102.542.595.053,49 sama besar dengan Saldo Anggaran Lebih Awal.

3. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp273.989.411.125,42 SAL awal TA 2021 meningkat sebesar Rp171.446.816.071,93 atau 167,20% dibandingkan SAL akhir TA 2020 sebesar Rp102.542.595.053,49. Rincian SAL akhir sebagai berikut:

Tabel 5.56 Rincian SAL akhir per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian SAL Akhir	TA 2021	TA 2020
1.	Kas di Kas Daerah	233.591.298.528,82	97.751.750.922,45
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	138.829.753,00
3.	Kas di BLUD	39.718.303.542,60	1.078.245.672,04
4.	Kas di Bendahara BOS	679.809.054,00	3.573.768.706,00
Jumlah		273.989.411.125,42	102.542.595.053,49

SILPA berdasarkan OPD disajikan pada *Lampiran 1*.

5.3. Neraca

Neraca Pemerintah Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

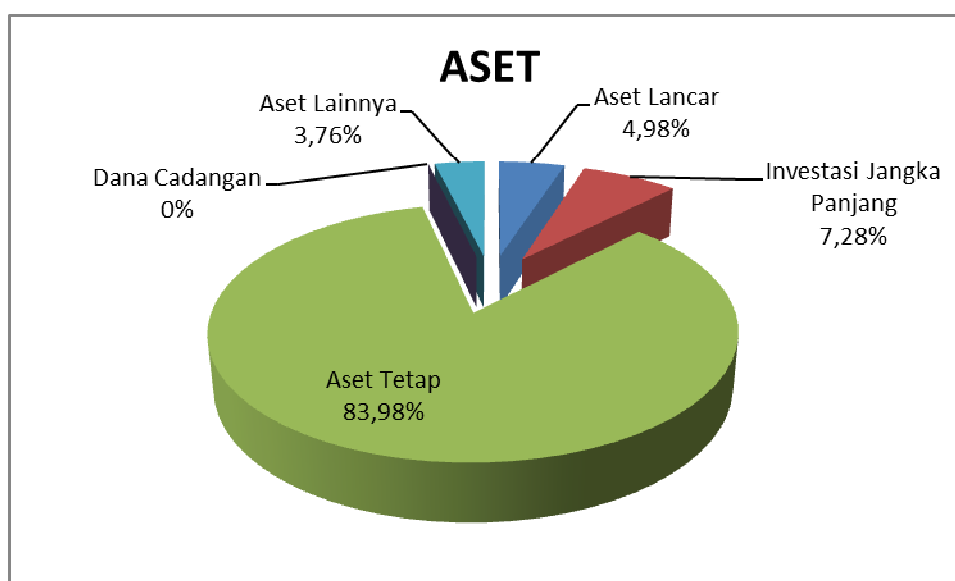
Tabel 5.57 Neraca Pemerintah Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
A	ASET		
1	Aset Lancar	329.270.593.836,87	180.422.901.742,63
2	Investasi Jangka Panjang	481.143.712.825,49	482.180.496.415,80
3	Aset Tetap	5.550.755.589.560,44	5.422.793.106.082,10
4	Dana Cadangan	-	-
5	Aset Lainnya	248.519.206.430,50	159.979.887.749,61
Jumlah Aset		6.609.689.102.653,30	6.245.376.391.990,14
B	KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
1	Kewajiban	352.150.110.791,95	418.341.140.836,06
2	Ekuitas	6.257.538.991.861,35	5.827.035.251.154,08
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		6.609.689.102.653,30	6.245.376.391.990,14

Adapun komposisi Aset per 31 Desember 2021 terlihat pada gambar di bawah sebagai berikut.

Gambar 5.1 Komposisi Aset per 31 Desember 2021

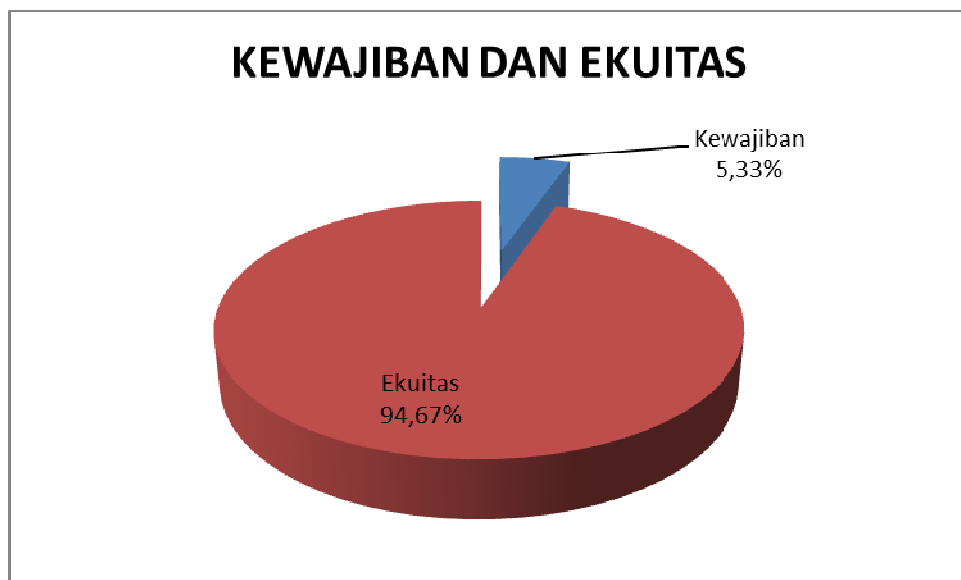


Komposisi Aset Pemerintah Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2021 meliputi :

1. Jumlah Aset Lancar dengan Komposisi terhadap Jumlah Aset TA 2021 sebesar 4,98%, dan terhadap Jumlah Aset Lancar di TA 2020 mengalami peningkatan sebesar 82,50%;
2. Jumlah Investasi Jangka Panjang dengan komposisi terhadap Jumlah Aset TA 2021 sebesar 7,28%, dan terhadap Investasi Jangka Panjang di TA 2020 mengalami penurunan sebesar 0,22%;
3. Jumlah Aset Tetap dengan Komposisi terhadap Jumlah Aset TA 2021 sebesar 83,98%, dan terhadap Jumlah Aset Tetap di TA 2020 mengalami peningkatan sebesar 2,36%; dan
4. Jumlah Aset Lainnya dengan komposisi terhadap Jumlah Aset TA 2021 sebesar 3,76%, dan terhadap Jumlah Aset Lainnya di TA 2020 mengalami peningkatan sebesar 55,34%.

Adapun komposisi Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2021 terlihat pada gambar di bawah sebagai berikut.

Gambar 5.2 Komposisi Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2021



Komposisi Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2021 meliputi :

1. Jumlah Kewajiban dengan Komposisi terhadap Jumlah Kewajiban dan Ekuitas TA 2021 sebesar 5,33%, dan terhadap Jumlah Kewajiban di TA 2020 mengalami penurunan sebesar 15,82%; dan
2. Jumlah Ekuitas dengan Komposisi terhadap Jumlah Kewajiban dan Ekuitas TA 2021 sebesar 94,67%, dan terhadap Jumlah Ekuitas di TA 2020 mengalami peningkatan sebesar 7,39%.

Penjelasan atas pos-pos pada Neraca diuraikan sebagai berikut.

5.3.1. Aset

a. Aset Lancar

Aset Lancar merupakan jenis aset yang dapat digunakan dalam jangka waktu dekat, tidak lebih dari 12 bulan. Saldo Aset Lancar Pemerintah Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp329.270.593.836,87, Aset Lancar Mengalami Peningkatan sebesar Rp148.847.692.094,24 atau 82,50% dari Aset Lancar TA 2020 sebesar Rp180.422.901.742,63. Peningkatan ini terjadi diakibatkan meningkatnya Kas di Kas Daerah sebesar Rp155.839.547.606,37 atau 200,43 % dari TA 2020 dan Kas di BLUD meningkat sebesar Rp38.640.057.870,56 atau 3.583,6% dari TA 2020, sedangkan 6 rekening lainnya pada Aset Lancar mengalami penurunan dengan jumlah total sebesar Rp45.631.913.382,69. Adapun rincian Aset Lancar Per 31 Desember 2021 dan 2020 seperti disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.58 Neraca Pemerintah Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian Aset Lancar	TA 2021	TA 2020
1	Kas di Kas Daerah	233.591.298.528,82	77.751.750.922,45
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	138.829.753,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	39.718.303.542,60	1.078.245.672,04
5	Kas Dana BOS	679.809.054,00	3.573.768.706,00
6	Setara Kas		20.000.000.000,00
7	Piutang Pajak Daerah	603.158.831,00	1.301.512.585,00
8	Piutang Lainnya	34.142.204.242,73	35.521.817.767,73
9	Penyisihan Piutang	(4.137.076.316,23)	(4.247.396.316,23)
10	Beban dibayar di muka	227.116.292,86	234.352.812,33
11	Persediaan	24.445.779.661,09	45.070.019.840,31
Jumlah		329.270.593.836,87	180.422.901.742,63

Selanjutnya dirinci masing-masing jenis Aset Lancar sebagai berikut.

1. Kas

Kas dan setara kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggung jawabkan (UYHD), saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Jumlah Nilai Kas meliputi Nomor 1 sd 6 pada tabel diatas, Jumlah Kas Pemerintah Provinsi Bengkulu Per 31 Desember 2021 sebesar Rp273.989.411.125,42 mengalami peningkatan sebesar Rp171.446.816.071,93 atau 167,20% dari TA 2020 sebesar

Rp102.542.595.053,49. Peningkatan Kas diakibatkan dari selisih peningkatan pendapatan dari TA 2020 sebesar 9,50% dan peningkatan pembiayaan netto dari TA 2020 sebesar 628,10%, sedangkan peningkatan belanja dari TA 2020 sebesar 6,74% yang mengakibatkan penambahan pada SILPA sebesar 167,20% dari Tahun sebelumnya.

Tabel 5.59 Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Kas	TA 2021	TA 2020
1.	Kas di Kas Daerah	233.591.298.528,82	77.751.750.922,45
2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	138.829.753,00
3.	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	39.718.303.542,60	1.078.245.672,04
4.	Kas dana BOS	679.809.054,00	3.573.768.706,00
5.	Setara Kas	0,00	20.000.000.000,00
Jumlah		273.989.411.125,42	102.542.595.053,49

a) Kas di Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp233.591.298.528,82. Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 tersebut meningkat sebesar Rp155.839.547.606,37 atau 200,43% dibandingkan dengan Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 Rp77.751.750.922,45.

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Provinsi Bengkulu yang berada di rekening giro Nomor 001.01.01.00019-8 pada Bank Bengkulu dengan nilai per 31 Desember 2021 sebesar Rp233.591.298.528,82.

Didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengakibatkan perubahan nilai Kas di Kas Daerah, dimana nilai Deposito yang sebelumnya diinput kedalam Kas di Kas Daerah di Tahun Anggaran 2020, sekarang disajikan kedalam rekening setara kas.

Tabel 5.60 Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA. 2021	TA. 2020
1	Saldo Rekening Giro Pada Bank Bengkulu	233.591.298.528,82	77.751.750.922,45
2	Deposito Berjangka (dicatat sebagai Setara Kas)		
	1. Deposito Berjangka Nomor C. 035917		5.000.000.000,00
	2. Deposito Berjangka Nomor C. 035918		5.000.000.000,00
	3. Deposito Berjangka Nomor C. 035919		5.000.000.000,00
	4. Deposito Berjangka Nomor C. 035920		5.000.000.000,00
Jumlah		233.591.298.528,82	97.751.750.922,45

Dari saldo kas per 31 Desember 2021 terdapat kas yang tidak dapat diformulasikan sebagai belanja lain karena merupakan belanja yang berasal dari Dana Transfer yang hanya dapat dianggarkan pada belanja

alokasi khusus peruntukannya serta untuk pembayaran kewajiban Pemerintah, seperti diuraikan berikut ini.

Tabel 5.61 Rincian Dana yang Tidak Dapat Diformulasikan Sebagai Belanja Lain TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Penyaluran	Realisasi	Sisa Dana RKUD	
				TA 2021	TA 2020
1	DAK Bid Pendidikan Reguler	110.908.647.653,00	109.728.947.047,00	1.179.700.606,00	503.439.199,00
2	DAK Bid Pendidikan SMK Penugasan	0,00	0,00	0,00	380.578.350,00
3	DAK Bid Kesehatan Reguler	18.306.067.955,00	18.279.067.951,00	27.000.004,00	518.649.120,00
4	DAK Bid Kesehatan Penugasan	2.328.315.000,00	2.269.685.000,00	58.630.000,00	7.138.900,00
5	DAK Bid Jalan Reguler	9.568.187.000,00	9.484.484.000,00	83.703.000,00	0,00
6	DAK Bid Kelautan & Perikanan Penugasan	5.978.243.267,00	5.875.057.952,00	103.185.315,00	41.418.396,00
7	DAK Bid Pertanian Penugasan	3.709.933.017,00	3.487.083.411,00	222.849.606,00	0,00
8	DAK Bid Jalan Penugasan	19.446.686.634,00	19.446.686.634,00	0,00	0,00
9	DAK Bid Irigasi Penugasan	7.008.351.595,00	6.383.349.276,00	625.002.319,00	0,00
	Jumlah	177.254.432.121,00	174.954.361.271,00	2.300.070.850,00	1.451.223.965,00

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah sebesar Nihil (rincian pada **Lampiran 2**). Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 tersebut turun sebesar Rp138.829.753,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp138.829.753,00.

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang persediaan dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2021, yang belum disetor ke Kas Daerah. Di TA 2021 Bendahara Pengeluaran telah melakukan penyetoran atas sisa dana yang tidak dibelanjakan pada tahun berjalan sebelum tanggal 31 Desember 2021, sehingga saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar nihil.

Tabel 5.62 Rincian Rekening Bank Bendahara OPD TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Nomor Rekening Giro Pengeluaran	Tanggal Setor	Saldo TA 2021	Saldo TA 2020
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	001.01.02.012982	27 Jan 2021	0,00	138.829.753,00
	JUMLAH			0,00	138.829.753,00

c) Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp39.718.303.542,60. Kas di BLUD per 31 Desember 2021 tersebut meningkat sebesar Rp38.640.057.870,56

atau 3.583,60% dibandingkan dengan Kas di BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.078.245.672,04. Berikut ini disajikan Kas di Badan Layanan Umum Daerah untuk TA 2021 dan 2020.

Tabel 5.63 Kas di BLUD per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA. 2021	TA.2020
1	Kas di BLUD RS Khusus Jiwa Soeprapto	2.043.965.329,21	312.931.947,01
2	Kas di BLUD RS Umum Daerah M. Yunus	37.674.338.213,39	765.313.725,03
	Jumlah	39.718.303.542,60	1.078.245.672,04

1) BLUD RSKJ Soeprapto

Saldo Kas di BLUD RSKJ Soeprapto per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.043.965.329,21. Kas di BLUD RSKJ Soeprapto per 31 Desember 2021 merupakan kas yang terdapat didalam rekening giro RSKJ. Kas tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp1.731.033.382,20 atau 553,17% dibandingkan dengan Kas di BLUD RSKJ Soeprapto per 31 Desember 2020 sebesar Rp312.931.947,01.

Kas di BLUD RSKJ merupakan saldo kas yang dikelola oleh BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) Rumah Sakit Khusus Jiwa dan disimpan di rekening giro Nomor 001.01.02.24089-9 pada Bank Bengkulu. Kas tersebut digunakan untuk mengelola pendapatan yang diterima rumah sakit dan membiayai kegiatan operasional RSKJ Soeprapto secara langsung, tanpa harus menyetorkan pendapatan yang diterima ke Kas Daerah terlebih dahulu.

RSKJ Soeprapto statusnya telah ditingkatkan menjadi BLUD per tanggal 6 Januari 2014 sesuai SK Gubernur Nomor T.11.XXXIX Tahun 2014 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) pada RSKJ Soeprapto dengan status BLUD penuh.

2) BLUD RSUD Dr. M Yunus

Saldo Kas di BLUD RSUD Dr. M Yunus per 31 Desember 2021 sebesar Rp37.674.338.213,39. Kas di BLUD RSUD Dr. M Yunus per 31 Desember 2021 tersebut terdiri dari :

- (a) Rekening giro RSUD M Yunus sebesar Rp37.665.514.812,39
- (b) Kas tunai di Bendahara Pengeluaran BLUD sebesar Rp8.823.401,00

Kas tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp36.909.024.488,36 atau 4.822,73% dibandingkan dengan Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp765.313.725,03.

Kas di BLUD merupakan saldo kas yang dikelola oleh BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) RSUD Dr. M. Yunus dan

disimpan di rekening Nomor 001.01.02.02339-2 pada Bank Bengkulu. Kas tersebut digunakan untuk mengelola pendapatan yang diterima rumah sakit dan membiayai kegiatan operasional RSUD Dr. M. Yunus secara langsung, tanpa harus menyetorkan pendapatan yang diterima ke Kas Daerah terlebih dahulu.

RSUD Dr. M. Yunus ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan SK Gubernur Nomor M.320.XXXVIII Tahun 2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) pada RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu dengan status BLUD penuh.

d) Kas Dana BOS

Kas Dana BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp679.809.054,00, Kas Dana BOS per 31 Desember 2021 tersebut turun sebesar Rp2.893.959.652,00 atau 80,98% dibandingkan dengan Kas Dana BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.573.768.706,00.

Penerimaan Dana BOS TA 2021 sebesar Rp124.988.021.000,00 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.64 Penerimaan Belanja Operasional Sekolah TA 2021 dan TA 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Penerimaan TA 2021	Penerimaan TA 2020
1	Saldo Awal TA sebelumnya	3.573.768.706,00	19.816.944.426,00
2	Penyaluran Dana BOS TA 2021		
	a. BOS Reguler	124.278.021.000,00	114.172.970.000,00
	b. BOS Afirmasi	0,00	2.400.000.000,00
	c. BOS Kinerja	710.000.000,00	3.060.000.000,00
	Sub Jml Penyaluran Dana BOS TA 2021	124.988.021.000,00	119.632.970.000,00
3	Penerimaan Bunga Bank	64.556.166,00	197.071.599,00
4	Penerimaan Lainnya	25.026.635,00	6.754.708,00
	JUMLAH	128.651.372.507,00	139.653.740.733,00

Pengeluaran Dana BOS TA 2021 sebesar Rp127.971.563.453,00 dengan rincian pada tabel berikut :

Tabel 5.65 Pengeluaran Belanja Operasional Sekolah TA 2021 dan TA 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Pengeluaran TA 2021	Pengeluaran TA 2020
1	Belanja BOS		
	a. Belanja Pegawai	2.699.046.000,00	2.395.584.614,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	85.034.314.918,00	77.092.983.068,00
	c. Belanja Modal	39.672.030.652,00	56.577.313.679,00
	Sub Jml Pengeluaran BOS TA 2021	127.405.391.570,00	136.065.881.361,00
3	Pengeluaran Administrasi Bank	5.663.325,00	11.161.048,00
4	Pengeluaran Lainnya	560.508.558,00	2.929.618,00
	JUMLAH	127.971.563.453,00	136.079.972.027,00

Kas di Bendahara BOS TA 2021 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.66 Kas di Bendahara Belanja Operasional Sekolah TA 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Kas di Bendahara BOS TA 2021	Kas di Bendahara BOS TA 2020
1	Penerimaan Dana BOS	128.651.372.507,00	139.653.740.733,00
2	Pengeluaran Dana BOS	127.971.563.453,00	136.079.972.027,00
	Kas di Bendahara BOS TA 2020	679.809.054,00	3.573.768.706,00

Kas di Bendahara BOS sebesar Rp679.809.054,00 merupakan sisa dana BOS yang masih ada pada rekening bendahara masing-masing sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

Penyaluran Dana BOS TA 2021 terdapat di 9 Kabupaten dan 1 Kota dilingkungan Provinsi Bengkulu, dengan jumlah 188 sekolah diseluruh kabupaten/kota, dengan rincian pada **Lampiran 4**.

2. Piutang

Piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Dan Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang yang telah diatur didalam kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Jumlah Piutang Pemerintah Provinsi Bengkulu meliputi Nomor 7, 8 dan 9 pada tabel 5.35 Aset Lancar diatas.

Tabel 5.67 Piutang per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020
1.	Piutang Pajak Daerah	603.158.831,00	1.301.512.585,00
2.	Piutang Lainnya	34.142.204.242,73	35.521.817.767,73
3.	Penyisihan Piutang	(4.137.076.316,23)	(4.247.396.316,23)
	Jumlah	30.608.286.757,50	32.575.934.036,50

Jumlah Piutang per 31 Desember 2021 setelah dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp30.608.286.757,50 mengalami penurunan sebesar Rp1.967.647.279,00 atau 6,04% dari TA 2020 sebesar Rp32.575.934.036,50.

a) Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp603.158.831,00. Piutang Pajak Daerah tersebut turun sebesar Rp698.353.754,00 atau 53,66% dibandingkan dengan Piutang

Pajak Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.301.512.585,00. Adapun rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.68 Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020
1.	Piutang PBB-KB	445.206.305,00	1.301.512.585,00
2.	Piutang Pajak Air Permukaan	157.952.526,00	-
3.	Piutang PKB	-	-
4.	Piutang Pajak Rokok	-	-
5.	Piutang Dana Bagi Hasil	-	-
Jumlah		603.158.831,00	1.301.512.585,00

Realisasi Penerimaan terhadap Piutang PBB-KB TA. 2020 di Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp856.306.280,00 atau 65,79%, sedangkan sisanya sebesar Rp445.206.305,00 yang belum diterima berasal dari PT. Kuda Laut sebesar Rp257.329.537 dan PT. Putra Persada Permata Prima Perkasa sebesar Rp187.876.768,00 yang merupakan Sisa Piutang di TA 2020. Piutang PBB-KB mengalami penurunan sebesar Rp856.306.280,00 atau 65,79% dari TA. 2020 sebesar Rp1.301.512.585,00.

Piutang Pajak Air Permukaan di TA 2021 sebesar Rp157.952.526,00, yang berasal dari PLTMH Air Elang Kepala Curup Kab Rejang Lebong sebesar Rp620.000,00, PDAM Tirta Alami Kab Kepahiang sebesar Rp40.419.820,00, PT. Sapta Sentosa Jaya Abadi Kab Mukomuko sebesar Rp102.763.026,00 dan PDAM Tirta Manna Kabu Bengkulu Selatan sebesar Rp14.149.680.

b) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya merupakan piutang Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada pihak-pihak lain. Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp34.142.204.242,73 Piutang Lainnya tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.379.613.525,00 atau 3,88% dibandingkan dengan Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp35.521.817.767,73. Adapun rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.69 Piutang Lainnya Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Piutang Lancar Kemitraan Pihak Ketiga	84.900.000,00	84.900.000,00
2	Bagian Lancar Tagihan TGR Daerah	2.204.597.390,50	2.222.597.390,50
3	Piutang Lain – lain	31.852.706.852,23	33.214.320.377,23
Jumlah		34.142.204.242,73	35.521.817.767,73

Selanjutnya dirinci masing-masing jenis Piutang Lainnya sebagai berikut.

1) Piutang Lancar Kemitraan Pihak Ketiga

Piutang ini merupakan angsuran sewa Nala Cottage milik Pemerintah Provinsi Bengkulu yang dikelola oleh PT Permata Gading Resort. Nilai Piutang Lancar tersebut merupakan nilai sewa yang telah dan/atau akan jatuh tempo pembayarannya satu tahun setelah tanggal pelaporan. Kemitraan ini didasari pada Kesepakatan Perjanjian Sewa Penggunaan Aset Nala Cottage dan Gedung Promosi di Pantai Panjang Nomor 013/1467/B.13 tanggal 16 November 1998. Dan Amandemen Perjanjian Nomor 299/IV/B.11 tanggal 30 Agustus 2000, dengan jangka waktu pemanfaatan aset adalah selama 20 tahun, dari tanggal 1 Desember 1998 sampai dengan 30 November 2018, serta Surat Gubernur Bengkulu Nomor : 032/4148/BPKD.6/2018, Tanggal 31 Oktober 2018 Perihal Kontrak Pengelola Wisma Pantai Nala (Nala Cottage) Bengkulu. Dengan berakhirnya kesepakatan tersebut pemanfaatan aset kepada pihak ketiga berupa tanah dan bangunan Nala Cottage dan Gedung Promosi di Pantai Panjang oleh PT Gading Cempaka Resort telah berakhir, sehingga Aset kembali dicatat kedalam klasifikasi Aset Tetap dan pengelolaannya tidak diperpanjang karena kawasan tersebut akan direnovasi.

Hak Pemerintah Provinsi Bengkulu dikenakan dengan kemitraan tersebut masih tercatat didalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai Piutang kemitraan pihak ketiga per 31 Desember 2021 sebesar Rp.84.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.70 Piutang Lancar Kemitraan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Angsuran Pembayaran Piutang TA 2021	0,00	
2	Angsuran Pembayaran Piutang TA 2020	0,00	0,00
3	Angsuran Pembayaran Piutang TA 2019	(30.000.000,00)	(30.000.000,00)
4	Sewa yang jatuh tempo tahun 2018	59.500.000,00	59.500.000,00
5	Sewa yang jatuh tempo tahun 2017	4.000.000,00	4.000.000,00
6	Sewa yang jatuh tempo tahun 2016	6.000.000,00	6.000.000,00
7	Sewa yang jatuh tempo tahun 2015	2.000.000,00	2.000.000,00
8	Sisa sewa yang jatuh tempo tahun 2014	3.900.000,00	3.900.000,00
9	Sisa sewa yang jatuh tempo tahun 2013	3.000.000,00	3.000.000,00
10	Sisa sewa yang jatuh tempo tahun 2012	3.000.000,00	3.000.000,00
11	Sisasewa yang jatuh tempo tahun 2011	3.000.000,00	3.000.000,00
12	Sisasewa yang jatuh tempo tahun 2010	10.600.000,00	10.600.000,00
13	Sisasewa yang jatuh tempo tahun 2009	3.000.000,00	3.000.000,00
14	Sisasewa yang jatuh tempo tahun 2008	10.000.000,00	10.000.000,00
15	Sisasewa yang jatuh tempo tahun 2007	6.900.000,00	6.900.000,00
Jumlah		84.900.000,00	84.900.000,00

Saldo piutang lancar TA 2021 tidak mengalami perubahan dari TA 2019.

2) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Daerah

Bagian Lancar Tagihan TGR Daerah merupakan Tagihan TGR Daerah yang jatuh tempo satu tahun setelah tanggal neraca. Tagihan TGR Daerah tersebut diakui berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) Nomor 003.A/SET/TP-TGR/SKTJM/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 dan Keputusan Gubernur Nomor H.225.VIII Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Pembebanan Kerugian Daerah kepada Sdr. NA sebesar Rp1.383.796.552,50 dan kepada Sdri. YA sebesar Rp998.590.538,50.

Saldo Bagian Lancar Tagihan TGR Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.204.597.390,50 Bagian Lancar Tagihan TGR Daerah per 31 Desember 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp18.000.000,00 atau 0,81% dibandingkan dengan Bagian Lancar Tagihan TGR Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.222.597.390,50.

Adapun rincian Bagian Lancar Tagihan TGR Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 5.71 Bagian Lancar Tagihan TGR Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No	Nama Pegawai yang Dikenakan TGR Daerah	Bagian Lancar Tagihan TGR Daerah Per 31 Desember 2020	Penerimaan Angsuran TA 2021	Bagian Lancar Tagihan TGR Daerah Per 31 Desember 2021
1.	Sdr. NA	1.284.626.552,00	18.000.000,00	1.284.626.552,00
2.	Sdri. YA	937.970.838,50	-	937.970.838,50
Jumlah		2.222.597.390,50	18.000.000,00	2.204.597.390,50

3) Piutang Lain – lain

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp.25.056.122.192,23 mengalami penurunan sebesar Rp8.158.198.185,00 atau 24,56% dari TA. 2020 sebesar Rp.33.214.320.377,23. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan terhadap Piutang Lain-lain TA. 2020 sebesar Rp26.310.611.808,00 atau sebesar 79,21% dari total piutang lain-lain. sedangkan sebesar Rp6.903.708.569,23 sampai dengan 31 Desember 2021 belum diterima, sehingga terakumulasi kembali sebagai piutang di TA. 2021. Penambahan Piutang lain-lain di TA. 2021 sebesar Rp18.152.413.623,00, sehingga jumlah Piutang Lain-lain TA. 2021 menjadi sebesar Rp.25.056.122.192,23.

Adapun Rincian Piutang Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.72 Piutang Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020*(dalam Rupiah)*

No	Uraian Piutang Lain-lain	TA 2021	TA 2020
1	Piutang pada DPRD atas BPO dan TKI	3.331.470.000,00	3.331.470.000,00
2	Piutang Kredit Bantuan ke Nelayan	306.800.000,00	306.800.000,00
3	Piutang pada PD Bimex	200.000.000,00	200.000.000,00
4	Piutang pada Kemenkeu RI	3.870.291,23	3.870.291,23
5	Piutang RSUD Dr. M. Yunus	26.188.738.636,00	27.323.668.614,00
6	Piutang RSKJ Soeprapto	1.446.491.900,00	1.542.775.447,00
7	Piutang Pengelolaan Aset Daerah	134.000.000,00	134.000.000,00
8	Piutang Tagihan Penjualan Ansuran Penjualan Kendaraan	241.336.025,00	371.736.025,00
Jumlah		31.852.706.852,23	33.214.320.377,23

Berikut ini dijelaskan uraian masing-masing jenis Piutang Lain – lain.

(a) Piutang pada DPRD atas BPO dan TKI

Piutang kepada DPRD Provinsi Bengkulu muncul sesuai surat permohonan pembayaran BPO dan TKI dari Ketua DPRD/Sekretaris DPRD Nomor 900/1546/DPRD-1/2006 tanggal 13 Desember 2006, sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 yang diantaranya mengatur tentang pemberian dana rapel TKI untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dan direalisasikan pemberian pinjaman sebesar Rp5.180.400.000,00 pada tanggal 19 Desember 2006.

Pada TA 2008, DPRD menganggarkan dan merealisasikan BPO dan TKI untuk tahun 2007 sebesar Rp5.180.400.000,00 tetapi harus dikembalikan lagi ke Kas Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, atas pemberian BPO dan TKI Tahun 2007 wajib dikembalikan dan disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya sampai dengan masa jabatan DPRD berakhir. Sehingga sejak TA 2007 Pimpinan dan Anggota DPRD terhutang kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dengan demikian, terdapat piutang Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu sebesar Rp5.180.400.000,00.

Di TA 2021 Tidak terdapat realisasi pembayaran piutang tersebut sehingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Piutang DPRD atas BPO dan TKI sebesar Rp3.331.470.000,00.

Tabel 5.73 Piutang DPRD atas BPO dan TKI per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Tahun	Uraian	Pembayaran	Saldo Piutang
1	2007	Jumlah Piutang BPO dan TKI	-	5.180.400.000,00
2	2007	Angsuran BPO dan TKI	66.960.000,00	5.113.440.000,00
3	2007	Angsuran BPO dan TKI	643.950.000,00	4.469.490.000,00
4	2008	Tidak ada pembayaran	-	4.469.490.000,00
5	2009	Angsuran BPO dan TKI	386.000.000,00	4.083.490.000,00
6	2010	Angsuran BPO dan TKI	189.600.000,00	3.893.890.000,00
7	2010	Koreksi penambahan pembayaran 2010	7.000.000,00	3.886.890.000,00
8	2011	Angsuran BPO dan TKI	36.500.000,00	3.850.390.000,00
9	2012	Angsuran BPO dan TKI	13.000.000,00	3.837.390.000,00
10	2013	Angsuran BPO dan TKI	57.800.000,00	3.779.590.000,00
11	2014	Angsuran BPO dan TKI	298.520.000,00	3.481.070.000,00
12	2015	Angsuran BPO dan TKI	92.800.000,00	3.388.270.000,00
13	2016	Angsuran BPO dan TKI	0,00	3.388.270.000,00
14	2017	Angsuran BPO dan TKI	40.000.000,00	3.348.270.000,00
15	2018	Angsuran BPO dan TKI	16.800.000,00	3.331.470.000,00
16	2019	Angsuran BPO dan TKI	0,00	3.331.470.000,00
17	2020	Angsuran BPO dan TKI	0,00	3.331.470.000,00
18	2021	Angsuran BPO dan TKI	0,00	3.331.470.000,00

(b) Piutang Kredit Bantuan ke Nelayan

Pada TA 2008, Dinas Kelautan dan Perikanan telah merealisasikan belanja peralatan dan perlengkapan yang akan diserahkan ke masyarakat nelayan di wilayah Provinsi Bengkulu. Sesuai dengan SK Gubernur Nomor 330 Tahun 2001 tentang pengembalian kredit bantuan sarana dan prasarana perikanan dari petani nelayan serta pemanfaatan aset pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, maka bagi nelayan yang menerima paket bantuan tersebut diwajibkan mengembalikan kredit bantuan dan menjadi piutang Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp312.800.000,00.

Pada tahun 2009, terdapat penerimaan dari setoran uang muka kredit bantuan ke nelayan sebesar Rp6.000.000,00 sehingga total Piutang Kredit Bantuan ke Nelayan berkurang menjadi Rp306.800.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2020, nelayan yang menerima paket bantuan tidak melakukan setoran angsuran berikutnya sehingga Piutang Kredit Bantuan Nelayan tetap sebesar Rp306.800.000,00. Rincian Piutang Kredit Bantuan ke Nelayan dimuat di *Lampiran 5*.

(c) Piutang pada PD Bimex

Piutang berasal dari bantuan pinjaman modal dari Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada PD Bimex sebesar

Rp250.000.000,00 sesuai dengan SK Gubernur Tahun 2001 tanggal 24 Maret 2001 tentang Penggunaan Dana Proyek Pembangunan melalui Instruksi Gubernur Bengkulu. Pada tahun 2020, PD Bimex tidak melakukan pembayaran angsuran piutang, sehingga total Piutang PD Bimex per 31 Desember 2020 tetap sebesar Rp200.000.000,00.

(d) Piutang pada Kementerian Keuangan RI

Piutang sebesar Rp3.870.291,23 berasal dari selisih lebih pembayaran pajak tahun 2002 Pemprov Bengkulu kepada Kementerian Keuangan RI.

(e) Piutang RSUD Dr. M. Yunus

Realisasi Penerimaan terhadap Piutang RSUD TA 2020 sebesar Rp25.144.064.361,00 atau sebesar 92,02%, dari jumlah piutang RSUD TA 2020, sedangkan sebesar Rp2.179.604.253,00 sampai dengan 31 Desember 2021 belum diterima, sehingga terakumulasi kembali sebagai piutang di TA 2021. Penambahan piutang di TA 2021 sebesar Rp24.009.134.383,00, sehingga jumlah piutang RSUD M Yunus per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.188.738.636,00. Piutang RSUD Dr. M. Yunus per 31 Desember 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.134.929.978,00 atau 4,15% dari Piutang TA 2020 sebesar Rp27.323.668.614,00.

Tabel 5.74 Piutang RSUD Dr. M. Yunus per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	25.138.602.260,00	23.879.017.466,00
2	BPJS Klaim Pasien Covid 19	651.070.600,00	3.067.179.416,00
3	IKS Perusahaan / Instansi	82.702.000,00	85.204.077,00
4	Piutang lainnya	316.363.776,00	292.267.655,00
JUMLAH		26.188.738.636,00	27.323.668.614,00

(f) Piutang RSKJ Soeprapto

Realisasi Penerimaan terhadap Piutang RSKJ TA 2020 di TA 2021 sebesar Rp1.036.147.447,00 atau sebesar 67,16%. Penambahan piutang di TA 2021 sebesar Rp939.863.900,00, sehingga jumlah piutang RSKJ Soeprapto sebesar Rp1.446.491.900,00. Piutang RSKJ Soeprapto per 31 Desember 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp96.283.547,00 atau 6,24% dari Piutang TA 2020 sebesar Rp1.542.775.447,00.

Rincian Piutang RSKJ Soeprapto per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.75 Piutang pada RSKJ Soeprapto per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	BPJS	939.863.900,00	964.832.447,00
2	IPWL	0,00	71.315.000,00
3	Pemeriksaan kesehatan pasien trlntr	506.628.000,00	506.628.000,00
JUMLAH		1.446.491.900,00	1.542.775.447,00

(g) Piutang Pengelolaan Aset Daerah

Piutang Pengelolaan Aset Daerah merupakan piutang pengelolaan aset daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah dan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam bentuk tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk usaha oleh Pihak Ketiga. Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp134.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari TA 2019. Rincian Piutang Pengelolaan Aset Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.76 Piutang Pengelolaan Aset Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Piutang	TA 2021	TA 2020
1.	Penyewaan wisma atlet	110.000.000,00	110.000.000,00
2.	Penyewaankolam renang	21.500.000,00	21.500.000,00
3.	Penyewaanlahan parker kawasan <i>Sport Center</i> Pantai Panjang	2.500.000,00	2.500.000,00
Jumlah		134.000.000,00	134.000.000,00

Pengelolaan Aset Daerah untuk wisma atlet, lahan parkir kawasan *Sport Center*, serta kolam renang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu.

(h) Tagihan Angsuran Penjualan

Saldo Tagihan Angsuran penjualan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.241.336.025,00 mengalami penurunan sebesar Rp130.400.000,00 atau 35,08% dari TA. 2020 sebesar Rp371.736.025,00. Tagihan Angsuran penjualan merupakan tagihan atas penjualan eks kendaraan dinas yang telah dilelang dan pembayaran dilakukan dengan angsuran dengan masa angsuran berdasarkan SK penjualan adalah selama satu tahun. Berikut ini diuraikan Saldo Tagihan Penjualan Kendaraan Dinas.

Tabel 5.77 Saldo Tagihan Penjualan Kendaraan Dinas TA. 2021

(dalam Rupiah)

No	Nama Pembeli	Nomor SK Penjualan	HargaJual	Saldo Piutang Per 31 Des 2020	PembayaranTA 2021	Saldo Piutang Per 30 Des 2021
1	H. Tabrani Undu	291 Tahun 2004	30.000.000	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2	Drs.Asmawi Hamzah	291 Tahun 2004	12.000.000	12.000.000,00	-	12.000.000,00
3	Ir. SahirhanTamid	291 Tahun 2004	18.400.000	18.400.000,00	-	18.400.000,00
4	M. Soleh	291 Tahun 2004	14.000.000	14.000.000,00	-	14.000.000,00
5	Drs.Hilman Fuadi	291 Tahun 2004	14.000.000	14.000.000,00	-	14.000.000,00
6	Drs.A.Halim Zulkipli	291 Tahun 2004	15.000.000	15.000.000,00	-	15.000.000,00

No	Nama Pembeli	Nomor SK Penjualan	HargaJual	Saldo Piutang Per 31 Des 2020	PembayaranTA 2021	Saldo Piutang Per 30 Des 2021
7	Yusirwan Wani	291 Tahun 2004	20.000.000	20.000.000,00	-	20.000.000,00
8	Drs. M. Ali Toha	291 Tahun 2004	14.000.000	14.000.000,00	-	14.000.000,00
9	Dr. H. April yani	291 Tahun 2004	9.000.000	9.000.000,00	-	9.000.000,00
10	Bambang Suseno	291 Tahun 2004	25.000.000	25.000.000,00	-	25.000.000,00
11	Drs.Firmansyah	291 Tahun 2004	12.000.000	12.000.000,00	-	12.000.000,00
12	Dr.Suhardi. M. Nur	291 Tahun 2004	32.500.000	32.500.000,00	-	32.500.000,00
13	Drs.Herwan	291 Tahun 2004	9.000.000	9.000.000,00	-	9.000.000,00
14	Zul Iskandar. BA	291 Tahun 2004	8.000.000	8.000.000,00	-	8.000.000,00
15	Indra Junaidi	291 Tahun 2004	1.800.000	1.800.000,00	-	1.800.000,00
16	Ruslan Efendi	291 Tahun 2004	2.000.000	2.000.000,00	-	2.000.000,00
17	Supirman	291 Tahun 2004	1.800.000	1.500.000,00	-	1.500.000,00
18	Dedi Mulyadi	291 Tahun 2004	1.800.000	1.800.000,00	-	1.800.000,00
19	Hasrah Abdulah	291 Tahun 2004	1.800.000	1.800.000,00	-	1.800.000,00
20	Ir. MB. Pangaribuan	291 Tahun 2004	1.800.000	1.800.000,00	-	1.800.000,00
21	Ngadina	291 Tahun 2004	1.800.000	1.800.000,00	-	1.800.000,00
22	Tasril Dung	291 Tahun 2004	2.000.000	2.000.000,00	-	2.000.000,00
23	Anwar Salal	291 Tahun 2004	2.000.000	2.000.000,00	-	2.000.000,00
24	A. Djalal Bachtiar	106 Tahun 2006	5.904.864	5.904.864,00	-	5.904.864,00
25	Ir. Syarif Hidayat	106 Tahun 2006	7.953.144	7.953.144,00	-	7.953.144,00
26	Ir. Muchlis Ibrahim	106 Tahun 2006	7.870.728	7.870.728,00	-	7.870.728,00
27	Ponidi	106 Tahun 2006	625.680	207.289,00	-	207.289,00
28	H. Agusrin M. Najam	1.204.IX Ta 2011	100.400.000	100.400.000,00	100.400.000,00	0,00
JUMLAH				371.736.025,00	130.400.000,00	241.336.025,00

c) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan atas Piutang Lain-lain pada Piutang Lainnya yang diestimasikan tidak tertagih. Dari jumlah Piutang Lainnya sebesar Rp34.059.502.242,73 dilakukan penyisihan piutang sebesar Rp4.247.396.316,23 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.78 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang (Rp)	Tarif Penyisihan (%)	Nilai (Rp)
1.	0 - 2 tahun	-	0	-
2.	> 2 - 3 tahun	-	5	-
3.	> 3 - 4 tahun	-	10	-
4.	> 4 - 5 tahun	-	20	-
5.	> 5 - 6 tahun	-	30	-
6.	> 6 - 7 tahun	134.000.000,00	40	53.600.000,00
7.	> 7 - 8 tahun	-	60	-
8.	> 8 - 10 tahun	0,00	80	0,00
9.	> 10 tahun	4.083.476.316,23	100	4.083.476.316,23
Jumlah		4.217.476.316,23		4.137.076.316,23

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dapat dilihat di *Lampiran 6*.

Sedangkan atas nilai Piutang sebesar Rp23.128.143.266,50 tidak dilakukan penyisihan karena masuk dalam kategori lancar.

3. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka merupakan beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi. Beban dibayar

dimuka per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.227.116.292,86 mengalami penurunan sebesar Rp7.236.519,47 atau 3,09% dari TA. 2020 sebesar Rp234.352.812,33. Beban dibayar dimuka meliputi pembayaran sewa ruko untuk samsat corner di Bencolen Mall yang jatuh tempo pembayaran berikutnya pada bulan Maret 2022, sewa kantor samsat UPP Bengkulu Tengah yang jatuh tempo pembayaran berikutnya pada bulan April 2022, serta pembayaran asuransi Barang Milik Daerah atas kendaraan di Badan Penghubung yang jatuh tempo pembayaran berikutnya pada bulan Oktober 2022 sedangkan untuk asuransi Barang Milik Daerah atas kendaraan di Sekretariat DPRD yang jatuh tempo pembayaran berikutnya pada bulan Agustus 2022. Perhitungan beban dibayar dimuka dengan menggunakan jumlah hari.

Tabel 5.79 Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	No. Kontrak	Uraian	Jangka Waktu	Harga Sewa	TA 2021	TA 2020
1.	027/1846/BPKD.I/2021, Tanggal 29 Maret 2021	Sewa Ruko di BIM 2 unit utk SAMSAT Corner	01/04/2021 sd 31/03/2022	229.500.000,00	56.589.041,10	56.589.041,10
2.	027/3640/BPKD.I/2021, Tanggal 30 April 2021	Sewa Kantor Samsat UPPP di Bengkulu Tengah	01/05/2021 sd 30/04/2022	60.000.000,00	19.726.027,40	19.726.027,40
3.	1913113022121000613, 614, 615, dan 616 Tanggal 06 Oktober 2021	Asuransi terhadap Barang Milik Daerah di Badan Penghubung	24/10/2021 sd 23/10/2022	29.166.000,00	23.732.334,25	26.925.694,52
4.	644.d/cabdin-3/V/2020 tgl 20 Mei 2020	Sewa Gedung Cabdin Diknas Will III Manna BS	01/09/2020 sd 31/08/2020	17.000.000,00	0,00	11.317.808,22
5.	1040022121080003, Tanggal 24 Agustus 2021	Asuransi terhadap Barang Milik Daerah di Sekretariat DPRD	24/08/2021 sd 23/08/2022	196.821.600,00	127.068.890,11	119.794.241,10
	JUMLAH				227.116.292,86	234.352.812,34

4. Persediaan

Persediaan adalah barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp24.445.779.661,09. Persediaan per 31 Desember 2021 tersebut turun sebesar Rp20.624.240.179,22 atau 45,76% dari Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp45.070.019.840,31. Adapun rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.80 Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	ATK	212.467.879,31	270.217.706,05
2	Bahan Baku Bangunan	0,00	0,00
3	Barang Logistik dan Pecah Belah	0,00	8.864.515,00
4	Peralatan Olahraga	0,00	0,00
5	Alat Listrik	17.088.200,00	0,00
6	Alat Kantor	2.628.499.150,00	1.097.000,00
7	Alat Kebersihan	54.728.050,00	89.830.432,00
8	Voucher BBM	0,00	1.000.000,00
9	Barang Cetak	1.091.532.219,00	1.436.923.158,60
10	Framasi/Obat	19.788.813.221,18	40.006.182.760,34
11	Bahan Gizi	50.670.424,00	29.895.601,00
12	Ternak	28.336.000,00	432.300.000,00
13	Bibit Tanaman / ternak	0,00	15.111.050,00
14	Beras	573.644.517,60	481.961.192,88
15	Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	0,00	2.296.636.424,44
Jumlah		24.233.311.781,78	44.790.937.619,26

Rincian Persediaan pada masing-masing OPD per 31 Desember 2021 dimuat pada *Lampiran 7*.

Berikut adalah penjelasan persediaan per 31 Desember 2021:

- Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp212.467.879,31 merupakan persediaan barang ATK pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) sebesar Rp106.304.016,31, RSUD M Yunus sebesar Rp82.931.200,00, pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp7.478.833,00, dan sisanya sebesar Rp15.753.830,00 berada di 7 OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Persediaan Alat listrik sebesar Rp17.088.200,00 merupakan persediaan pada RSUD M Yunus sebesar Rp16.215.900,00 dan pada Badan Penghubung sebesar Rp872.300,00;
- Persediaan Alat kantor sebesar Rp2.628.499.150,00 merupakan persediaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2.627.000.000,00 dan pada Badan Penghubung sebesar Rp1.499.150;
- Persediaan Alat Kebersihan sebesar Rp54.728.050,00 merupakan persediaan pada RSUD M Yunus sebesar Rp30.168.000,00, Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp18.603.400,00, Pada RSKJ Soeprapto sebesar Rp5.580.150,00 dan pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp376.500,00;
- Persediaan Barang Cetak sebesar Rp1.091.532.219,00 merupakan persediaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp940.669.019,00, pada Dinas Pariwisata sebesar Rp128.893.200,00, pada RSUD M Yunus sebesar Rp20.175.000,00, dan sisanya sebesar Rp1.795.000,00 berada di 2 OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu;
- Persediaan farmasi/obat sebesar Rp19.788.813.221,18 merupakan persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp12.046.919.978,00, pada RSUD M. Yunus sebesar Rp6.978.725.061,18, pada RSKJ Soeprapto sebesar Rp757.798.182,00, dan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp5.370.000,00;

- g) Persediaan Bahan Gizi Makanan sebesar Rp50.670.424,00 merupakan persediaan pada RSUD M. Yunus;
- h) Persediaan Ternak sebesar Rp28.336.000,00 merupakan persediaan pada RSKJ Soeprapto sebesar Rp28.336.000,00;
- i) Persediaan Beras sebesar Rp573.644.517,60 terdapat pada Dinas Ketahanan Pangan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp481.143.712.825,49, mengalami penurunan sebesar Rp1.036.783.590,31 atau 0,22% dari TA 2020 sebesar Rp482.180.496.415,80, Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non permanen

Investasi Jangka Panjang Non permanen adalah Investasi Dana Bergulir merupakan pinjaman modal kerja dalam bentuk dana bergulir kepada koperasi dan kelompok sentra penerima modal kerja sesuai dengan SK Gubernur Bengkulu Nomor 124.XXX.VII Tahun 2007 tanggal 26 November 2007. Penerima dana bergulir sebanyak sepuluh koperasi, empat kelompok sentra dan satu pusat koperasi unit desa yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Provinsi Bengkulu.

Saldo Investasi Nonpermanen Lainnya berupa dana bergulir per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.000.000.000,00 dimana tidak terdapat penambahan dana bergulir. Pengembalian dana bergulir tidak ke Kas Daerah, tetapi ke rekening giro masing-masing koperasi, kelompok sentra, dan pusat koperasi unit desa. Sampai dengan 31 Desember 2016 seluruh dana bergulir tersebut telah jatuh tempo. Pada Tahun 2018 terdapat pengembalian dari penerima dana bergulir ke Rekening Kas Daerah sehingga Total dana Bergulir yang masih dikelola oleh penerima Dana Bergulir Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp642.509.386,00. Pada TA 2021 ditemukan bukti angsuran pembayaran baru sebesar Rp3.000.000,00, dan telah diregistrasi oleh Bank Bengkulu pada tanggal 03 Maret 2020, sehingga Total dana Bergulir yang masih dikelola oleh penerima Dana Bergulir Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp639.509.386,00.

Didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana rekening penyisihan dana bergulir tidak ada, dan memperhatikan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2020 dimana Sisa dana bergulir yang masih dikelola oleh penerima dana bergulir telah dilakukan penyisihan

sebesar 100%, untuk itu penyajian dana bergulir di TA 2021 menjadi Nihil.

Adapun rincian penerima dan nilai dana bergulir per 31 Desember 2021 dimuat pada **Lampiran 8**.

2) Penyisihan Dana Bergulir

Penyisihan Dana Bergulir dilakukan atas Investasi Dana bergulir yang diestimasikan tidak tertagih. Dari jumlah sisa dana bergulir yang belum dikembalikan TA 2021 sebesar Rp639.509.386,00 dilakukan penyisihan Dana Bergulir sebesar Rp639.509.386,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.81 Penyisihan Investasi Dana Bergulir Per 31 Desember 2021
(dalam Rupiah)

No.	UmurPiutang	Nilai Piutang (Rp)	Tarif Penyisihan (%)	Nilai (Rp)
1.	0 - 2 tahun	-	0	-
2.	> 2 - 3 tahun	-	5	-
3.	> 3 - 4 tahun	-	10	-
4.	> 4 - 5 tahun	-	20	-
5.	> 5 - 6 tahun	-	30	-
6.	> 6 - 7 tahun	-	40	-
7.	> 7 - 8 tahun	-	60	-
8.	> 8 - 10 tahun	-	80	-
9.	> 10 tahun	639.509.386,00	100	639.509.386,00
Jumlah		639.509.386,00		639.509.386,00

Rincian Penyisihan Investasi Dana Bergulir dapat dilihat di **Lampiran 9**

3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan posisi investasi berupa penyertaan modal dalam Badan Usaha Milik Daerah atau perusahaan umum lainnya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu pada tanggal tertentu. Penyertaan modal bersifat permanen dimaksudkan untuk tujuan jangka panjang guna memperoleh manfaat ekonomis dari pendapatan dividen. Penilaian investasi tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas.

Penilaian investasi dengan menggunakan metode ekuitas merupakan investasi pemerintah daerah yang dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, sehingga mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2021 dan 2020 yang didasari pada metode ekuitas dan metode biaya sebagai berikut.

Tabel 5.82 Nilai Penyertaan Modal per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No.	Nama BUMD / Perusahaan Umum	% Kepemi-likan	Nilai Penyertaan Modal		Keterangan
			TA 2021	TA 2020	
A.	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan Metode Ekuitas				
1.	PT Bank Bengkulu	42,97	466.084.363.712,31	467.083.774.274,98	LK TA 2021 Audited
2.	PT Bengkulu Mandiri	100	9.317.221.607,00	9.317.221.607,00	LK TA 2018 Unaudited
3.	PT Sarana Mandiri Mukti	29,42	5.412.127.506,18	5.074.260.187,39	LK TA 2021 Unaudited
4.	PD Bimex	100	0,00	455.240.346,43	LK TA 2021 Unaudited
5.	PT Samudra Bengkulu Mandiri	100	-	-	
	Jumlah		480.813.712.825,49	481.930.496.415,80	
A.	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bengkulu berdasarkan Metode Biaya				
1.	PT Asuransi Bangun Askrida	0,08	330.000.000,00	250.000.000,00	
	Jumlah		330.000.000,00	250.000.000,00	
	JUMLAH TOTAL		481.143.712.825,49	482.180.496.415,80	

Nilai penyertaan modal PT Bank Bengkulu, PT Bengkulu Mandiri, PT Sarana Mandiri Mukti, PD Bimex, dan PT Samudra Bengkulu Mandiri dicatat menggunakan metode ekuitas (equity method). Metode ekuitas digunakan apabila pemerintah daerah mempunyai kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% namun memiliki pengaruh yang signifikan.

Berikut ini disajikan nilai penyertaan modal yang seharusnya dan yang telah disertakan secara cash sampai dengan TA 2021 berdasarkan perda pada masing-masing Badan Usaha.

Tabel 5.83 Nilai Penyertaan Modal Berdasarkan SK Kepala Daerah dan Perda
(dalam Rupiah)

No	NAMA BADAN USAHA	DASAR HUKUM PENYERTAAN	JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH	PENYERTAAN MODAL TA 2021	PENYERTAAN MODAL S.D TA 2021	JUMLAH SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN
1	2	3	4	5	6	7=4-6
1.	PT. BANK BENGKULU	Kep. Gubernur Bengkulu No. F.140.XXXV 2007 PerdaProvinsi Bengkulu No 10 Tahun 2017	200.000.000.000,00	0,00	145.368.000.000,00	54.632.000.000,00

No	NAMA BADAN USAHA	DASAR HUKUM PENYERTAAN	JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH	PENYERTAAN MODAL TA 2021	PENYERTAAN MODAL S.D TA 2021	JUMLAH SISA MODAL YANG BELUM DISERTAKAN
2.	PT. BENGKULU MANDIRI	PerdaProvinsi Bengkulu No. 16 Tahun 2002	28.300.000.000,00	0,00	28.300.000.000,00	-
3.	PT. SARANA MANDIRI MUKTI	PerdaProvinsi Bengkulu No. 4 Tahun 1997	4.500.000.000,00	0,00	4.500.000.000,00	-
4.	PD. BIMEX	PerdaProvinsi Bengkulu No. 6 Tahun 1986	450.000.000,00	0,00	450.000.000,00	-
5.	PT. SAMUDERA BENGKULU MANDIRI	AktaNotaris No. 16 Tanggal 12 Juni 2002	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	-
6.	PT. ASKRIDA	AktaNotaris No. 131 Tanggal 12 Mei 1997	330.000.000,00	80.000.000,00	330.000.000,00	-
Jumlah			233.730.000.000,00	80.000.000,00	179.098.000.000,00	54.632.000.000,00

Penyertaan Modal pada PT Askrida dicatat menggunakan metode biaya (*cost method*) dimana investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Berikut adalah penjelasan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dengan metode ekuitas per 31 Desember 2021:

- 1) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bengkulu pada PT Bank Bengkulu per 31 Desember 2021 sebesar Rp466.084.363.712,31 menurun sebesar Rp999.410.562,67 atau 0,21% dibanding per 31 Desember 2020 sebesar Rp467.083.774.274,98. Hal ini disebabkan karena Perhitungan yang dilakukan didasari pada Total Ekuitas PT Bank Bengkulu TA 2021 Audited sebesar Rp1.123.535.000.000,00 dikalikan dengan komposisi kepemilikan modal dan dikurangi dengan penerimaan deviden atas RUPS Laporan Keuangan Bank Bengkulu TA 2020 sebesar Rp16.661.724.776,04 di TA 2021, sedangkan perhitungan di TA 2020 tidak dilakukan pengurangan terhadap deviden yang diterima atas RUPS Laporan Keuangan Bank Bengkulu TA 2019 sebesar Rp14.110.759.619,56 di TA 2020.

Ekuitas PT. Bank Bengkulu yang didasari pada Laporan Keuangan Audited TA 2021 disajikan pada pos Neraca dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.84.a Ekuitas PT. Bank Bengkulu yang didasari pada
Laporan Keuangan Audited TA 2021 dan TA 2020**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Modal disetor	338.327.000.000,00	338.327.000.000,00
2	Tambahan Modal disetor	140.064.000.000,00	100.724.000.000,00
3	Agio Saham	0,00	37.551.000.000,00
4	Penghasilan komprehensif lain	(31.540.000.000,00)	(31.712.117.941,00)
5	Cadangan	207.177.000.000,00	183.576.396.719,00
6	Laba/Rugi	469.507.000.000,00	458.616.518.668,00
	Jumlah Ekuitas	1.123.535.000.000,00	1.087.082.797.446,00

Penilaian investasi didasari pada Laporan Keuangan *Audited* PT Bank Bengkulu per 31 Desember 2021.

- 2) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bengkulu pada PT Bengkulu Mandiri per 31 Desember 2021 sebesar Rp9.317.221.607,00 sama dengan TA 2020, hal ini disebabkan perhitungan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menggunakan data tahun sebelumnya. Laporan Keuangan PT Bengkulu Mandiri per 31 Desember 2021 sampai dengan Akhir Bulan April 2022 belum juga menyampaikan laporan keuangan ke Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- 3) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bengkulu pada PT Sarana Mandiri Mukti per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.412.127.506,18 meningkat sebesar Rp337.867.319,79 atau 6,66% dibanding per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.074.260.187,39. Hal ini disebabkan karena Perhitungan yang dilakukan didasari pada Total Ekuitas PT Sarana Mandiri Mukti TA 2021 Unaudited sebesar Rp19.844.189.348,00 dikalikan dengan komposisi kepemilikan modal dan dikurangi dengan penerimaan deviden sebesar Rp426.033.000,00 di TA 2021. Peningkatan terjadi karena meningkatnya Jumlah Ekuitas PT. Sarana Mandiri Mukti TA 2021.

Ekuitas PT. Sarana Mandiri Mukti yang didasari pada Laporan Keuangan Unaudited TA 2021 disajikan pada pos Neraca dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.84.b Ekuitas PT. Sarana Mandiri Mukti yang didasari pada
Laporan Keuangan Unaudited TA 2021 dan TA 2020**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Modal disetor	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6	Laba/Rugi	9.844.189.348,00	9.018.286.208,00
	Jumlah Ekuitas	19.844.189.348,00	19.018.286.208,00

Penilaian investasi didasari pada Laporan Keuangan *Unaudited* PT Sarana Mandiri Mukti per 31 Desember 2021.

- 4) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bengkulu pada PT Bimex per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 menurun sebesar Rp455.240.346,44 atau 100,00% dibanding per 31 Desember 2020 sebesar Rp455.240.346,44. Hal ini disebabkan karena ekuitas PT Bimex menurun menjadi defisit (negatif) sebesar Rp296.028.505,08. Laporan Keuangan PT. Bimex TA 2021 Unaudited yang menyajikan jumlah ekuitas negatif, mengakibatkan secara akuntansi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bengkulu diperhitungkan secara ekuitas sebesar Rp0,00.

Tabel 5.85 Ekuitas PT. Bimex yang didasari pada Laporan Keuangan Unaudited TA 2021 dan TA 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Modal disetor	1.004.200.000,00	450.000.000,00
2	Peningkatan Modal		515.102.751,00
3	Saldo Laba (Rugi)	(931.554.946,35)	(581.651.916,00)
4	Laba Rugi tahun berjalan	(368.673.558,73)	71.789.511,44
	Jumlah Ekuitas	(296.028.505,08)	455.240.346,44

Penilaian investasi didasari pada Laporan Keuangan *Unaudited* PD Bimex per 31 Desember 2021.

- 5) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bengkulu pada PT Samudra Bengkulu Mandiri adalah nihil. Tidak ada data yang tersedia untuk dilakukan perhitungan dengan metode ekuitas, karena perusahaan sudah tidak beroperasi dan tidak membuat laporan keuangan. Nilai Penyertaan Modal pada PT Samudra Bengkulu Mandiri sebesar Rp150.000.000,00.
- 6) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bengkulu pada PT Askrida per 31 Desember 2021 sebesar Rp330.000.000,00 meningkat sebesar Rp80.000.000,00 atau 32% dari TA 2020 sebesar Rp250.000.000,00. Perhitungan penyertaan modal menggunakan metode biaya.

Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2021 dan 2020 berdasarkan biaya perolehan adalah sebagai berikut.

Tabel 5.86 Penyertaan Modal Pemerintah per 31 Desember 2021 dan 2020 Berdasarkan Biaya Perolehan

(dalam Rupiah)

No.	Nama BUMD/ Perusahaan Umum	Nilai Penyertaan Modal	
		TA 2021	TA 2020
1.	PT Bank Bengkulu	145.368.000.000,00	145.368.000.000,00
2.	PT Bengkulu Mandiri	28.300.000.000,00	28.300.000.000,00
3.	PT SaranaMandiri Mukti	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00
4.	PD Bimex	450.000.000,00	450.000.000,00
5.	PT Samudra Bengkulu Mandiri	150.000.000,00	150.000.000,00
6.	PT Askrida	330.000.000,00	250.000.000,00

	Jumlah	179.098.000.000,00	179.018.000.000,00
--	--------	--------------------	--------------------

c. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya; dan
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.550.755.589.560,44 mengalami peningkatan sebesar Rp127.962.483.478,34 atau 2,36% dari TA 2020 sebesar Rp5.422.793.106.082,10. Adapun rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.87 Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Aset Tetap	Saldo per 31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo per 31 Desember 2021
1	2	3	4	5=2+3-4
Tanah	853.389.254.714,39	86.938.458.945,00	55.915.050.168,00	884.412.663.491,39
Peralatan dan Mesin	1.285.271.174.661,90	122.889.926.334,30	4.089.321.563,63	1.404.071.779.432,57
Gedung dan Bangunan	1.613.049.623.374,33	107.062.526.777,87	5.192.468.312,95	1.714.919.681.839,25
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.915.357.145.486,82	99.950.594.439,57	11.919.117.775,90	3.003.388.622.150,49
Aset Tetap Lainnya	231.001.591.777,79	33.156.542.958,95	519.281.000,00	263.638.853.736,74
Konstruksi Dalam Pengerjaan	48.278.878.834,02	12.084.414.879,30	661.117.793,00	59.702.175.920,32
Akumulasi Penyusutan	-1.523.554.562.767,15	-255.823.624.243,17	0,00	-1.779.378.187.010,32
Jumlah	5.422.793.106.082,10	206.258.840.091,82	78.296.356.613,48	5.550.755.589.560,44

Rincian Aset Tetap per SKPD pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dimuat dalam **Lampiran 10**.

Penambahan Aset Tetap TA 2021 berasal dari Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Pengadaan Aset diluar Tahun Anggaran 2021 dan dari pengakuan utang TA 2021. Realisasi dari Belanja Modal TA 2021 sebesar Rp324.342.084.410,29, sedangkan dari hasil rekonsiliasi Aset Tetap TA 2021 diperoleh Penambahan Aset Tetap sebesar Rp300.985.355.045,94, sehingga terdapat pengurangan sebesar Rp23.356.729.364,35 dari realisasi Belanja Modal TA 2021, Kondisi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.88 Sumber Perolehan dan Pengurangan Aset Tetap per 31 Desember 2021
diluar Belanja Modal**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah
Penambahan Aset Tetap di luar Belanja Modal TA 2021		
1	Belanja Barang dan Jasa TA 2021	22.702.593.933,29
2	Hibah Kementerian/Pemerintah Daerah	11.148.990.055,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	454.505.565,27
4	Perkembang Biakan Hewan Ternak	0,00
	JUMLAH Penambahan Aset Tetap	34.306.089.553,56
Pengurangan Aset Tetap di TA 2021		
1	Pengalihan kewenangan ke instansi vertikal	9.689.500,00
2	Menjadi Aset Lainnya Kemitraan Pihak Ketiga	53.900.680.500,00
3	Penghapusan / Penjualan	919.641.968,00
4	Menjadi Extracommptabel	2.121.405.971,99
5	Menjadi Expense	659.394.440,00
6	Menjadi Beban Persediaan	1.439.227.689,35
7	Menjadi Aset Tidak Berwujud (ATB)	237.303.000,00
8	Pembayaran utang	199.606.968,00
	JUMLAH Pengurangan Aset Tetap	59.486.950.037,34
	Jumlah Penambahan / Pengurangan	(25.180.860.483,78)

Penjelasan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 per jenis asetnya diuraikan sebagai berikut.

1) Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, serta biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar. Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp884.412.663.491,39, Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp31.023.408.777,00 atau 3,64% dibandingkan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp853.389.254.714,39 Peningkatan tersebut karena akumulasi dari adanya Aset Tetap Tanah yang baru dinilai oleh KJPP.

Perolehan Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2021, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.89 Perolehan Aset Tetap Tanah TA 2021

(dalam Rupiah)

No	Rincian	Nilai (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Tanah TA 2020	853.389.254.714,39
B	Penambahan :	
	Penambahan Belanja Modal Tanah TA 2021	351.833.957,00
	Dari Belanja Barang dan Jasa TA 2021	0,00
	Diluar Pengadaan TA 2021 Dari Penyerahan Kewenangan Sekolah-sekolah Kabupaten/Kota	0,00
	Hibah Tanah SMKN 2 Kepahiang	69.000.000,00
	Dari Utang pada Pihak ketiga	0,00
	Dari Koreksi Ekuitas	86.517.624.988,00
	Total Penambahan	86.938.458.945,00
C	Pengurangan	
	a. Pengalihan kewenangan ke Instansi Vertikal	1.901.689.500,00
	b. Menjadi Aset Kemitraan P3	53.900.680.500,00
	c. Menjadi Ekstrakomtable	0,00
	d. Menjadi Ekspense	112.680.160,00
	e. Penghapusan	8,00
	f. Menjadi Beban Persediaan	0,00
	Total Pengurangan	55.915.050.168,00
D	Saldo Aset Tetap Tanah TA 2021	884.412.663.491,39

Penambahan Aset Tetap Tanah selain dari Belanja Modal juga terdapat dari Hibah Tanah dari SMKN 2 Kabupaten Kepahiang serta penilaian atas tanah yang belum dinilai. Sedangkan untuk pengurangan Aset Tetap Tanah pada pengalihan kewenangan ke instansi vertikal merupakan Pengalihan kewenangan aset tetap tanah ke Kementerian Perhubungan Tahun 2020 dengan Nomor BAST : 032/4451/Dishub-2020; Nomor : BA.62/PL.301/ DOPD/2020, tanggal 06 Januari 2020.

Pengurangan Aset Tetap Tanah menjadi kemitraan Pihak ketiga didasari pada Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Kota Bengkulu tentang Pengelolaan Pantai Panjang. meliputi luas lahan pada tabel berikut :

Tabel 5.90 Aset Tetap Tanah TA 2021 sebagai aset kemitraan pihak ketiga

No.	Jenis Kerjasama	Pihak Ketiga	Nilai Aset Tanah yang disajikan	Keterangan
1	Tanah yang disewakan seluas 65.000 M2, selama 30 Tahun, berakhir tahun 2024.	PT. Dharmawan Subekti	15.795.000.000,00	Hotel dan Rumah Makan Pasir Putih
2	Tanah yang disewakan seluas 10.000 M2, selama 30 Tahun, berakhir tahun 2031.	PT. Pantai Indah Lestari	2.430.000.000,00	Rainbow Cafe
3	Kerjasama Operasi Tanah seluas 22.500 M2, berakhir tahun 2032.	CV. Panorama Wisata	5.467.500.000,00	Malibu Cafe Grand Marina Hotel Royal Beach View Beach

No.	Jenis Kerjasama	Pihak Ketiga	Nilai Aset Tanah yang disajikan	Keterangan
4	Tanah yang disewakan seluas 10.000 M2, selama 30 Tahun, berakhir tahun 2032.	CV. Dwi Pujakusuma	2.430.000.000,00	Grand Marina Hotel Royal Beach View Beach
5	Tanah yang disewakan seluas 12.000 M2, berakhir tahun 2032.	CV. Nala Wisata Abadi	2.916.000.000,00	Hotel Nala Sea Side
6	Tanah yang disewakan seluas 2.000 M2, berakhir tahun 2037.	CV. Ratu Putri Gading Cempaka	486.000.000,00	Cafe Arwana
7	Tanah yang disewakan seluas 6.035,5 M2, berakhir tahun 2036.	CV. Rindu Hati	1.466.626.500,00	Cafe Rindu Hati
8	Tanah yang disewakan seluas 6.000 M2, berakhir tahun 2037.	CV. Kemuning Shakti	1.458.000.000,00	Hotel Kemuning Mercusuar Resto
9	Tanah yang disewakan seluas 9.000 M2, berakhir tahun 2037.	CV. Permata Mandiri	2.187.000.000,00	Kuala View Beach
10	BOT atas Tanah seluas 4.000 M2, selama 30 Tahun berakhir tahun 2041.	PT. Barata Guna Indoganesha	972.000.000,00	Hotel Barata Bengkulu
11	Tanah seluas 3.200 M2, selama 20 Tahun berakhir tahun 2027 (Guest House Rafflesia).	PT. Batu Keris Kepahiang	777.600.000,00	Guest House Raffles
12	Tanah yang disewakan seluas 1.078 M2, selama 3 tahun, berakhir tahun 2017.	PT. Bintang Azzahra	261.954.000,00	Pondok Makan Permata
13	BOT atas Tanah seluas 71.000 M2, berakhir tahun 2036 serta diperpanjang 30 Tahun.	PT. Impian Bengkulu Indah	17.253.000.000,00	Bengkulu Indah Mall
JUMLAH			53.900.680.500,00	

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.404.071.779.432,57. Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp118.800.604.770,67 atau 9,24% dibandingkan Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.285.271.174.661,90. Dari nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin tersebut setelah dilakukan pemeriksaan pada SMKN 5 Kepahiang ditemukan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya yang bersumber dari Pengadaan Dana BOS TA 2021 sebesar Rp.63.000.000,00 yaitu :

- Printer Epson L120, 2 unit x Rp1.500.000,00 = 3.000.000,00
- Kendaraan Bermotor, 2 unit x Rp5.000.000,00 = 10.000.000,00
- Personal Computer, 4 unit x Rp7.500.000,00 = 30.000.000,00
- Kursi Siswa, 200 unit x Rp100.000,00 = 20.000.000,00

Dan pada SMKN 1 Seluma ditemukan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang seharusnya tidak dicatat sebagai Aset Tetap yang bersumber dari Pengadaan Dana BOS TA 2021 sebesar Rp.1.320.000,00 yaitu : Pengadaan Alas Meja.

Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2021, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.91 Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Rincian	Nilai (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2020	1.285.271.174.661,90
B	Penambahan :	
	Penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021	120.896.451.954,30
	Dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021	16.500.000,00
	Dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2021	17.000.000,00
	Dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021	61.050.000,00
	Dari Belanja Barang dan Jasa dan BTT TA 2021	1.404.260.380,00
	Diluar Pengadaan TA 2021 Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin antar OPD	0,00
	Diluar Pengadaan TA 2021 Hibah Aset Tetap Peralatan Mesin dari Kementerian	494.664.000,00
	Dari Utang pada Pihak ketiga	0,00
	Penambahan dari Jurnal Koreksi	0,00
	Penambahan dari Jurnal Reklasifikasi	0,00
	total penambahan	122.889.926.334,30
C	Pengurangan	
	a. Mutasi Aset Tetap Peralatan Mesin antar OPD	0,00
	a. Hibah ke Instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00
	b. Lelang/Penghapusan Aset	0,00
	c. Menjadi Ekstra komtable	2.111.905.971,99
	d. Menjadi Ekspense	346.759.280,00
	e. Menjadi Persediaan	486.096.676,80
	f. Menjadi ATB	0,00
	g. Menjadi KIB C	30.570.000,00
	h. Menjadi KIB D	691.573.931,30
	i. Menjadi KIB E	222.808.735,54
	j. Pembayaran utang dari BM Peralatan Mesin	199.606.968,00
	k. Pengurangan dari Jurnal Koreksi	0,00
	Total Pengurangan	4.089.321.563,63
D	Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2021	1.404.071.779.432,57

Penambahan yang bersumber dari Belanja Barang Jasa dan Belanja Tidak Terduga TA 2021 terinci sebagai berikut:

**Tabel 5.92 Perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2021
Yang Bersumber dari Belanja Barang Jasa dan Belanja Tidak Terduga**

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Belanja Barang dan Jasa dan BTT	Jumlah
1	Dinas Pemuda dan Olahraga 5.1.2.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	

No.	Rincian Belanja Barang dan Jasa dan BTT	Jumlah
2	1 Backdrop Ruang Kepala Dinas	20.715.533,00
	2 Backdrop Ruang Kepala Bidang Prestasi	24.331.183,00
	3 Backdrop Ruang Pembudayaan	19.245.198,00
	4 Backdrop Ruang Aula	109.488.086,00
	JUMLAH	173.780.000,00
	Dinas Perpustakaan	
	5.1.2.01.01 Belanja Barang Pakai Habis	
	1 Gorden/Gordyn kain import ukuran L 260 cm T 260 cm (47,18 M)	24.675.140,00
	2 Gorden/Gordyn kain import ukuran L 260 cm T 180 cm (14,04 M)	7.342.920,00
	3 Gorden/Gordyn kain import ukuran L 240 cm T 180 cm (4,32 M)	2.259.360,00
3	4 Gorden/Gordyn kain import ukuran L 105 cm T 260 cm (10,92 M)	5.711.160,00
	JUMLAH	39.988.580,00
	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	
	5.1.2.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
	1 Pembuatan Tiang bendera kantor dinas baru	11.190.000,00
	JUMLAH	11.190.000,00
	Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu	
	5.1.2.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	
	1 Perencanaan pembuatan Videotron Kantor Set. DPRD Prov	49.940.000,00
	2 Papan Nama Dewan Kayu Jati Jepara ukira Bunga Rafflesia ukuran 8cmx3.5cmx20 cm panjang 55 cm warna walud	59.936.800,00
5	JUMLAH	109.876.800,00
	Dinas Kesehatan	
	Realisasi Belanja Tidak Terduga dari BPKD	
	1 Pembelian Mobil Ambulance	495.030.000,00
	JUMLAH	495.030.000,00
	RSUD M Yunus	
	Realisasi Belanja Tidak Terduga dari BPKD	
	1 Pembelian Mobil Ambulance	521.100.000,00
	JUMLAH	521.100.000,00
	TOTAL JUMLAH	1.350.965.380,00

Penambahan yang bersumber dari Hibah merupakan hibah kendaraan Roda empat dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI Tahun 2019 Nomor : 329/M-DAG/BAST/10/2019, Tanggal 25 Oktober 2019.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang mencakup biaya perencanaan, biaya konstruksi

dan biaya pengawasan dicatat sebagai penambahan aset Gedung dan Bangunan tersebut.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.714.919.681.839,25. Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp101.870.058.464,92 atau 6,32% dibandingkan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.613.049.623.374,33. Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2021, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.93 Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2021
(dalam Rupiah)

No.	Rincian	Nilai (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2020	1.613.049.623.374,32
	Penambahan :	
	Penambahan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021	85.977.703.079,72
	Dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021	30.570.000,00
	Dari Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2021	0,00
	Dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021	0,00
	Dari Belanja Barang dan Jasa TA 2021	9.353.304.284,88
B	Diluar Pengadaan TA 2021 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar OPD	0,00
	Diluar Pengadaan TA 2021 Hibah Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kementerian	10.585.326.055,00
	Dari Utang pada Pihak ketiga	454.505.565,27
	Penambahan dari Jurnal Koreksi	0,00
	Reklasifikasi dari KDP menjadi Gedung dan Bangunan	661.117.793,00
	total penambahan	107.062.526.777,87
	Pengurangan	
	a. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan antar OPD	0,00
	b. Hibah ke Instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota	54.036.185,00
	c. Lelang/Penghapusan Aset	919.641.968,00
	d. Menjadi Ekstra komtable	9.500.000,00
	e. Menjadi Ekspense	199.955.000,00
	f. Menjadi Persediaan	732.203.012,55
C	g. Menjadi ATB	0,00
	h. Menjadi KIB B	16.500.000,00
	i. Menjadi KIB D	3.056.811.900,00
	j. Menjadi KIB E	0,00
	k. Pembayaran utang dari BM Gedung dan Bangunan	0,00
	l. Penyesuaian utang dari BM Gedung dan Bangunan	0,00
	m. Koreksi Reklas ke Aset Lain-lain	203.820.247,40
	Total Pengurangan	5.192.468.312,95
D	Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2021	1.714.919.681.839,25

Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Belanja Barang Jasa TA 2021 sebesar Rp9.353.304.284,88 meliputi 12 OPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.94 Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang Bersumber dari Belanja Barang dan Jasa TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.406.545.307,50
2	Dinas Kesehatan	581.640.451,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	439.850.125,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	353.997.875,00
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	166.268.670,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa	157.732.257,00
7	Dinas Koperasi dan UKM	185.252.995,88
8	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	190.436.400,00
9	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	2.511.902.891,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	68.862.200,00
11	Biro Umum Setda Provinsi Bengkulu	156.853.812,50
12	Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu	133.961.300,00
TOTAL JUMLAH		9.353.304.284,88

Perolehan dari Belanja Barang dan Jasa meliputi rekening Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi dan Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, secara rinci belanja barang dan jasa yang menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari hibah merupakan Hibah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI sebesar Rp10.585.326.055,00 yang berlokasi di Pasir Putih Pantai Panjang. Selain itu terdapat juga penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Utang Jangka Pendek Lainnya – Utang pada Pihak Ketiga meliputi 2 OPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.95 Perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Yang bersumber dari Utang pada Pihak Ketiga TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah
1	Biro Umum Setda Provinsi Bengkulu	
	1 Rehab Kantin Pemda	97.671.252,00
	2 Rehab Gedung Kantor	90.507.782,32
	3 Pembuatan Auning Rumah Dinas Gubernur Bengkulu	106.794.399,95
2	Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu	
	1 Pembuatan Gerbang Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu	159.532.131,00
TOTAL JUMLAH		454.505.565,27

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan di TA 2021 dikarenakan adanya pemusnahan aset tetap Gedung dan Bangunan di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp786.400.000,00 dan di Dinas Kesehatan sebesar Rp133.241.968,00.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai jaringan tersebut siap pakai.

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.003.388.622.150,49. Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp88.031.476.663,67 atau 3,02% dibandingkan Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.915.357.145.486,82. Perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.96 Perolehan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Rincian	Nilai (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2020	2.915.357.145.486,82
B	Penambahan :	
	Penambahan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021	91.465.065.504,27
	Dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021	691.573.931,30
	Dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021	2.996.883.900,00
	Dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2020	0,00
	Dari Belanja Barang dan Jasa TA 2021	4.737.143.104,00
	Diluar Pengadaan TA 2020 Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan antar OPD	0,00
	Diluar Pengadaan TA 2021 Hibah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Kementerian	0,00
	Dari Utang pada Pihak ketiga	0,00
	Penambahan dari Jurnal Koreksi	0,00
	Reklasifikasi dari KIB C menjadi Jalan Irigasi dan Jaringan	59.928.000,00
	total penambahan	99.950.594.439,57
C	Pengurangan	
	a. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan antar OPD	0,00
	b. Hibah ke Instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00
	c. Lelang/Penghapusan Aset	0,00
	d. Menjadi Ekstra komtable	0,00
	e. Menjadi Ekspense	0,00
	f. Menjadi Persediaan	0,00
	g. Menjadi ATB	0,00
	h. Menjadi KIB B	17.000.000,00
	i. Menjadi KIB C	0,00
	j. Menjadi KIB E	54.494.000,00

No.	Rincian	Nilai (Rp)
	k. Menjadi KDP	11.847.623.775,90
	k. Pembayaran utang dari BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
	m. Koreksi Reklas ke Aset Lain-lain	0,00
	Total Pengurangan	11.919.117.775,90
D	Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021	3.003.388.622.150,49

Penambahan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang bersumber dari Belanja Barang Jasa TA 2021 sebesar Rp4.737.143.104,00 meliputi 5 OPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.97 Perolehan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan yang Bersumber dari Belanja Barang dan Jasa TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.951.506.895,43
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	539.172.908,57
3	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	91.399.000,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	137.887.300,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	17.177.000,00
	TOTAL JUMLAH	4.737.143.104,00

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp263.638.853.736,74 Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp32.637.261.958,95 atau 14,13% dibandingkan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp231.001.591.777,79, Perolehan Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.98 Perolehan Aset Tetap Lainnya TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Rincian	Nilai (Rp)
A	Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2020	231.001.591.777,79
	Penambahan :	
	<i>Penambahan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2021</i>	25.651.029.915,00
	Dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021	222.808.735,54
	Dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021	0,00
	Dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021	54.494.000,00
	Dari Belanja Barang dan Jasa TA 2021	7.228.210.308,41

	Diluar Pengadaan TA 2020 Mutasi Aset Tetap Lainnya antar OPD	0,00
	Diluar Pengadaan TA 2020 Perkembang biakan Hewan Ternak	0,00
	Dari Utang pada Pihak ketiga	0,00
	Penambahan dari Jurnal Koreksi	0,00
	Reklasifikasi dari KDP menjadi Aset Tetap Lainnya	0,00
	total penambahan	33.156.542.958,95
C	Pengurangan	
	a. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan antar OPD	0,00
	b. Hibah ke Instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00
	c. Hewan Ternak yang mati	0,00
	d. Menjadi Ekstra komtable	0,00
	e. Menjadi Ekspense	0,00
	f. Menjadi Persediaan	220.928.000,00
	g. Menjadi ATB	237.303.000,00
	h. Menjadi KIB B	61.050.000,00
	i. Menjadi KIB C	0,00
	j. Menjadi KIB D	0,00
	k. Menjadi KDP	0,00
	k. Pembayaran utang dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	m. Pengurangan dari Jurnal Koreksi	0,00
	Total Pengurangan	519.281.000,00
D	Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2021	263.638.853.736,74

Penambahan Aset Tetap Lainnya yang bersumber dari Belanja Barang Jasa TA 2021 sebesar Rp7.173.077.576,95 meliputi 4 OPD dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.99 Perolehan Aset Tetap Lainnya
yang Bersumber dari Belanja Barang dan Jasa TA 2021**

(dalam Rupiah)

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.792.410.816,95
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	71.658.400,00
3	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	262.753.360,00
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	46.255.000,00
TOTAL JUMLAH		7.173.077.576,95

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan/belum selesai dibangun. Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp59.702.175.920,32. Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp11.423.297.086,30 atau 23,66% dibandingkan Konstruksi dalam

Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp48.278.878.834,02. Perolehan Konstruksi dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.100 Perolehan KDP TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Rincian	Nilai (Rp)
A	Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2020	48.278.878.834,02
B	Penambahan :	
	Dari Belanja Modal Tanah TA 2021	0,00
	Dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021	0,00
	Dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021	0,00
	Dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2021	0,00
	Dari Belanja Barang dan Jasa TA 2021	32.970.856,00
	Diluar Pengadaan TA 2021 Mutasi Aset Tetap Lainnya antar OPD	0,00
	Diluar Pengadaan TA 2021 Perkembang biakan Hewan Ternak	0,00
	Dari Utang pada Pihak ketiga	0,00
	Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan menjadi KDP	203.820.247,40
	Reklasifikasi dari JIJ menjadi KDP	11.847.623.775,90
	total penambahan	12.084.414.879,30
C	Pengurangan	
	a. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan antar OPD	0,00
	b. Hibah ke Instansi vertikal dan Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00
	c. Hewan Ternak yang mati	0,00
	d. Menjadi Ekstra komtable	0,00
	e. Menjadi Ekspense	0,00
	f. Menjadi Persediaan	0,00
	g. Menjadi ATB	0,00
	h. Menjadi KIB B	0,00
	i. Menjadi KIB C	661.117.793,00
	j. Menjadi KIB D	0,00
	k. Pembayaran utang dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	l. Penyesuaian Kompensasi dari BM Aset Tetap Lainnya	0,00
	m. Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	0,00
	Total Pengurangan	661.117.793,00
D	Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2021	59.702.175.920,32

7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu asset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat asset tetap yang bersangkutan. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.779.378.187.010,32.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp255.823.624.243,17 atau 16,79% dibandingkan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.523.554.562.767,15. Rincian penyusutan aset tetap per klasifikasi aset tetap terlampir (**Lampiran 10.1**).

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya meliputi :

- 1) Tagihan Jangka Panjang;
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- 3) Aset Tidak Berwujud;
- 4) Aset Lain-lain;
- 5) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud;
- 6) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp248.519.206.430,50. Aset Lainnya tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp88.539.318.680,89 atau sebesar 55,34% dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp159.979.887.749,61. Selanjutnya diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

1) Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Provinsi Bengkulu terdiri dari Tagihan Piutang Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah yang penerimaan pembayarannya dilakukan secara angsuran dan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Saldo Tagihan Jangka Panjang Per 31 Desember 2021 sebesar Rp432.647.946,00. Tagihan Jangka Panjang tersebut turun sebesar Rp79.633.900,00 atau 15,54% dibandingkan dengan tagihan jangka panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp512.281.846,00. Turunnya Tagihan Jangka panjang ini disebabkan oleh karena angsuran pembayaran TGR Pegawai yang telah pensiun melalui Taspen sebesar Rp79.597.900,00 dan koreksi perhitungan tagihan penjualan rumah dinas sebesar Rp36.000,00. Tagihan Jangka Panjang meliputi a. Tagihan Penjualan Angsuran dan b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan piutang penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Realisasi Tagihan penjualan angsuran rumah dinas pada TA 2021 sebesar nihil, namun terdapat koreksi atas perhitungan tagihan penjualan angsuran an. Ir. Ismail sebesar Rp36.000,00, sehingga Saldo

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.042.954,00. Rincian Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.101 Nilai Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2020	Koreksi Tahun 2021		Mutasi Tahun 2021		31 Desember 2021
			Tambah	Pembayaran	Tambah	Pembayaran	
1.	Penjualan rumah dinas	33.078.954,00	-	36.000,00	-	-	33.042.954,00
	Jumlah	33.078.954,00	-	36.000,00	-	-	33.042.954,00

Berikut ini diuraikan Saldo Tagihan Penjualan Rumah Dinas TA. 2021 berdasarkan nama pembeli, tahun penjualan dan harga jualnya.

Tabel 5.102 Saldo Tagihan Penjualan Rumah Dinas TA. 2021

(dalam Rupiah)

NO	NAMA PEMBELI	NOMOR SK PENJUALAN	HARGA JUAL	SALDO PER 31 DES 2020	PEMBAYARAN TA. 2021	SALDO PER DES 2021
1	Ujang Barlian	602 Tahun 1994	6.048.480,00	100.000,00		100.000,00
2	Sartoni Gunawan	602 Tahun 1994	7.127.860,00	6.771.467,00		6.771.467,00
3	Abdul Munir	602 Tahun 1994	5.887.860,00	3.716.386,00		3.716.386,00
4	Damhuri Manan	536 Tahun 2003	3.395.668,00	2.900.668,00		2.900.668,00
5	Ade Kusyanto	536 Tahun 2003	15.233.800,00	7.540.000,00		7.540.000,00
6	M. Djamhuri	81 Tahun 1992	4.617.145,00	3.277.145,00		3.277.145,00
7	Ny. Nursyah Darul Kunthi	602 Tahun 1994	6.963.560,00	6.615.382,00		6.615.382,00
8	A. Ansyori	81 Tahun 1992	3.901.543,00	2.121.800,00	-	2.121.800,00
9	Ir. Ismail	05 Tahun 1989	2.984.202,00	36.000,00	36.000,00	0,00
10	Arbain Bandar	602 Tahun 1994	6.327.480,00	106,00		106,00
SALDO			62.487.598	33.078.954,00	36.000,00	33.042.954,00

b. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Daerah

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tagihan TGR Daerah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp399.604.992,00. Tagihan TGR Daerah per 31 Desember 2021 tersebut turun sebesar Rp79.597.900,00 atau 16,61% dibandingkan dengan Tagihan TGR Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp479.202.892,00. Tagihan TGR Daerah per 31 Desember 2021 meliputi TGR Pegawai dan TGR Pegawai yang telah pensiun atas kelebihan pembayaran gaji saat masih aktif. Tagihan TGR Daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 dirinci pada **Lampiran 11**.

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp77.862.120.000,00. Penambahan sebesar tersebut didasari pada Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Kota Bengkulu tentang Pengelolaan Pantai Panjang. Rincian Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada tabel berikut :

Tabel 5.103 Data Kemitraan Pihak Ketiga TA. 2021

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Kerjasama	Pihak Ketiga	Nilai Aset yang disajikan	Ket
1	Tanah yang disewakan seluas 65.000 M2, selama 30 Tahun, berakhir tahun 2024.	PT. Dharmawan Subekti	23.400.000.000	Hotel dan Rumah Makan Pasir Putih
2	Tanah yang disewakan seluas 10.000 M2, selama 30 Tahun, berakhir tahun 2031.	PT. Pantai Indah Lestari	3.600.000.000	Rainbow Cafe
3	Kerjasama Operasi Tanah seluas 22.500 M2, berakhir tahun 2032.	CV. Panorama Wisata	8.100.000.000	Malibu Cafe Grand Marina Hotel Royal Beach View Beach
4	Tanah yang disewakan seluas 10.000 M2, selama 30 Tahun, berakhir tahun 2032.	CV. Dwi Pujakusuma	3.600.000.000	Grand Marina Hotel Royal Beach View Beach
5	Tanah yang disewakan seluas 12.000 M2, berakhir tahun 2032.	CV. Nala Wisata Abadi	4.320.000.000	Hotel Nala Sea Side
6	Tanah yang disewakan seluas 2.000 M2, berakhir tahun 2037.	CV. Ratu Putri Gading Cempaka	720.000.000	Cafe Arwana
7	Tanah yang disewakan seluas 6.035,5 M2, berakhir tahun 2036.	CV. Rindu Hati	2.172.780.000	Cafe Rindu Hati
8	Tanah yang disewakan seluas 6.000 M2, berakhir tahun 2037.	CV. Kemuning Shakty	2.160.000.000	Hotel Kemuning Mercusuar Resto
9	Tanah yang disewakan seluas 9.000 M2, berakhir tahun 2037.	CV. Permata Mandiri	3.240.000.000	Kuala View Beach
10	BOT atas Tanah seluas 4.000 M2, selama 30 Tahun berakhir tahun 2041.	PT. Barata Guna Indoganessa	1.440.000.000	Hotel Barata Bengkulu
11	Tanah seluas 3.200 M2, selama 20 Tahun berakhir tahun 2027 (Guest House Rafflesia).	PT. Batu Keris Kepahiang	1.152.000.000	Guest House Raffles
12	Tanah yang disewakan seluas 1.230 M2, selama 3 tahun, berakhir tahun 2017.	CV. Marola	442.800.000	Rumah Makan Marola
13	Tanah yang disewakan seluas 1.078 M2, selama 3 tahun, berakhir tahun 2017.	PT. Bintang Azzahra	388.080.000	Pondok Makan Permata
14	BOT atas Tanah seluas 71.000 M2, berakhir tahun 2036 serta diperpanjang 30 Tahun.	PT. Impian Bengkulu Indah	23.126.460.000	Bengkulu Indah Mall
JUMLAH			77.862.120.000	

3) Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa. Didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana untuk Aset Tidak Berwujud disajikan sesuai dengan nilai perolehannya. dan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud disajikan sesuai dengan nilai

perhitungan amortisasi. Sehingga penyajian terhadap Aset Tidak Berwujud untuk tahun komparatif TA 2020, diubah disesuaikan dengan Bagan Akun Standar yang berlaku.

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp11.846.228.130,00. meningkat sebesar Rp291.053.000,00 atau 2,52% dibandingkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.555.175.130,00. Seperti Software, website, dan aplikasi SIM RS.

Tabel 5.104 Nilai Aset Tidak Berwujud TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Kode	Nama OPD	Harga Perolehan sampai dengan TA 2020	Penambahan ATB di TA 2021	Jumlah Aset Tidak Berwujud TA 2021
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	933.359.500,00	-	933.359.500,00
1.02.01	Dinas Kesehatan	1.455.553.500,00	-	1.455.553.500,00
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus	978.279.000,00	-	978.279.000,00
1.02.03	Rumah Sakit Kesehatan Jiwa Soeprpto	1.011.969.750,00	-	1.011.969.750,00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.799.151.500,00	-	1.799.151.500,00
1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-
1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	44.852.500,00	-	44.852.500,00
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.680.000,00	-	31.680.000,00
1.06.01	Dinas Sosial	14.960.000,00	-	14.960.000,00
2.01.01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	74.564.600,00	-	74.564.600,00
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	134.000.000,00	-	134.000.000,00
2.03.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.095.000,00	-	2.095.000,00
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29.960.000,00	-	29.960.000,00
2.09.01	Dinas Perhubungan	846.054.500,00	-	846.054.500,00
2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	9.750.000,00	9.750.000,00
2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	44.700.000,00	-	44.700.000,00
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olahraga	25.600.000,00	-	25.600.000,00
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	195.453.500,00	187.693.000,00	383.146.500,00
3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	-	50.000.000,00
3.02.01	Dinas Pariwisata	35.000.000,00	-	35.000.000,00
3.03.01	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan	48.862.000,00	-	48.862.000,00

Kode	Nama OPD	Harga Perolehan sampai dengan TA 2020	Penambahan ATB di TA 2021	Jumlah Aset Tidak Berwujud TA 2021
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	37.000.000,00	-	37.000.000,00
3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.500.000,00	-	14.500.000,00
4.01.01	Dewan Perwakilan rakyat Daerah	-	-	-
4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-
4.01.03	Sekretariat Daerah	161.308.500,00	-	161.308.500,00
4.01.04	Sekretariat DPRD	-	-	-
4.01.05	Badan Penghubung	19.580.000,00	-	19.580.000,00
4.02.01	Inspektorat	24.900.000,00	-	24.900.000,00
4.03.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	199.150.000,00	44.000.000,00	243.150.000,00
4.04.11	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.091.741.280,00	49.610.000,00	3.141.351.280,00
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah	172.900.000,00	-	172.900.000,00
4.06.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	78.000.000,00	-	78.000.000,00
	JUMLAH	11.555.175.130,00	291.053.000,00	11.846.228.130,00

4) Aset Lain-lain

Didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana untuk Aset Lain-lain disajikan sesuai dengan Bagan Akun Standar yang berlaku. Penyajian Aset Lain-lain di TA 2021 menambahkan Aset Non Lancar (Jaminan Reklamasi, Jaminan Pasca Tambang dan Jaminan Kesungguhan) kedalam aset lain-lain, sehingga Saldo Aset Lain-lain Per 31 Desember 2021 sebesar Rp332.353.141.862,24. Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp11.416.760.591,17 atau 3,56% dari aset lain-lain per 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp320.936.281.271,07. Jumlah Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 merupakan penjumlahan dari Aset lain-lain sebesar Rp257.064.106.129,00, dan Jaminan Reklamasi sebesar Rp63.872.275.142,07

Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 diklasifikasikan menjadi sebagai berikut :

Tabel 5.105 Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2020	Penambahan TA 2021	Pengurangan TA 2021	TA 2021
1	Aset dalam kondisi rusak berat	80.468.729.085,00		7.400.000,00	80.461.329.085,00
2	Aset dalam Proses Penghapusan (Hibah)	9.547.691.319,00			9.547.691.319,00

3	Hewan Ternak (Perguliran)	75.525.663.900,00	7.730.600.000,00		83.256.263.900,00
4	Aset yang tidak lagi diperguna	91.522.021.825,00			91.522.021.825,00
5	Jaminan Reklamasi	63.872.275.142,07	3.693.560.591,17		67.565.835.733,24
	Jumlah	320.936.381.271,07	11.424.160.591,17	7.400.000,00	332.353.141.862,24

Didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Nomor : 1481/30.01/DJB/2020 Tanggal 8 Desember 2020 Perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat. Dan terhitung tanggal 11 Desember 2020 bilyet deposito berjangka Jaminan Kesungguhan, Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang sudah menjadi rekening bersama a.n Direktur Jenderal Mineral dan Batubara QQ Pemegang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Untuk itu terhadap penyajian Jaminan Kesungguhan, Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang dicatat sebesar nilai audited per 31 Desember 2020 ditambah dengan bunga deposito per 31 Desember 2021. Untuk penambahan atas jaminan baru di TA 2021 beralih ke Pemerintah Pusat.

**Tabel 5.106 Jaminan Reklamasi, Pascatambang dan Kesungguhan
Per 31 Desember 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Sd TA 2020	Penambahan TA 2021	Bunga	Sd TA 2021
1	Penempatan Jaminan Reklamasi	41.432.213.048,52	0,00	2.011.440.327,10	43.443.653.375,62
2	Penempatan Jaminan Pasca Tambang	20.568.233.647,55	0,00	1.637.634.244,07	22.205.867.891,62
3	Penempatan Jaminan Kesungguhan	1.871.828.446,00	0,00	44.486.020,00	1.916.314.466,00
	Jumlah	63.872.275.142,07	0,00	3.693.560.591,17	67.565.835.733,24

5) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp11.392.635.530,00 mengalami kenaikan sebesar Rp578.375.650,00 atau 5,35% dari Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.814.259.880,00. Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :

**Tabel 5.107 Akumulasi Aset Tidak Berwujud
Per 31 Desember 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

Kode	Nama OPD	Akumulasi Amortisasi ATB Per 31 Desember 2020	Penambahan Amortisasi di TA 2021	Akumulasi Amortisasi ATB Per 31 Desember 2021
1.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	856.159.500,00	50.380.000,00	906.539.500,00
1.02.01	Dinas Kesehatan	1.356.648.100,00	98.905.400,00	1.455.553.500,00
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus	978.279.000,00	-	978.279.000,00
1.02.03	Rumah Sakit Kesehatan Jiwa Soepratto	737.407.000,00	202.393.950,00	939.800.950,00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.799.151.500,00	-	1.799.151.500,00
1.04.01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-
1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja	44.852.500,00	-	44.852.500,00
1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.680.000,00	-	31.680.000,00
1.06.01	Dinas Sosial	14.960.000,00	-	14.960.000,00
2.01.01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	-	-
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	74.564.600,00	-	74.564.600,00
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan	134.000.000,00	-	134.000.000,00
2.03.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.095.000,00	-	2.095.000,00
2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-
2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29.960.000,00	-	29.960.000,00
2.09.01	Dinas Perhubungan	846.054.500,00	-	846.054.500,00
2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	9.750.000,00	9.750.000,00
2.11.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	44.700.000,00	-	44.700.000,00
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olahraga	25.600.000,00	-	25.600.000,00
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	78.181.400,00	76.629.300,00	154.810.700,00
3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	-	50.000.000,00
3.02.01	Dinas Pariwisata	35.000.000,00	-	35.000.000,00
3.03.01	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	48.862.000,00	-	48.862.000,00
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	29.600.000,00	7.400.000,00	37.000.000,00
3.07.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.500.000,00	-	14.500.000,00
4.01.01	Dewan Perwakilan rakyat Daerah	-	-	-
4.01.02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-
4.01.03	Sekretariat Daerah	161.308.500,00	-	161.308.500,00
4.01.04	Sekretariat DPRD	-	-	-
4.01.05	Badan Penghubung	19.580.000,00	-	19.580.000,00
4.02.01	Inspektorat	19.920.000,00	4.980.000,00	24.900.000,00
4.03.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	199.150.000,00	44.000.000,00	243.150.000,00
4.04.11	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.931.146.280,00	83.937.000,00	3.015.083.280,00

Kode	Nama OPD	Akumulasi Amortisasi ATB Per 31 Desember 2020	Penambahan Amortisasi di TA 2021	Akumulasi Amortisasi ATB Per 31 Desember 2021
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah	172.900.000,00	-	172.900.000,00
4.06.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	78.000.000,00	-	78.000.000,00
	JUMLAH	10.814.259.880,00	578.375.650,00	11.392.635.530,00

6) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu asset lain-lain yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset lain-lain yang bersangkutan. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 sebesar Rp162.582.295.977,74, Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 meningkat sebesar Rp372.605.360.28 atau 0,23% dari Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp162.209.690.617,46.

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain terinci pada tabel berikut :

Tabel 5.108 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain TA 2021

(dalam Rupiah)

Kode	Nama Dinas / Satker	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		
		Sd TA 2020	Penambahan TA 2021	Sd TA 2021
1.01.01.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.895.424.950,67	38.173.266,66	2.933.598.217,33
1.02.01.01	Dinas Kesehatan	2.409.902.820,00	23.496.592,00	2.433.399.412,00
1.02.02.01	Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Yunus	18.496.896.309,00	3.862.093,33	18.500.758.402,33
1.02.03.01	RSKJ Soeprapto	5.239.824.503,00	140.000,00	5.239.964.503,00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.111.894.692,00	167.908.300,00	4.279.802.992,00
1.04.01.01	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	120.000.000,00	-	120.000.000,00
1.05.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	292.831.671,00	-	292.831.671,00
1.05.02.01	Satuan Polisi Pamong Praja	450.739.000,00	-	450.739.000,00
1.05.03.01	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	126.570.550,00	-	126.570.550,00
1.06.01.01	Dinas Kesejahteraan Sosial	417.244.963,00	-	417.244.963,00
2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi	2.128.934.307,00	-	2.128.934.307,00
2.02.01.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	99.114.000,00	-	99.114.000,00
2.03.01.01	Dinas Ketahanan Pangan	53.625.000,00	-	53.625.000,00
2.03.02.01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu	1.330.133.875,00	11.013.920,00	1.341.147.795,00
2.05.01.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu	1.599.245.100,27	2.923.507,73	1.602.168.608,00
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu			

Kode	Nama Dinas / Satker	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		
		Sd TA 2020	Penambahan TA 2021	Sd TA 2021
2.06.01.01		-	-	-
2.07.01.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu	218.671.998,00	-	218.671.998,00
2.09.01.01	Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu	6.717.226.256,69	2.550.820,01	6.719.777.076,70
2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Bengkulu	19.490.500,00	-	19.490.500,00
2.11.01.01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu	-	-	-
2.12.01.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	377.626.942,00	-	377.626.942,00
2.13.01.01	Dinas Pemuda dan Olahraga	646.109.651,33	964.333,34	647.073.984,67
2.17.01.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.178.463.181,00	-	1.178.463.181,00
3.01.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	4.189.325.000,00	-	4.189.325.000,00
3.02.01.01	Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu	2.455.241.272,00	35.135.000,00	2.490.376.272,00
3.03.01.01	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	80.278.948.862,06	75.798.420,54	80.354.747.282,60
3.05.01.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.183.473.141,00	-	2.183.473.141,00
3.07.01.01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	818.824.095,00	-	818.824.095,00
4.01.03.07	Sekretariat Daerah	6.731.930.225,00	-	6.731.930.225,00
4.01.04.01	Sekretariat DPRD	2.687.821.824,00	4.118.280,00	2.691.940.104,00
4.01.05.01	Badan Penghubung	2.362.696.658,00	-	2.362.696.658,00
4.02.01.01	Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu	473.156.556,00	-	473.156.556,00
4.03.01.01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.184.257.060,00	300.000,00	2.184.557.060,00
4.04.11.02	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	7.127.721.362,33	5.408.426,67	7.133.129.789,00
4.05.01.01	Badan Kepegawaian Daerah	525.844.448,00	-	525.844.448,00
4.06.01.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.260.479.844,11	812.400,00	1.261.292.244,11
	JUMLAH	162.209.690.617,46	372.605.360,28	162.582.295.977,74

5.3.2. Kewajiban

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun, dengan persyaratan pembayaran kembali pokok pinjaman harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Kewajiban Jangka Pendek yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu meliputi Pendapatan diterima dimuka, Utang beban dan Utang jangka pendek lainnya.

Tabel 5.109 Nilai Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Pendapatan Diterima Dimuka	104.342.572,61	104.029.857,54
2	Utang Beban	1.127.506.114,00	21.107.767.782,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	350.918.262.105,34	397.050.627.696,52
	Jumlah	352.150.110.791,95	418.262.425.336,06

1) Pendapatan Diterima Dimuka

Adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain. Saldo Pendapatan diterima dimuka Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp104.342.572,61 mengalami peningkatan sebesar Rp312.715,07 atau 0,30% dari Pendapatan diterima dimuka TA 2020 sebesar Rp104.029.857,74. Pendapatan diterima dimuka Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 meliputi pendapatan diterima dimuka dari Setda Biro Umum atas pemanfaatan bangunan kantin sebesar Rp587,328.77, dan pendapatan diterima dimuka dari BPKD atas pemanfaatan tanah di Ketahun sebesar Rp103.755.243,84.

Pendapatan diterima dimuka diperhitungkan karena adanya ikatan perjanjian yang masa jatuh temponya melewati tahun anggaran, sehingga dalam perhitungan LKPD diperhitungkan Cut Off per 31 Desember 2021, perhitungan dilakukan dengan cara memperhitungkan jumlah hari. Terdapat 1 bangunan/ruang dan 1 tanah yang merupakan sumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan jangka waktu perjanjian melebihi tahun anggaran dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5.110 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	No. Kontrak	Uraian	Jangka Waktu	Harga Sewa	TA 2021	TA 2020
1.	032/0670/B.6/2018 Tgl. 19Feb 2018	Pemanfaatan bangunan untuk Kantin	04/02/2018 sd 03/02/2022	6.125.000,00	587.328,77	587.328,77
2.	13/PA.01.02/CU/2021, Tanggal 22 Feb 2021	Pemanfaatan ruangan untuk ATM Bank Bengkulu	01/01/2021 sd 31/12/2023	7.500.000,00	0,00	342.465,75
3		Pemanfaatan Lahan di ketahun	14/04/2021 sd 13/04/2022	364.141.000,00	103.755.243,84	102.757.597,26
JUMLAH					104.342.572,61	103.687.391,78

2) Utang Belanja

Adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Saldo Utang Beban Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp1.127.506.114, menurun sebesar Rp19.980.261.668,00 atau 94,66% dari TA 2020 sebesar Rp21.107.767.782. Utang beban meliputi Utang Beban Air sebesar Rp115.271.900,00 Utang Beban Listrik sebesar Rp920.018.387,00, Utang beban Telpon sebesar Rp70.986.841,00,

Utang beban internet dan Fax sebesar Rp42.407.341,00, Utang Beban Air sebesar Rp94.058.675,00. Penurunan Utang Belanja tersebut diakibatkan tidak terdapat utang belanja TPP dan UM di TA 2021. Utang Belanja dimuat pada *Lampiran 12*.

3) Utang Jangka Pendek Lainnya

Merupakan kewajiban jangka pendek selain dari Utang kepada Pemerintah atau Lembaga Keuangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp350.847.087.187,34 menurun sebesar Rp46.203.540.509,18 atau 11,64% dari TA 2020 sebesar Rp397.050.627.696,52. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.111 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020
1	Utang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada kabupaten/kota untuk tahun berjalan	229.695.406.526,59	287.746.243.732,30
2	Utang RSUD dr. M. Yunus	40.183.984.163,74	31.971.264.511,65
3	Utang RSKJ Soeprapto	758.687.787,00	1.201.001.981,00
4	Jaminan Reklamasi	67.565.835.733,34	63.872.275.142,07
5	Utang pada Pihak Ketiga	12.714.347.894,77	12.259.842.329,50
	Jumlah	350.918.262.105,34	397.050.627.696,52

Masing-masing rincian dari Utang Jangka Pendek Lainnya diuraikan sebagai berikut.

- a) Utang Bagi Hasil Pajak Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp229.695.406.526,59 menurun sebesar Rp58.050.837.205,71 atau 20,17% dari TA 2020 sebesar Rp287.746.243.732,30. Utang Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan kewajiban pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Bengkulu kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa sebagian dari hasil penerimaan pajak provinsi diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi bersangkutan.

Utang Bagi Hasil Pajak Daerah diakui setelah diketahui adanya selisih antara realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan perhitungan Bagi Hasil Pajak Daerah yang seharusnya dibayarkan, kemudian ditetapkan dengan SK kepala daerah. Rincian dimuat pada *Lampiran 13*.

Realisasi Pembayaran Utang Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota di TA 2021 sebesar Rp287.746.243.716,00 atau 99,99% dari Utang Bagi Hasil Pajak TA 2020.

- b) Utang RSUD Dr. M. Yunus per 31 Desember 2021 sebesar Rp40.183.984.163,74 mengalami peningkatan sebesar Rp8.212.719.652,09 atau 20,44% dari TA 2020 sebesar

Rp31.977.314.011,65. Kewajiban tersebut terdiri dari kewajiban RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu kepada beberapa perusahaan atas pengadaan obat-obatan dan BMHP dan Utang lain-lain kepada Pihak ketiga yang dilaksanakan pada TA 2021 serta Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya pada PT Askes (Persero) terkait hibah bersyarat Ruang Kelas I (Penyelesaian/Pelunasan) sebesar Rp78.715.500,00 yang jatuh tempo pada tahun 2022.

Realisasi Pembayaran utang RSUD M Yunus TA 2020 di TA 2021 sebesar Rp31.851.264.511,65 atau 32,11%. Rincian dimuat pada **Lampiran 14**.

- c) Utang RSKJ Soeprato per 31 Desember 2021 sebesar Rp758.687.787,00 mengalami penurunan sebesar Rp442.314.194,00 atau 36,83% dari TA 2020 sebesar Rp1.201.001.981,00. Kewajiban tersebut terdiri dari kewajiban RSKJ Soeprato kepada beberapa perusahaan atas pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan yang dilaksanakan pada TA 2021 sebesar Rp252.059.787,00, dan sisa utang TA 2021 yang belum dibayarkan sebesar Rp506.628.000,00.
- d) Jaminan Reklamasi adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan reklamasi jika perusahaan pertambangan tidak melaksanakan reklamasi setelah berakhir izin pertambangannya sebesar Rp67.565.835.733,24 dapat dilihat pada **Lampiran 15**.
- e) Utang pada Pihak Ketiga, Saldo Utang Pada Pihak Ketiga Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp12.714.347.894,77 meningkat sebesar Rp454.505.565,27 atau 3,71% dari Utang Pada Pihak Ketiga Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2020 sebesar Rp12.259.842.329,50, Adapun rincian utang pada pihak ketiga per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

Tabel 5.112 Rincian Utang Pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	OPD	TA 2021	TA 2020
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00
2	RSUD M Yunus	0,00	0,00
3	Dinas PUPR	12.237.482.317,14	12.237.482.317,14
4	Dinas Pemuda dan Olah Raga	22.360.012,36	22.360.012,36
5	Biro Umum Setda Provinsi Bengkulu	294.973.434,27	0,00
6	Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu	159.532.131,00	0,00
7	Badan Penghubung	0,00	0,00
8	Dinas Pariwisata	0,00	0,00
9	BPKD	0,00	0,00
10	Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu	0,00	0,00
	Jumlah Utang	12.714.347.894,77	12.259.842.329,50

Utang pada Pihak Ketiga TA 2020 sebesar Rp12.259.842.329,50 tidak dilakukan realisasi pembayaran di TA 2021, sehingga nilai tersebut terakumulasi kedalam Utang pada Pihak Ketiga TA 2021.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman yang harus dilunasi dalam lebih dari satu tahun anggaran berikutnya. Kewajiban Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Bengkulu berupa Utang Dalam Negeri.

Saldo Utang Dalam Negeri per 31 Desember 2021 sebesar Nihil. Utang Dalam Negeri per 31 Desember 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp78.715.500,00 atau 100,00% dibandingkan dengan Utang Dalam Negeri per 31 Desember 2020 sebesar Rp78.715.500,00.

Utang tersebut timbul sehubungan dengan hibah bersyarat ruang kelas I berdasarkan Perjanjian Pendahuluan Nomor 049/2390/HK-RS/2010 tanggal 28 Juni 2010 dan Perjanjian Induk Nomor 049/2391/HK-RS/2010 tanggal 1 Juli 2010 antara RSUD Dr. M. Yunus dengan PT Askes (Persero) Cabang Bengkulu. Jumlah tersebut merupakan utang kepada PT Askes (Persero), yang jatuh tempo pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021.

5.3.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Saldo Ekuitas Pemerintah Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.257.538.991.861,35. Ekuitas TA 2021 meningkat sebesar Rp430.503.740.707,27 atau 7,39% dari Ekuitas TA 2020 sebesar Rp5.827.035.251.154,08.

5.4. Laporan Operasional (LO)

5.4.1. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Realisasi Pendapatan-LO Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp3.057.046.470.957,42 naik sebesar Rp221.349.500.299,05 atau 7,81% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LO TA 2020 sebesar Rp2.835.696.970.658,37.

Tabel 5.113 Pendapatan Daerah - LO TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Pendapatan – LO	Pendapatan – LO	Peningkatan/ Penurunan	%
		TA 2021	TA 2020		
1	Pendapatan Asli Daerah	979.060.446.499,42	776.399.975.343,37	202.660.471.156,05	26,10
2	Pendapatan Transfer	2.066.215.698.403,00	2.035.633.017.922,00	30.582.680.481,00	1,50
3	Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11.770.326.055,00	23.663.977.393,00	(11.893.651.338,00)	(50,26)
Jumlah		3.057.046.470.957,42	2.835.696.970.658,37	221.349.500.299,05	7,81

Realisasi Pendapatan – LO Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp3.057.046.470.957,42 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LRA TA 2021 berbasis Akrua sebesar Rp3.051.751.862.802,73 terdapat Selisih sebesar Rp5.294.608.154,69, nilai tersebut merupakan

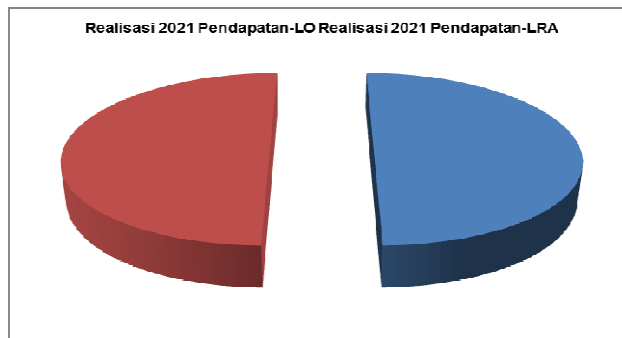
selisih dari realisasi penerimaan piutang TA 2020 dan pengakuan piutang TA 2021 yang tidak diakui sebagai Pendapatan – LO TA 2021, karena sudah diakui pada tahun anggaran sebelumnya, dan selisih dari pengakuan pendapatan diterima dimuka TA 2020 dan TA 2021 yang diakui sebagai Pendapatan – LO TA 2021.

Tabel 5.114 Rincian Pendapatan - LO di bandingkan dengan Pendapatan – LRA Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021		Selisih	%
		Pendapatan – LO	Pendapatan – LRA		
1	Pendapatan Asli Daerah	979.060.446.499,42	984.420.164.399,73	(5.359.717.900,31)	(0,54)
2	Pendapatan Transfer	2.066.215.698.403,00	2.066.215.698.403,00	0,00	0,00
3	Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah	11.770.326.055,00	1.116.000.000	10.654.326.055,00	954,69
Jumlah		3.057.046.470.957,42	3.051.751.862.802,73	5.294.608.154,69	(0,17)

Gambar 5.3 Rincian Pendapatan LO dengan Pendapatan LRA



Realisasi Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO sebesar Rp979.060.446.499,42, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.066.215.698.403,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp11.770.326.055,00.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp981.900.041.908,35 naik sebesar Rp205.500.066.564,98 atau 26,47% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2020 sebesar Rp776.399.975.343,37.

Tabel 5.115 Rincian Pendapatan Asli Daerah- LO TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pendapatan	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Peningkatan/ Penurunan	%
		PAD – LO	PAD – LO		
1.	Pendapatan Pajak Daerah	778.606.883.489,00	550.058.863.092,00	228.548.020.397,00	41,55

2.	Pendapatan Retribusi Daerah	3.734.241.835,00	3.012.491.912,39	721.749.922,61	23,96
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.008.414.699,73	109.563.806.293,39	(93.555.391.593,66)	(85,39)
4.	Lain – lain PAD yang Sah	183.550.501.884,62	113.764.814.045,59	69.785.687.839,03	61,34
Jumlah		981.900.041.908,35	776.399.975.343,37	205.500.066.564,98	26,47

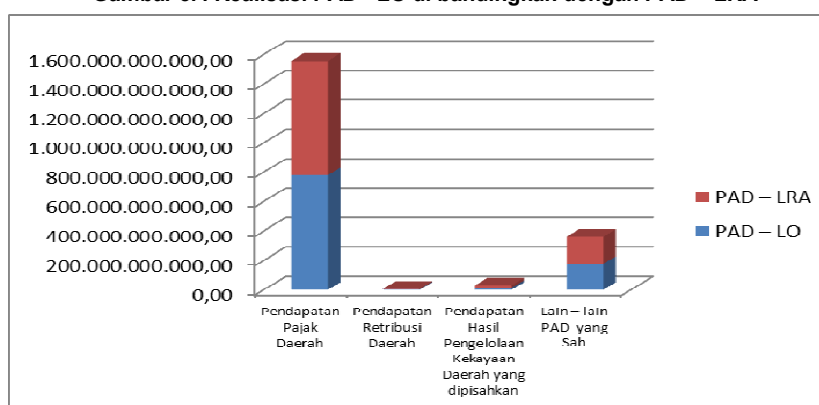
Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2020 sebesar Rp981.900.041.908,35 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA TA 2021 sebesar Rp984.420.164.399,73 terdapat selisih kurang sebesar Rp2.520.122.491,38, dari nilai tersebut sebesar Rp56.185.239,00 merupakan selisih lebih yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, sedangkan dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terdapat selisih kurang sebesar Rp1.116.783.590,31 dan dari Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp1.459.524.140,07.

Tabel 5.116 Rincian Pendapatan Asli Daerah- LO di bandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah – LRA TA 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Pendapatan	Realisasi 2021	Realisasi 2021	Selisih	%
		PAD – LO	PAD – LRA		
1.	Pendapatan Pajak Daerah	778.606.883.489,00	778.550.698.250,00	56.185.239,00	0,01
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	3.734.241.835,00	3.734.241.835,00	-	-
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16.008.414.699,73	17.125.198.290,04	(1.116.783.590,31)	(6,52)
4.	Lain – lain PAD yang Sah	183.550.501.884,62	185.010.026.024,69	(1.459.524.140,07)	(0,79)
Jumlah		981.900.041.908,35	984.420.164.399,73	(2.520.122.491,38)	(0,26)

Gambar 5.4 Realisasi PAD - LO di bandingkan dengan PAD – LRA



Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO sebesar Rp981.900.041.908,35 Meliputi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp778.606.883.489,00, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp3.734.241.835,00, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp16.008.414.699,73, dan Lain – lain PAD yang

Sah sebesar Rp183.550.501.884,62. Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2021 disampaikan sebagai berikut.

1) Pendapatan Pajak Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp778.606.883.489,00 naik sebesar Rp228.548.020.397,00 atau 41,55% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2020 sebesar Rp550.058.863.092,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan Pajak Daerah – LO		Peningkatan/ Penurunan	%
		TA 2021	TA 2020		
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	246.925.853.225,00	230.746.716.600,00	16.179.136.625,00	7,01
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	128.240.934.000,00	99.173.107.000,00	29.067.827.000,00	29,31
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	240.782.686.637,00	111.153.797.822,00	129.628.888.815,00	116,62
4.	Pajak Air Permukaan	10.133.365.139,00	7.876.649.380,00	2.256.715.759,00	28,65
5.	Pajak Rokok	152.524.044.488,00	101.108.592.290,00	51.415.452.198,00	50,85
Jumlah		778.606.883.489,00	550.058.863.092,00	228.548.020.397,00	41,55

Realisasi Pajak Daerah yang diterima per 31 Desember 2021 tidak sepenuhnya menjadi pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2021 yang dapat menambah ekuitas. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan piutang pajak TA 2020 di Tahun Anggaran 2021 sudah diakui sebagai Pendapatan Pajak Daerah - LO pada TA 2020, dan Pengakuan Piutang Pajak Daerah TA 2021 yang belum diterima realisasi pendapatannya sudah diakui sebagai Pendapatan Pajak Daerah TA 2021.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp778.606.883.489,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA sebesar Rp778.550.698.250,00 terdapat selisih sebesar Rp56.185.239,00 atau 0,01% .

Tabel 5.118 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		Selisih	%
		Pendapatan Pajak Daerah – LO	Pendapatan Pajak Daerah – LRA		
1.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	246.925.853.225,00	246.925.853.225,00	0	0
2.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	128.240.934.000,00	128.240.934.000,00	0	0
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	240.782.686.637,00	240.884.453.924,00	(101.767.287,00)	(0,04)
4.	Pajak Air Permukaan	10.133.365.139,00	9.975.412.613,00	157.952.526,00	1,58

5	Pajak Rokok	152.524.044.488,00	152.524.044.488,00	0	0
Jumlah		778.606.883.489,00	778.550.698.250,00	56.185.239,00	0,01

Berkenaannya dengan Selisih Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp56.185.239,00 merupakan selisih realisasi penerimaan di Tahun Anggaran 2021 terhadap Piutang Pendapatan TA 2020 yaitu sebesar (Rp101.767.287,00) ditambah dengan penambahan Piutang Pendapatan TA 2021 sebesar Rp157.952.526,00.

Tabel 5.119 Rincian Pengurangan dan Penambahan Pendapatan Pajak Daerah – LO Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Piutang TA 2021 Penambah Pendapatan Pajak Daerah – LO	Piutang TA 2020 Pengurangan Pendapatan Pajak Daerah – LO
1.	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	(101.767.287,00)
2.	Piutang pajak Air Permukaan	157.952.526,00	0,00
3.	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor	0,00	0,00
4.	Piutang Pajak Rokok	0,00	0,00
Jumlah		157.952.526,00	(101.767.287,00)
Jumlah Penambahan		-	56.185.239,00

2) Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp3.734.241.835,00 naik sebesar Rp721.749.922,61 atau 23,96% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA 2020 sebesar Rp3.012.491.912,39.

Tabel 5.120 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Pendapatan Retribusi Daerah – LO		Peningkatan/ Penurunan	%
		TA 2021	TA 2020		
1	Retribusi Jasa Umum	37.000.000,00	113.519.000,00	(76.519.000,00)	(67,41)
2	Retribusi Jasa Usaha	3.684.466.835,00	2.859.149.712,39	(2.859.149.712,39)	(100,00)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	12.775.000,00	39.823.200,00	(39.823.200,00)	(100,00)
Jumlah		3.734.241.835,00	3.012.491.912,39	721.749.922,61	23,96

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp3.734.241.835,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA TA. 2021 sebesar

Rp3.734.241.835,00 tidak terdapat Selisih antara Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO TA. 2021 dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA TA. 2021.

Tabel 5.121 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021		Selisih	%
		Pend. Retribusi Daerah – LO	Pend. Retribusi Daerah – LRA		
1	Retribusi Jasa Umum	37.000.000,00	37.000.000,00	-	-
2	Retribusi Jasa Usaha	3.684.466.835,00	3.684.466.835,00	-	-
3	Retribusi Perizinan Tertentu	12.775.000,00	12.775.000,00	-	-
Jumlah		3.734.241.835,00	3.734.241.835,00	-	-

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperoleh dari bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah oleh pemerintah daerah. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp16.008.414.699,73 turun sebesar Rp93.555.391.593,66 atau 85,39% dari TA 2020 sebesar Rp109.563.806.293,39.

Tabel 5.122 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan – LO		Peningkatan/ Penurunan	%
		TA 2021	TA 2020		
1	PT Bank Bengkulu	16.661.724.776,04	108.039.203.489,18	(91.377.478.713,14)	(84,58)
2	Penurunan Ekuitas PT. Bank Bengkulu	(999.410.562,67)	0,00	(999.410.562,67)	0,00
3	PT Sarana Mandiri Mukti	426.033.000,00	1.606.205.949,42	(1.180.172.949,42)	(73,48)
4	Peningkatan Ekuitas PT. Sarana Mandiri Mukti	337.867.318,79	0,00	337.867.318,79	0,00
4	PT Bengkulu Mandiri	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PT Askrida	37.440.514,00	37.620.459,00	(179.945,00)	(0,48)
6	PD Bimex	0,00	(119.223.604,21)	119.223.604,21	0,00
7	Penurunan Ekuitas PD. Bimex	(455.240.346,43)	0,00	(455.240.346,43)	0,00
Jumlah		16.008.414.699,73	109.563.806.293,39	(93.555.391.593,66)	(85,39)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp16.008.414.699,73 dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA TA. 2021 sebesar Rp17.125.198.290,04 terdapat selisih sebesar Rp1.116.783.590,31 atau 6,52%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan pendapatan-LO atas akumulasi penurunan ekuitas

penyertaan modal Pemerintah Provinsi Bengkulu pada PT. Bank Bengkulu sebesar Rp999.410.562,67 dan penurunan ekuitas PD. Bimex sebesar Rp455.240.346,43 serta peningkatan ekuitas PT. Sarana Mandiri Mukti sebesar Rp337.867.318,79.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp183.550.501.884,62 naik sebesar Rp69.785.687.839,03 atau 61,34% dari TA 2020 sebesar Rp113.764.814.045,59.

**Tabel 5.123 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO
TA 2021 dan 2020**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah – LO		Peningkatan/ Penurunan	%
		TA 2021	TA 2020		
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.400.000,00	0,00	100.400.000,00	100,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	380.913.284,93	0,00	380.913.284,93	100,00
3	Jasa Giro	4.449.339.517,00	2.056.641.186,00	2.392.698.331,00	116,34
4	Pendapatan Bunga	1.410.833.320,00	379.166.666,68	1.031.666.653,32	272,09
5	Penerimaan atas Tuntutan Kerugian Keuangan Daerah	0,00	(9.260.000,50)	9.260.000,50	(100,00)
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	27.334.889.508,60	0,00	27.334.889.508,60	100,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	916.320.610,69	1.065.802.999,44	(149.482.388,75)	(14,03)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.530.609.008,00	4.765.770.683,00	2.764.838.325,00	58,01
9	Pendapatan dari Pengembalian	1.507.058.221,00	10.314.771.170,23	(8.807.712.949,23)	(85,39)
10	Pendapatandari Penyelenggaraan dan Pendidikan Pelatihan	0,00	65.018.000,00	(65.018.000,00)	(100,00)
11	Pendapatan Angsuran /Cicilan/ Penjualan	0,00	680.644.599,00	(680.644.599,00)	(100,00)
12	Hasil dari Pemanfaatan kekayaan Daerah	0,00	26.125.000,00	(26.125.000,00)	(100,00)
13	Pendapatan BLUD	139.920.138.414,40	91.620.224.577,00	48.299.913.837,40	52,72
14	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	2.799.909.164,74	(2.799.909.164,74)	(100,00)
Jumlah		183.550.501.884,62	113.764.814.045,59	69.785.687.839,03	61,34

Realisasi Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp183.550.501.884,62 dibandingkan dengan realisasi Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA sebesar

Rp185.010.026.024,69 terdapat selisih sebesar Rp1.459.524.140,07 atau 0,79%. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan piutang lainnya TA 2020 di Tahun Anggaran 2021 sudah diakui sebagai Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada TA 2020 dan Pengakuan piutang lainnya TA 2021 yang belum diterima realisasi pendapatannya sudah diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO TA 2021.

Tabel 5.124 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LO dan LRA
Per 31 Desember 2021

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021		Selisih	%
		Lain-lain PAD yang Sah – LO	Lain-lain PAD yang Sah – LRA		
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	100.400.000,00	130.400.000,00	(30.000.000,00)	(23,01)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	380.913.284,93	381.226.000,00	(312.715,07)	(0,08)
3	Jasa Giro	4.449.339.517,00	4.449.339.517,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Bunga	1.410.833.320,00	1.410.833.320,00	0,00	0,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Kerugian Keuangan Daerah	0,00	18.000.000,00	(18.000.000,00)	(100,00)
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	27.334.889.508,60	27.435.289.508,60	(100.400.000,00)	(0,37)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	916.320.610,69	916.320.610,69	0,00	0,00
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.530.609.008,00	7.530.609.008,00	0,00	0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	1.507.058.221,00	1.586.656.121,00	(79.597.900,00)	(5,02)
10	Pendapatan BLUD	139.920.138.414,40	141.151.351.939,40	(1.231.213.525,00)	(0,87)
Jumlah		183.550.501.884,62	185.010.026.024,69	(1.459.524.140,07)	(0,79)

Berkenaan dengan Selisih lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp1.459.524.140,07 merupakan pengurangan terhadap realisasi Penerimaan Piutang lainnya TA 2020 di TA 2021 sebesar Rp26.328.611.808,00, pengurangan Realisasi Pendapatan diterima dimuka TA 2021 Per 31 Desember 2021 sebesar Rp104.342.572,61 dan pengurangan Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp79.597.900,00 serta penambahan Piutang Lainnya di TA 2021 sebesar Rp24.948.998.283,00 dan penambahan Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp104.029.857,54. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.125 Rincian Penambah dan Pengurang Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah– LO Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Pengurang-LO	Penambah-LO
1	Piutang Lainnya	26.328.611.808,00	24.948.998.283,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	104.342.572,61	104.029.857,54
3	Tagihan Jangka Panjang	79.597.900,00	0,00

Jumlah	26.512.552.280,61	25.053.028.140,54
Jumlah Selisih	-	(1.459.524.140,07)

b. Pendapatan Transfer (Transfer Pemerintah Pusat) – LO

Realisasi Pendapatan Transfer-LO TA 2021 sebesar Rp2.066.215.698.403,00, pendapatan tersebut naik sebesar Rp30.582.680.481,00 atau 1,50% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 sebesar Rp2.035.633.017.922,00. Rincian Pendapatan Transfer TA 2021 dan TA 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.126 Rincian Pendapatan Transfer TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Pendapatan Transfer		Peningkatan/ Penurunan	%
		TA 2021	TA 2020		
1	Dana Perimbangan	2.047.384.450.403,00	2.035.633.017.922,00	11.751.432.481,00	0,58
2	Dana Insentif Daerah (DID)	18.831.248.000,00	-	18.831.248.000,00	100,00
Jumlah		2.066.215.698.403,00	2.035.633.017.922,00	30.582.680.481,00	1,50

Realisasi Pendapatan Transfer - LO Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp2.066.215.698.403,00 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer - LRA TA 2021 sebesar Rp2.066.215.698.403,00 tidak terdapat perbedaan. Sehingga seluruh pendapatan Transfer LRA diakui sebagai pendapatan transfer - LO di Tahun Anggaran 2021.

**Tabel 5.127 Rincian Pendapatan transfer
(Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan) – LO dan LRA
Per 31 Desember 2021**

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Transfer	Anggaran 2020	Realisasi 2020	Peningkatan/ Penurunan	%
		PAD – LO	PAD – LRA		
1	Dana Perimbangan	2.047.384.450.403,00	2.047.384.450.403,00	-	-
2	Dana Insentif Daerah (DID)	18.831.248.000,00	18.831.248.000,00	-	-
Jumlah		2.066.215.698.403,00	2.066.215.698.403,00	-	-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO TA 2021 sebesar Rp11.770.326.055,00 turun sebesar Rp11.893.651.338,00 atau 50,26% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lainnya TA 2020 sebesar Rp23.663.977.393,00.

**Tabel 5.128 Rincian Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO
TA 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO		Peningkatan/ Penurunan	%
		TA 2021	TA 2020		
1	Pendapatan Hibah	11.770.326.055,00	23.663.977.393,00	(11.893.651.338,00)	(50,26)
2	Dana Darurat	-	-	-	-

3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
Jumlah		11.770.326.055,00	23.663.977.393,00	(11.893.651.338,00)	(50,26)

Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2020 sebesar Rp11.770.326.055,00, pendapatan tersebut mengalami perbedaan sebesar Rp10.654.326.055,00 atau 954,69% dibandingkan dengan realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA TA 2021 sebesar Rp1.116.000.000,00. Adapun rincian lain-lain pendapatan daerah yang Sah – LO dengan lain-lain pendapatan daerah yang Sah – LRA dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.129 Rincian Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dibandingkan dengan Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA TA 2021
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		Selisih	%
		Lain lain Pendapatan yang Sah – LO	Lain lain Pendapatan yang Sah – LRA		
1.	Pendapatan Hibah	11.770.326.055,00	1.116.000.000,00	10.654.326.055,00	954,69
2	Dana Darurat	-	-	-	-
3.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
Jumlah		11.770.326.055,00	1.116.000.000,00	10.654.326.055,00	954,69

Perbedaan ini diakibatkan adanya Pendapatan Hibah Tanah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp69.000.000,00 yang merupakan Hibah Tanah untuk SMKN 2 Kepahiang dari Pemerintah Kabupaten Kepahiang pada Tahun 2021 dengan Nomor BAST : 828/2054/BKD/BAST/KPH/2021, Nomor BAST : 032/2357/BPKD/2021, Tanggal 20 Agustus 2021. Dan Pendapatan Hibah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp10.585.326.055,00, yang merupakan Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang bersumber dari Hibah Kementerian PUPR Tahun 2021 dengan Nomor BAST : 230.1/BA/DC/2021, Tanggal 04 Januari 2021 sebesar Rp3.489.670.340,00 dan Nomor BAST : 230.1/BA/DC/2021, Tanggal 04 Januari 2021 lokasi Pasir Putih Pantai Panjang.

5.4.2. Beban Daerah – LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Realisasi Beban Daerah – LO Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp2.732.034.311.470,38 naik sebesar Rp52.261.984.001,87 atau 1,95% dari Realisasi Beban Daerah – LO Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2020 sebesar Rp2.679.772.327.468,51.

Tabel 5.130 Rincian Beban Daerah- LO TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian Pendapatan	Realisasi 2021 Beban – LO	Realisasi 2020 Beban – LO	Peningkatan/ Penurunan	%
1.	Beban Operasi	2.360.512.631.281,79	2.427.698.341.794,16	(67.185.710.512,37)	(2,77)
2.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	371.521.680.188,59	250.280.303.226,35	121.241.376.962,24	48,44
3.	Beban Transfer Bantuan keuangan lainnya	0,00	1.793.682.448,00	(1.793.682.448,00)	(100,00)
	Jumlah	2.732.034.311.470,38	2.679.772.327.468,51	52.261.984.001,87	1,95

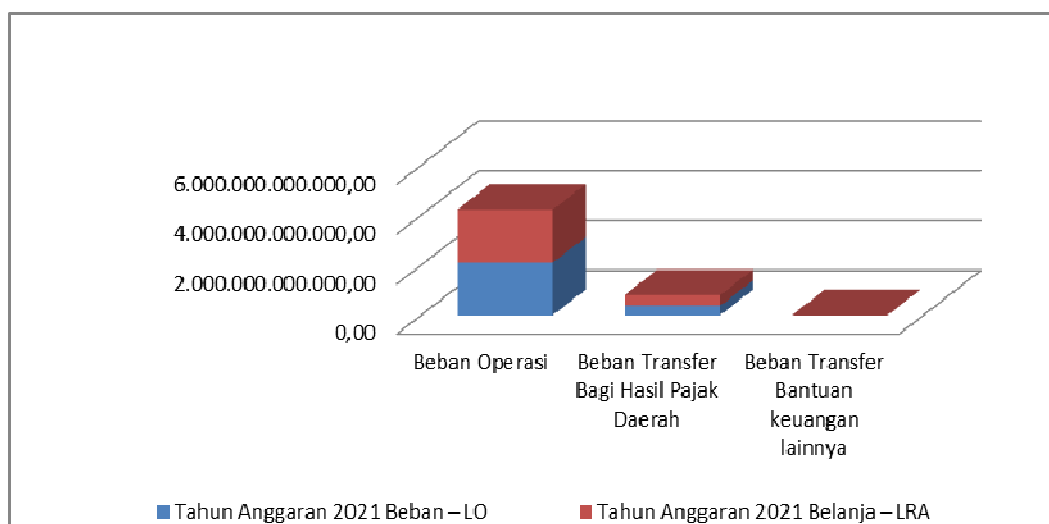
Realisasi Beban Daerah – LO Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp2.732.034.311.470,38 dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah – LRA TA 2021 Rp2.550.183.022.567,51 tidak termasuk Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga masing-masing sebesar Rp324.342.084.410,29 dan Rp5.699.939.753,00 terdapat selisih sebesar Rp181.851.288.900,88 yang merupakan Beban yang sudah diakui walaupun belum dilakukan Realisasi Belanja di TA 2021.

Tabel 5.131 Rincian Beban- LO di bandingkan dengan Belanja– LRA Tahun Anggaran 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2021		Selisih	%
		Beban – LO	Belanja – LRA		
1.	Beban Operasi	2.360.512.631.281,79	2.120.610.505.189,51	239.902.126.092,28	11,31
2.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	371.521.680.188,59	429.572.517.378,00	(58.050.837.189,41)	(13,51)
3	Beban Transfer Bantuan keuangan lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	2.732.034.311.470,38	2.550.183.022.567,51	181.851.288.902,87	7,13

Gambar 5.5.Rincian Beban LO dengan Beban LRA



Realisasi Beban – LO tersebut bersumber dari Beban Operasi - LO sebesar Rp2.360.512.631.281,79 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah – LO sebesar Rp371.521.680.188,59. Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi Beban – LO disampaikan sebaga berikut :

a. Beban Operasi – LO

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Realisasi Beban Operasi – LO TA 2021 sebesar Rp2.360.512.631.281,79 turun sebesar Rp67.185.710.512,37 atau 2,77% dari Realisasi Beban Operasi – LO TA 2020.

Tabel 5.132 Rincian Beban Operasi– LO Per 31 Desember 2021
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Beban Operasi – LO		Peningkatan/ Penurunan	%
		TA 2021	TA 2020		
1	Beban Pegawai – LO	1.077.530.527.296,40	1.079.656.910.879,00	(2.126.383.582,60)	(0,20)
2	Beban Barang dan Jasa – LO	689.001.136.851,94	587.322.280.466,36	101.678.856.385,58	17,31
3	Beban Hibah	337.271.451.880,00	512.649.683.144,00	(175.378.231.264,00)	(34,21)
4	Beban Bantuan Sosial	98.980.000,00	0,00	98.980.000,00	100,00
5	Beban Penyisihan Piutang	(110.320.000,00)	33.480.000,00	(143.800.000,00)	(429,51)
6	Beban Lain-lain	0,00	1.716.960.916,08	(1.716.960.916,08)	(100,00)
7	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	164.421.117.322,17	152.070.952.434,09	12.350.164.888,08	8,12
8	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.558.374.321,00	31.837.276.117,00	721.098.204,00	2,26
9	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	58.844.132.600,00	57.940.830.946,00	903.301.654,00	1,56
10	Beban Penyusutan Aset Lainnya	372.605.360,28	3.621.112.641,63	(3.248.507.281,35)	(89,71)
11	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	524.625.650,00	908.854.250,00	(384.228.600,00)	(42,28)
	Jumlah	2.360.512.631.281,79	2.427.758.341.794,16	(67.245.710.512,37)	(2,77)

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain-lain, Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi, Beban Penyusutan Aset Lainnya, Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Realisasi Beban Operasi – LO TA 2021 sebesar Rp2.360.512.631.281,79 dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi–LRA TA 2021 Rp2.120.610.505.189,51 terdapat perbedaan sebesar Rp239.902.126.092,28. Nilai tersebut merupakan Beban yang sudah diakui walaupun realisasi Belanja Operasi – LRA belum dilakukan di TA 2021.

Tabel 5.133 Rincian Beban Operasi – LO di bandingkan dengan Belanja Operasi – LRA TA 2021
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		Selisih
		Beban Operasi – LO	Belanja Operasi – LRA	
1	Beban Pegawai – LO	1.077.530.527.296,40	1.097.398.109.416,40	(19.867.582.120,00)
2	Beban Barang dan Jasa – LO	689.001.136.851,94	685.841.963.893,11	3.159.172.958,83
3	Beban Hibah	337.271.451.880,00	337.271.451.880,00	0,00
4	Beban Bantuan Sosial	98.980.000,00	98.980.000,00	0,00

5	Beban Penyisihan Piutang	(110.320.000,00)	0,00	(110.320.000,00)
6	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00
7	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	164.421.117.322,17	0,00	164.421.117.322,17
8	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.558.374.321,00	0,00	32.558.374.321,00
9	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	58.844.132.600,00	0,00	58.844.132.600,00
10	Beban Penyusutan Aset Lainnya	372.605.360,28	0,00	372.605.360,28
11	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	524.625.650,00	0,00	524.625.650,00
	Jumlah	2.360.512.631.281,79	2.120.610.505.189,51	239.902.126.092,28

1) Beban Pegawai - LO

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Beban Pegawai – LO Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp1.077.530.527.296,40 turun sebesar Rp2.126.383.582,60 atau 0,20% dari Realisasi Beban Pegawai – LO TA 2020 sebesar Rp1.079.656.910.879,00.

Tabel 5.134 Rincian Beban Pegawai - LO TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2021	TA 2020	Peningkatan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	696.245.777.034,40	715.183.202.088,00	(18.937.425.053,60)	(2,65)
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	178.738.529.722,00	340.505.856.098,00	(161.767.326.376,00)	(47,51)
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	163.912.706.953,00	0,00	163.912.706.953,00	100,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	29.349.463.120,00	0,00	29.349.463.120,00	100,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	242.595.820,00	0,00	242.595.820,00	100,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.579.121.401,00	1.187.500.134,00	391.621.267,00	32,98
7	Beban Pegawai BOS	2.699.046.000,00	0,00	2.699.046.000,00	100,00
8	Belanja BLUD Rumah Sakit	4.763.287.246,00	5.070.454.659,00	(307.167.413,00)	(6,06)
9	Beban Uang Lembur	0,00	24.588.000,00	(24.588.000,00)	(100,00)
10	Honorarium PNS	0,00	17.685.309.900,00	(17.685.309.900,00)	(100,00)
11	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.077.530.527.296,40	1.079.656.910.879,00	(2.126.383.582,60)	(0,20)

Realisasi Beban Pegawai – LO Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp1.077.530.527.296,40 lebih kecil dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai – LRA sebesar Rp1.097.398.109.416,40, terdapat selisih sebesar Rp19.867.582.120,00. Hal ini disebabkan karena adanya pengakuan Beban TPP dan beban uang makan TA 2020 yang sudah direalisasikan di TA 2021 sebesar Rp19.867.582.120,00

Tabel 5.135 Rincian Beban Pegawai - LO Per 31 Desember 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun Anggaran 2021		Selisih
		Beban Pegawai – LO	Belanja Pegawai – LRA	
1	Beban Gaji dan Tunjangan	696.245.777.034,40	696.245.777.034,40	0,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	178.738.529.722,00	198.606.111.842,00	(19.867.582.120,00)
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	163.912.706.953,00	163.912.706.953,00	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	29.349.463.120,00	29.349.463.120,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	242.595.820,00	242.595.820,00	0,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.579.121.401,00	1.579.121.401,00	0,00
7	Beban Pegawai BOS	2.699.046.000,00	2.699.046.000,00	0,00
8	Belanja BLUD Rumah Sakit	4.763.287.246,00	4.763.287.246,00	0,00
9	Beban Uang Lembur	0,00	0,00	0,00
10	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00
11	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.077.530.527.296,40	1.097.398.109.416,40	(19.867.582.120,00)

2) Beban Barang dan Jasa – LO

Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Realisasi Beban Barang dan Jasa – LO Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp689.001.136.851,94 naik sebesar Rp101.678.856.385,58 atau 17,31% dari Realisasi Beban Barang dan Jasa – LO TA 2020 sebesar Rp587.322.280.466,36.

Tabel 5.136 Rincian Beban Barang dan Jasa– LO TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Beban – LO TA.2021	Beban – LO TA.2020	Peningkatan/ Penurunan	%
	Beban Persediaan				
1	Beban Barang Pakai Habis	124.926.458.765,60	15.890.772.812,68	109.035.685.952,92	686,16
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
3	Beban Persediaan Bahan/ Material	0,00	42.037.522.390,97	(42.037.522.390,97)	(100,00)
4	Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	7.637.898.238,00	(7.637.898.238,00)	(100,00)
5	Beban Barang dan Jasa Boss	85.402.476.268,54	79.305.399.341,00	6.097.076.927,54	7,69
	Beban Jasa				
1	Beban Jasa Kantor	185.287.217.505,15	148.963.723.090,00	36.323.494.415,15	24,38

No.	Uraian	Beban – LO TA.2021	Beban – LO TA.2020	Peningkatan/ Penurunan	%
2	Beban Jasa Konsultasi	0,00	4.373.605.235,47	(4.373.605.235,47)	(100,00)
3	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.377.943.175,00	0,00	2.377.943.175,00	100,00
4	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	750.540.000,00	0,00	750.540.000,00	100,00
5	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	30.697.013.097,26	6.966.044.252,38	23.730.968.844,88	340,67
6	Beban Belanja Jasa Pemenangan Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.727.504.629,21	1.030.339.556,62	2.697.165.072,59	261,77
8	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.567.148.264,00	0,00	2.567.148.264,00	100,00
9	Beban Sewa Alat Berat	0,00	2.703.000.000,00	(2.703.000.000,00)	(100,00)
10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	941.093.100,00	(941.093.100,00)	(100,00)
11	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	77.765.000,00	0,00	77.765.000,00	100,00
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.411.159.800,00	3.849.868.357,00	(1.438.708.557,00)	(37,37)
	Beban Pemeliharaan				
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	9.364.449.004,00	(9.364.449.004,00)	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan	0,00	19.109.760.957,84	(19.109.760.957,84)	(100,00)
3	Beban Pemeliharaan Tanah	155.880.160,00	0,00	155.880.160,00	100,00
4	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.472.924.113,99	0,00	8.472.924.113,99	100,00
5	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.235.257.323,91	0,00	29.235.257.323,91	100,00
6	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.700.767.706,00	0,00	12.700.767.706,00	100,00
7	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	495.895.865,00	0,00	495.895.865,00	100,00
	Beban Perjalanan Dinas				
1	Beban Perjalanan Dinas	97.050.783.491,00	96.986.146.506,00	64.636.985,00	0,07
2	Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	350.970.000,00	(350.970.000,00)	(100,00)
	Beban barang Lainnya				
1	Beban Makanan dan Minuman	0,00	24.026.711.318,00	(24.026.711.318,00)	(100,00)
2	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	2.479.365.150,00	(2.479.365.150,00)	(100,00)
3	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	51.500.000,00	(51.500.000,00)	(100,00)
4	Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	3.935.697.953,00	678.646.000,00	3.257.051.953,00	479,93
5	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.482.734.424,44	0,00	2.482.734.424,44	100,00
6	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	0,00	30.960.826.807,47	(30.960.826.807,47)	(100,00)
7	Beban Barang Untuk Dijual Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Penangan Perkara	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Beban Belanja Jasa Fasilitas Rekrutmen Calon ASN	0,00	35.700.000,00	(35.700.000,00)	(100,00)
10	Beban Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	96.244.469.309,84	89.578.938.348,93	6.665.530.960,91	7,44
	Jumlah	689.001.136.851,94	587.322.280.466,36	101.678.856.385,58	17,31

Realisasi Beban Barang dan Jasa – LO Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp689.001.136.851,94 dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA sebesar Rp685.841.963.893,11 terdapat perbedaan sebesar Rp3.159.172.958,83. Rincian Beban Barang dan Jasa – LO TA 2021 dan Belanja Barang dan Jasa-LRA TA. 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.137 Rincian Beban Barang dan Jasa – LO dan Belanja Barang dan Jasa - LRA TA 2021

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Beban – LO TA.2021	Belanja – LRA TA.2021	Selisih
	Beban Persediaan			
1	Beban Barang Pakai Habis	124.926.458.765,60	105.806.868.105,38	19.119.590.660,22
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3	Beban Persediaan Bahan/ Material	0,00	0,00	0,00
4	Beban Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
5	Beban Barang dan Jasa Boss	85.402.476.268,54	85.510.904.000,00	(108.427.731,46)
	Beban Jasa			
1	Beban Jasa Kantor	185.287.217.505,15	184.389.830.983,15	897.386.522,00
2	Beban Jasa Konsultasi	0,00	0,00	0,00
3	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	2.377.943.175,00	21.006.616.056,95	(18.628.672.881,95)
4	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	750.540.000,00	750.540.000,00	0,00
5	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	30.697.013.097,26	30.701.094.386,00	(4.081.288,74)
6	Beban Belanja Jasa Pemenangan Perkara	0,00	0,00	0,00
7	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	3.727.504.629,21	3.716.186.821,00	11.317.808,21
8	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.567.148.264,00	2.567.148.264,00	0,00
9	Beban Sewa Alat Berat	0,00	0,00	0,00
10	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00
11	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	77.765.000,00	77.765.000,00	0,00
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.411.159.800,00	2.411.159.800,00	0,00
	Beban Pemeliharaan			
1	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Tanah	155.880.160,00	43.200.000,00	112.680.160,00
4	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.472.924.113,99	6.007.258.862,00	2.465.665.251,99
5	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.235.257.323,91	31.995.472.063,79	(2.760.214.739,88)
6	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.700.767.706,00	12.700.767.706,00	0,00

No	Uraian	Beban – LO TA.2021	Belanja – LRA TA.2021	Selisih
7	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	495.895.865,00	495.895.865,00	0,00
	Beban Perjalanan Dinas			
1	Beban Perjalanan Dinas	97.050.783.491,00	97.050.783.491,00	0,00
2	Beban Sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	0,00
	Beban barang Lainnya			
1	Beban Makanan dan Minuman	0,00	0,00	0,00
2	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	0,00	0,00
3	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00
4	Beban Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	3.935.697.953,00	3.935.697.953,00	0,00
5	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.482.734.424,44	186.098.000,00	2.296.636.424,44
6	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
7	Beban Barang Untuk Dijual Kepada Masyarakat/pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00
8	Beban Penangan Perkara	0,00	0,00	0,00
9	Beban Belanja Jasa Fasilitas Rekrutmen Calon ASN	0,00	0,00	0,00
10	Beban Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit	96.244.469.309,84	96.487.176.535,84	(242.707.226,00)
	Jumlah	689.001.136.851,94	685.841.963.893,11	3.159.172.958,83

Tabel 5.138 Rincian Selisih Penambah Beban Barang dan Jasa – LO dan Pengurang Beban Barang dan Jasa – LO TA. 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Penambah Beban LO	Pengurang Beban LO	Selisih
1	Beban Persediaan			
	Beban Barang Pakai Habis			
	Persediaan TA. 2020	84.028.534.083,40	0,00	
	Persediaan TA. 2021	0,00	66.193.354.563,18	
	Jumlah	84.028.534.083,40	66.193.354.563,18	17.835.179.520,22
	Beban Barang dan Jasa Boss			
	Beban Barjas BOS yang Menjadi ATL	0,00	55.132.731,46	
	Jumlah	0,00	55.132.731,46	(55.132.731,46)
2	Beban Jasa			
	Beban Jasa Kantor			
	Pembayaran Beban Listrik, Air, Telepon TA. 2021	1.085.098.773,00	1.229.556.298,00	
	Beban Jasa Fax/Internet TA. 2021	42.407.341,00	10.629.364,00	
	Jumlah	1.127.506.114,00	1.240.185.662,00	(112.679.548,00)

No.	Uraian	Penambah Beban LO	Pegurang Beban LO	Selish
3	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi			
	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi yang menjadi AT Peralatan dan Gedung bangunan	0,00	5.759.290.442,00	
	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi yang menjadi AT JIJ	0,00	223.926.500,00	
	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi yang menjadi AT Gedung, JIJ dan ATL	0,00	12.073.312.175,38	
	Aset Tetap JIJ dan KDP	0,00	572.143.764,57	
	Jumlah	0,00	18.628.672.881,95	(18.628.672.881,95)
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi			
	beban dibayar dimuka T.A. 2021	146.719.935,62	0,00	
	Beban dibayar dimuka Asuransi BMD T.A. 2021	0,00	150.801.224,36	
	Jumlah	146.719.935,62	150.801.224,36	(4.081.288,74)
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir			
	Beban Sewa dibayar dimuka T.A. 2021	87.632.876,71	0,00	
	Beban dibayar dimuka Sewa gedung T.A. 2021	0,00	76.315.068,50	
	Jumlah	87.632.876,71	76.315.068,50	11.317.808,21
6	Beban Pemeliharaan			
	Beban Pemeliharaan Tanah			
	AT Tanah yang menjadi Beban ekspense Pemeliharaan Tanah	112.680.160,00	0,00	
	Jumlah	112.680.160,00	0,00	112.680.160,00
7	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
	AT TA. 2021 menjadi ekstrakom	701.879.169,10	0,00	
	AT TA. 2021 menjadi ekspends	1.756.786.082,89	0,00	
	AT TA. 2021 gedung bangunan menjadi ekspends	7.000.000,00	0,00	
	Jumlah	2.465.665.251,99	0,00	2.465.665.251,99
8	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
	Beban AT Gedung dan Bangunan Menjadi Beban Pemeliharaan (Ekspense)	192.955.000,00	0,00	
	Beban AT Gedung dan Bangunan Menjadi Beban Extracom	9.500.000,00	0,00	
	Barjas Pemeliharaan yang menjadi AT Gedung dan Bangunan	0,00	157.732.257,00	
	Beban Jasa Konsultasi dan Pemeliharaan gedung dan Bangunan yang menjadi AT gedung dan bangunan	0,00	168.838.099,88	

No.	Uraian	Penambah Beban LO	Pegurang Beban LO	Selish
	Pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi AT peralatan mesin dan gedung bangunan	0,00	218.735.170,00	
	Barjas pemeliharaan gedung dan bangunan menjadi AT gedung bangunan dan ATL	0,00	236.691.400,00	
	Beban jasa pemeliharaan gedung dan bangunan yang menjadi AT peralatan mesin dan gedung bangunan	0,00	2.180.672.813,00	
	Jumlah	202.455.000,00	2.962.669.739,88	(2.760.214.739,88)
9	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
	Beban Barang yang akan di serahkan kepada Masyarakat TA. 2021	2.296.636.424,44	2.296.636.424,44	
	Jumlah	2.296.636.424,44	0,00	2.296.636.424,44
10	Beban Barang dan Jasa BLUD Rumah Sakit			
	Realisasi Pembayaran Utang Jangka Pendek TA. 2021	0,00	494.767.013,00	
	Pembentukan Utang Jangka Pendek TA. 2021	252.059.787,00	0,00	
	Jumlah	252.059.787,00	494.767.013,00	(242.707.226,00)
	Selish Lebih			917.990.748,83

3) Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Realisasi Beban Hibah-LO TA 2021 sebesar Rp337.271.451.880,00 turun sebesar Rp175.378.231.264,00 atau 34,21% dari Realisasi Beban Hibah-LO TA 2020 sebesar Rp512.649.683.144,00.

Tabel 5.139 Rincian Beban Hibah – LO TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2021 Beban Hibah – LO	Realisasi 2020 Beban Hibah – LO	Peningkatan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah	337.271.451.880,00	512.649.683.144,00	(175.378.231.264,00)	(34,21)
	Jumlah	337.271.451.880,00	512.649.683.144,00	(175.378.231.264,00)	(34,21)

Pemerintah Provinsi Bengkulu merealisasikan Beban Hibah-LO TA 2021 sebesar Rp337.271.451.880,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah-LRA TA 2021 sebesar Rp337.271.451.880,00 tidak terdapat perbedaan.

Tabel 5.140 Rincian Beban Hibah – LO di bandingkan dengan Belanja Hibah – LRA TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2021	Selisih
		Beban Hibah – LO	Belanja Hibah LRA	
1	Beban Hibah	337.271.451.880,00	337.271.451.880,00	0,00

Jumlah	337.271.451.880,00	337.271.451.880,00	0,00
--------	--------------------	--------------------	------

4) Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO TA 2021 sebesar Rp524.625.650,00 turun sebesar Rp245.794.400.738,72 atau 99,79% dari Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO TA 2020.

Tabel 5.141 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Peningkatan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Aset Tetap	0,00	245.410.172.138,72	(245.410.172.138,72)	(100,00)
2	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	524.625.650,00	908.854.250,00	(384.228.600,00)	(42,28)
Jumlah		524.625.650,00	246.319.026.388,72	(245.794.400.738,72)	(99,79)

Pemerintah Provinsi Bengkulu merealisasikan Beban Penyusutan dan Amortiasi-LO TA 2021 Rp524.625.650,00 rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi LO adalah sebagai berikut:

Tabel 5.142 Rincian Penambah Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Penambah Beban – LO TA.2021
1	Beban Penyusutan Aset Tetap	0,00
2	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	524.625.650,00
Jumlah		524.625.650,00

5) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang. Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2021 sebesar Rp110.320.000,00 turun sebesar Rp143.800.000,00 atau 429,51% dari Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2020 sebesar Rp33.480.000,00.

Tabel 5.143 Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Beban Penyisihan Piutang		Peningkatan/ Penurunan	%
		TA 2021	TA 2020		
1	Beban Penyisihan Piutang	(110.320.000,00)	33.480.000,00	(143.800.000,00)	(429,51)
Jumlah		(110.320.000,00)	33.480.000,00	(143.800.000,00)	(429,51)

Realisasi Beban Penyisihan Piutang TA 2021 sebesar Rp110.320.000,00 yang merupakan pengurangan Penyisihan Piutang di TA 2021.

Tabel 5.144 Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2021
		Beban Penambahan Penyisihan – LO	Beban pengurangan penyisihan –LO
1	Beban Penyisihan Piutang dikarenakan adanya pelunasan pembayaran Tagihan Penjualan Angsuran kendaraan	0,00	110.320.000,00
	Jumlah	0,00	110.320.000,00
	Jumlah	-	(110.320.000,00)

6) Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan seluruh beban yang tidak ada hubungan secara langsung dan pasti dengan kegiatan operasi Pemerintah Provinsi Bengkulu, namun merupakan bagian dari beban operasi. Realisasi Beban Lain-lain TA 2021 sebesar nihil.

7) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah – LO TA 2021 sebesar Rp371.521.680.188,59 naik sebesar Rp121.241.376.962,24 atau 48,44% dari Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah – LO TA 2020 sebesar Rp250.280.303.226,35.

Tabel 5.145 Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah – LO TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah - LO		Peningkatan/ Penurunan	%
		TA 2021	TA 2020		
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	371.521.680.188,59	250.280.303.226,35	121.241.376.962,24	48,44
	Jumlah	371.521.680.188,59	250.280.303.226,35	121.241.376.962,24	48,44

Realisasi Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah – LO TA 2021 sebesar Rp371.521.680.188,59 dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer - LRA TA 2021 sebesar Rp429.572.517.378,00 terdapat selisih sebesar Rp58.050.837.189,41.

Tabel 5.146 Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah – LO TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		Selisih	%
		Beban Transfer BHPD – LO	Belanja Transfer BHPD – LRA		
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	371.521.680.188,59	429.572.517.378,00	(58.050.837.189,41)	(13,51)
	Jumlah	371.521.680.188,59	429.572.517.378,00	(58.050.837.189,41)	(13,51)

Tabel 5.147 Rincian Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah – LO TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2021
-----	--------	----------------

		Beb an Transfer – LO
1.	Utang Bagi Hasil Pajak Daerah Kab/Kota TA. 2020	287.746.243.716,00
2.	Utang Bagi Hasil Pajak Daerah Kab/Kota TA. 2021	229.695.406.526,59
	Jumlah	(58.050.837.189,41)

8) Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan - LO TA. 2021 sebesar nihil, turun sebesar Rp1.793.682.448,00 atau 100,00% dari Realisasi Beban Transfer Bantuan Keuangan - LO TA. 2020 sebesar Rp1.793.682.448,00.

Tabel 5.148 Rincian Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya – LO TA 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Peningkatan/ Penurunan	%
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	1.793.682.448,00	(1.793.682.448,00)	(100,00)
	Jumlah	0,00	1.793.682.448,00	(1.793.682.448,00)	(100,00)

b. Beban Tidak Terduga

Beban luar biasa terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Realisasi Beban Tidak Terduga – LO TA 2021 sebesar Rp2.460.786.961,00 dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga - LRA TA 2021 sebesar Rp5.699.939.753,00 terdapat selisih sebesar Rp3.239.152.792,00.

Tabel 5.149 Rincian Beban Tidak Terduga – LO TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2021		Selisih	%
		Beban Tidak Terduga – LO	Belanja Tidak Terduga – LRA		
1	Beban Tidak Terduga	2.460.786.961,00	5.699.939.753,00	(3.239.152.792,00)	(56,83)
	Jumlah	2.460.786.961,00	5.699.939.753,00	(3.239.152.792,00)	(56,83)

Tabel 5.150 Rincian Beban Tidak Terduga – LO TA 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2021 Beban Tidak Terduga – LO
1.	BTT menjadi Beban peralatan kesehatan / Laboratorium	626.786.722,00
2.	BTT menjadi Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	586.170.000,00
3.	BTT menjadi Beban Jasa Petugas Penanganan Covid-19	1.010.066.070,00
4.	BTT menjadi AT Peralatan dan Mesin	1.016.130.000,00
	Jumlah	3.239.152.792,00

5.4.1. Surplus/Defisit – LO

Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalami Surplus / Defisit – LO TA 2021 dari Pendapatan – LO dikurangi Beban – LO sebesar Rp325.390.967.934,97 naik sebesar Rp169.466.324.745,11 atau 108,68% dari Surplus / Defisit – LO TA 2020 sebesar Rp Rp155.924.643.189,86. Sedangkan Surplus / Defisit – LRA TA 2021 sebesar Rp171.526.816.071,93 perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan Pengakuan baik dari Pendapatan Akrua dan Beban Akrua dengan Realisasi Penerimaan dan Belanja Berbasis Kas.

5.5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Laporan Arus Kas ini disusun termasuk arus kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. M. Yunus dan RSKJ Soeprato, Secara singkat pergerakan kas Pemerintah Provinsi Bengkulu selama Tahun 2021, sebagai berikut.

5.5.1. Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

a. Arus Kas Masuk

Berdasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga pada TA 2021 terdapat perubahan pada jenis Arus Kas Masuk. Total Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi periode 01 Januari sd 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.051.621.462.802,73 naik sebesar Rp 264.693.426.594,82 atau 9,50% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp2.786.928.036.207,91 yang terdiri dari:

Tabel 5.151 Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
I	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
	Arus Kas Masuk		
	Penerimaan Pajak Daerah	778.550.698.250,00	561.784.480.872,00
	Penerimaan Retribusi Daerah	3.734.241.835,00	3.007.003.756,00
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17.125.198.290,04	14.669.299.693,56
	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	184.879.626.024,69	132.884.764.280,35
	Penerimaan Dana Bagi Hasil	83.245.032.380,00	71.140.797.650,00
	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.213.764.868.000,00	1.219.949.535.000,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik	177.195.802.118,00	136.449.090.558,00

Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik	573.178.747.905,00	625.770.945.398,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	18.831.248.000,00	0,00
Penerimaan Hibah	1.116.000.000,00	20.156.119.000,00
Penerimaan Dari Pendapatan Lainnya	0,00	1.116.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	3.051.621.462.802,73	2.786.928.036.207,91

Total arus kas masuk dari aktivitas operasi tahun 2021 bila dibandingkan dengan total pada LRA tahun 2021 terdapat perbedaan sebesar Rp130.400.000,00 yaitu pada Arus Kas dari Aktivitas Investasi.

1) Penerimaan Pajak Daerah

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Pajak Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp778.550.698.250,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp561.784.480.872,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.152 Arus Kas Masuk Penerimaan Pajak Daerah TA 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Pajak Kendaraan Bermotor	246.925.853.225,00	230.746.716.600,00
2	Bea Balik Nama Kend Bermotor	128.240.934.000,00	99.173.107.000,00
3	Pajak Bahan Bakar Kend Bermotor	240.884.453.924,00	122.462.644.744,00
4	Pajak Air Permukaan	9.975.412.613,00	8.293.420.238,00
5	Pajak Rokok	152.524.044.488,00	101.108.592.290,00
Jumlah		778.550.698.250,00	561.784.480.872,00

2) Penerimaan Retribusi Daerah

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Retribusi Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp3.734.241.835,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp3.007.003.756,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.153 Arus Kas Masuk Penerimaan Retribusi Daerah TA 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Retribusi Jasa Umum	37.000.000,00	2.219.000,00
2	Retribusi Pengganti Cetak Peta	0,00	111.300.000,00
3	Retribusi Jasa Usaha	3.684.466.835,00	0,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	1.074.264.056,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa	0,00	479.735.000,00
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	0,00	286.197.000,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi	0,00	157.535.500,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	855.930.000,00

9	Retribusi Pelayanan dan Perizinan Usaha Perikanan	0,00	13.920.000,00
10	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	0,00	25.903.200,00
11	Retribusi Perizinan Tertentu	12.775.000,00	0,00
Jumlah		3.734.241.835,00	3.007.003.756,00

3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Arus Kas Masuk dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp17.125.198.290,04 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp14.669.299.693,56 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.154 Arus Kas Masuk Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2020
1.	PT Bank Bengkulu	16.661.724.776,04	14.110.759.619,56
2.	PT Sarana Mandiri Mukti	426.033.000,00	520.919.615,00
4.	PT Askrida	37.440.514,00	37.620.459,00
Jumlah		17.125.198.290,04	14.669.299.693,56

4) Penerimaan Lain-lain PAD yang sah

Arus Kas Masuk dari Lain-lain PAD yang sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp184.879.626.024,69 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp132.881.495.630,35 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.155 Arus Kas Masuk Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah TA 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak dipisahkan	381.226.000,00	0,00
2	Jasa Giro	4.449.339.517,00	2.056.641.186,00
3	Pendapatan Bunga	1.410.833.320,00	379.166.666,68
4	Penerimaan Atas TGR Keuangan Daerah	18.000.000,00	17.500.000,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	27.438.148.208,60	0,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	916.320.610,69	1.065.802.999,44
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	7.530.609.008,00	4.765.770.683,00
8	Pendapatan dari Pengembalian	1.583.797.421,00	10.427.173.270,23
9	Pendapatan BLUD	141.151.351.939,40	110.498.255.114,00
10	Pendapatan dari Penyelenggaraan dan Pendidikan Pelatihan	0,00	65.018.000,00
11	Pendapatan Angsuran/Cicilan/Penjualan	0,00	680.644.599,00

12	Hasil dari Pemanfaatan kekayaan Daerah	0,00	26.125.000,00
13	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	2.902.666.762,00
Jumlah		184.879.626.024,69	132.884.764.280,35

5) Penerimaan Dana Bagi Hasil

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Bagi Hasil periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp83.245.032.380,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp71.140.797.650,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.156 Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Bagi Hasil TA 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	17.787.415.414,00	4.885.326.423,00
2	DBH PPh Pasal 21	35.486.419.665,00	37.345.498.891,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.247.058.784,00	0,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	347.202.017,00	0,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	662.583.525,00	1.443.178.486,00
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	25.844.002.700,00	27.062.134.605,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	164.583.776,00	114.046.997,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUUPH)	369.936.000,00	0,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	1.335.830.499,00	290.612.248,00
Jumlah		83.245.032.380,00	71.140.797.650,00

6) Penerimaan Dana Alokasi Umum

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Umum periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.213.764.868.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp1.219.949.535.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.157 Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Alokasi Umum TA 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Dana Alokasi Umum	1.213.764.868.000,00	1.219.949.535.000,00
Jumlah		1.213.764.868.000,00	1.219.949.535.000,00

7) Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp177.195.802.118,00 dan untuk periode yang sama pada

tahun 2020 sebesar Rp136.449.090.558,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.158 Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Fisik
TA 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	103.051.305.389,00	0,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	3.479.396.535,00	0,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler- Perpustakaan Daerah	4.377.945.727,00	0,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.629.347.380,00	0,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler- Pelayanan Kefarmasian	16.676.720.575,00	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan- Penguatan Intervensi Stunting	2.269.685.000,00	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	3.709.933.017,00	0,00
8	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	5.978.243.267,00	0,00
9	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.568.187.000,00	0,00
10	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	19.446.686.634,00	0,00
11	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	7.008.351.594,00	0,00
12	Dana Alokasi Khusus Reguler	0,00	71.389.981.724,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan	0,00	65.059.108.834,00
Jumlah		177.195.802.118,00	136.449.090.558,00

8) Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp573.178.747.905,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp625.770.945.398,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.159 Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Alokasi Khusus-Non Fisik
TA 2021 dan 2020**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	417.811.389.000,00	446.943.050.000,00
2	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	520.000.000,00	0,00
3	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.920.000.000,00	0,00
4	DAK Non Fisik-TPG PNSD	137.652.287.000,00	127.230.337.000,00
5	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.288.362.000,00	1.295.438.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya- Museum	1.735.423.141,00	3.143.630.886,00

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	1.743.239.750,00	0,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.591.408.737,00	12.947.346.526,00
9	DAK Non Fisik-PK2UKM	1.900.143.000,00	2.010.616.222,00
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	2.016.495.277,00	289.723.764,00
11	Dana Insentif Daerah	0,00	31.396.339.000,00
12	Tunjangan Khusus Guru	0,00	514.464.000,00
Jumlah		573.178.747.905,00	625.770.945.398,00

9) Penerimaan Dana Insentif Daerah

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Dana Insentif Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp18.831.248.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.160 Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Insentif Daerah TA 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Dana Insentif Daerah	18.831.248.000,00	0,00
Jumlah		18.831.248.000,00	0,00

10) Penerimaan Hibah

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Hibah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.116.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp20.156.119.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.161 Arus Kas Masuk Penerimaan Hibah TA 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	1.116.000.000,00	0,00
2	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	0,00	20.156.119.000,00
Jumlah		1.116.000.000,00	20.156.119.000,00

11) Penerimaan dari Pendapatan Lainnya

Arus Kas Masuk dari Penerimaan dari Pendapatan Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp1.116.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.162 Arus Kas Penerimaan dari Pendapatan Lainnya
TA 2021 dan 2020

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga	0,00	1.116.000.000,00
Jumlah		0,00	1.116.000.000,00

b. Arus Kas Keluar

Berdasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga pada TA 2021 terdapat perubahan pada jenis Arus Kas Keluar. Total Arus Kas Keluar dari aktivitas operasi periode 01 Januari sd 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.555.882.962.320,51 naik sebesar Rp274.520.529.513,34 atau 12,03% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp2.281.362.432.807,17. Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2021 menjadi sebesar Rp495.738.500.482,22. Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut.

Tabel 5.163 Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
I	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
	Arus Kas Keluar		
	Pembayaran Pegawai	1.097.398.109.416,40	1.066.821.278.776,00
	Pembayaran Barang dan Jasa	685.841.963.893,11	559.001.307.176,10
	Pembayaran Hibah	337.271.451.880,00	512.620.480.000,00
	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	98.980.000,00	1.793.682.448,00
	Pembayaran Tak Terduga	5.699.939.753,00	12.515.896.300,00
	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kab/Kota	429.572.517.378,00	128.609.788.107,07
	Jumlah Arus Kas Keluar	2.555.882.962.320,51	2.281.362.432.807,17
	Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi (Arus Kas Masuk – Arus Kas Keluar)	495.738.500.482,22	505.565.603.400,74

1) Pembayaran Pegawai

Arus Kas Keluar dari Pembayaran Pegawai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.097.398.109.416,40 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp1.066.821.278.776,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.164 Arus Kas Keluar Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	696.245.777.034,40	715.183.202.088,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	198.606.111.842,00	315.085.260.366,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	163.912.706.953,00	0,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.349.463.120,00	0,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	242.595.820,00	0,00
6	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.579.121.401,00	1.187.500.134,00
7	Belanja Pegawai BOS	2.699.046.000,00	0,00

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
8	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	12.584.963.629,00
9	Belanja Honorarium PNS	0,00	16.786.509.900,00
10	Honorarium Non PNS	0,00	898.800.000,00
11	Belanja Pegawai BLUD	4.763.287.246,00	5.070.454.659,00
12	Belanja Uang Lembur	0,00	24.588.000,00
Jumlah		1.097.398.109.416,40	1.066.821.278.776,00

2) Pembayaran Barang dan Jasa

Arus Kas Keluar dari Pembayaran Barang dan Jasa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp685.841.963.893,11 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp559.001.307.176,10 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.165 Arus Kas Keluar Belanja Barang dan Jasa TA 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Barang	105.808.368.105,38	16.267.904.474,00
2	Belanja Bahan/Material	0,00	28.152.302.464,00
3	Belanja Jasa	245.620.341.311,10	149.077.386.767,00
4	Belanja Premi Asuransi	0,00	7.112.764.188,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	9.394.154.703,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	7.614.052.238,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/parkir	0,00	1.030.514.100,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0,00	350.970.000,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	0,00	2.703.000.000,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	941.093.100,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	0,00	25.157.228.818,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00	1.452.324.000,00
13	Belanja Pakaian Kerja	0,00	76.500.000,00
14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	0,00	1.077.844.150,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	97.050.783.491,00	96.986.146.506,00
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	51.500.000,00
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	3.849.868.357,00
18	Belanja Pemeliharaan	51.242.594.496,79	12.039.285.543,89
19	Belanja Jasa Konsultansi	0,00	6.359.861.592,68
20	Belanja Barang dan Jasa BOS	85.510.904.000,00	0,00
21	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	12.275.243.947,60
22	Belanja Barang dan Jasa BLUD	96.487.176.535,84	97.011.616.885,93
23	Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	4.121.795.953,00	678.646.000,00

24	Belanja Operasional Sekolah	0,00	79.305.399.341,00
25	Belanja Seleksi	0,00	35.700.000,00
Jumlah		685.841.963.893,11	559.001.307.176,10

3) Pembayaran Hibah

Arus Kas Keluar dari Pembayaran Hibah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp337.271.451.880,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp512.688.520.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.166 Arus Kas Keluar Belanja Hibah TA 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	6.000.000.000,00	0,00
2	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	33.318.535.000,00	0,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.689.548.880,00	0,00
4	Kepada Badan/Lembaga/ Organisasi swasta	0,00	185.310.400.000,00
5	Belanja Hibah Dana BOS	296.263.368.000,00	327.310.080.000,00
Jumlah		337.271.451.880,00	512.620.480.000,00

4) Pembayaran Belanja Bantuan Sosial

Arus Kas Keluar dari Pembayaran Belanja Bantuan Sosial periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp98.980.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp1.793.682.448,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.167 Arus Kas Keluar Pembayaran Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	98.980.000,00	0,00
2	Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	0,00	1.793.682.448,00
Jumlah		98.980.000,00	1.793.682.448,00

5) Pembayaran Tak Terduga

Arus Kas Keluar dari Pembayaran Tak Terduga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.699.939.753,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp12.515.896.300,00.

Tabel 5.168 Arus Kas Keluar Pembayaran Tak Terduga TA 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Tak Terduga	5.699.939.753,00	12.515.896.300,00
Jumlah		5.699.939.753,00	12.515.896.300,00

6) Pembayaran Bagi Hasil Pajak Ke Kab/Kota

Arus Kas Keluar dari Pembayaran Bagi Hasil Pajak Ke Kab/Kota periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp429.572.517.378,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp128.609.788.107,07.

Tabel 5.169 Arus Kas Keluar Pembayaran Bagi Hasil Pajak Ke Kab/Kota TA 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kab/Kota dan Desa	429.572.517.378,00	128.609.788.107,07
Jumlah		429.572.517.378,00	128.609.788.107,07

5.5.2. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

a. Arus Kas Masuk

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan TA 2021 sebesar Rp130.400.000,00. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan TA 2021 adalah sebesar Rp324.422.084.410,29 turun sebesar Rp107.673.560.754,41 atau 24,92% dibandingkan dengan TA 2020 sebesar Rp432.095.645.164,70. Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan menjadi sebesar minus Rp324.291.684.410,29. Laporan Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan sebagai berikut.

Tabel 5.170 Laporan Arus Kas dari Aktivitas Aset Non keuangan Tahun 2021 dan 2020
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
II	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
	Arus Kas Masuk		
	Penjualan Aset Lainnya	130.400.000,00	0,00
	Jumlah Arus Kas Masuk	130.400.000,00	0,00
	Arus Kas Keluar		
	Perolehan Tanah	351.833.957,00	910.700.000,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin	120.896.451.954,30	187.117.183.962,70
	Perolehan Gedung dan Bangunan	85.977.703.079,72	61.322.534.260,23
	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	91.465.065.504,27	134.069.776.163,63
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	25.651.029.915,00	33.675.450.778,14
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	80.000.000,00	15.000.000.000,00

	Jumlah Arus Kas Keluar	324.422.084.410,29	432.095.645.164,70
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(324.291.684.410,29)	(432.095.645.164,70)

b. Arus Kas Keluar

1) Perolehan Tanah

Arus Kas Keluar dari Perolehan Tanah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp351.833.957,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp910.700.000,00.

2) Perolehan Peralatan dan Mesin

Arus Kas Keluar dari Perolehan Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp120.896.451.954,30 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp187.117.183.962,70.

3) Perolehan Gedung dan Bangunan

Arus Kas Keluar dari Perolehan Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp85.977.703.079,72 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp61.322.534.260,23.

4) Perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan

Arus Kas Keluar dari Perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp91.465.065.504,27 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp134.069.776.163,63.

5) Perolehan Aset Tetap Lainnya

Arus Kas Keluar dari Perolehan Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp25.651.029.915,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp33.675.450.778,14.

6) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp80.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp15.000.000.000,00.

5.5.3. Aktivitas Pembiayaan

Tabel 5.171 Laporan Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
III	Arus Kas dari Aktifitas Pembiayaan		
	Arus Kas Masuk		
	Pencairan Dana Cadangan	-	-
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-

NO	URAIAN	2021	2020
	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-
	Jumlah Arus Kas Masuk		
	Arus Kas Keluar		
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
	Pembayaran Pokok Pinjaman	-	-
	Pemberian Pinjaman	-	-
	Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan	-	-

5.5.4. Aktifitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. Arus kas Masuk dari Aktivitas transitoris TA 2021 sebesar Rp157.148.467.214,60 naik sebesar Rp7.526.341.404,41 atau 5,03% dibandingkan TA 2020 sebesar Rp149.622.125.810,19. Laporan Arus Kas dari Aktifitas Transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.172 Laporan Arus Kas dari Aktifitas Transitoris Tahun 2021 dan 2020
(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2021	2020
IV	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
	Arus Kas Masuk		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	157.148.467.214,60	149.622.125.810,19
	Jumlah Arus Kas Masuk	157.148.467.214,60	149.622.125.810,19
	Arus Kas Keluar		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	157.148.467.214,60	149.622.125.810,19
	Jumlah Arus Kas Keluar	157.148.467.214,60	149.622.125.810,19
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00

- Total Arus Kas Masuk dari aktivitas transitoris periode 01 Januari sd 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp157.148.467.214,60 naik sebesar Rp7.526.341.404,41 atau 5,03% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 adalah sebesar Rp149.622.125.810,19.
- Total Arus Kas Keluar dari aktivitas transitoris periode 01 Januari sd 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp157.148.467.214,60 naik sebesar Rp7.526.341.404,41 atau 5,03% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 adalah sebesar Rp149.622.125.810,19.

5.5.5. Saldo Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Bengkulu sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 menggambarkan pergerakan saldo kas dari Saldo Awal Kas sebesar Rp102.542.595.053,49 dengan penurunan kas selama periode TA

2021 sebesar Rp171.446.816.071,93, sehingga terdapat saldo akhir kas sebesar Rp273.989.411.125,42. Rincian Saldo Kas TA 2021 dan TA 2020 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.173 Saldo Kas 2021 dan 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Kenaikan / (Penurunan) Kas	171.446.816.071,93	73.469.958.236,05
2	Saldo Awal Kas	102.542.595.053,49	29.072.636.817,45
3	Saldo Akhir Kas	273.989.411.125,42	102.542.595.053,49
4	Kas di Kas Daerah	233.591.298.528,82	77.751.750.922,45
5	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	138.829.753,00
7	Kas di BLUD	39.718.303.542,60	1.078.245.672,04
8	Kas Dana BOS	679.809.054,00	3.573.768.706,00

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/defisit-LO, Koreksi dan Ekuitas Akhir.

Tabel 5.174 Laporan Perubahan Ekuitas 31 Desember 2021 dan 2020

(dalam Rupiah)

Uraian	2021	2020
EKUITAS AWAL	5.827.035.251.154,08	5.627.267.690.493,14
SURPLUS/DEFISIT-LO	325.390.967.934,97	155.924.643.189,86
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	2.900.108.172,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	105.112.772.772,30	40.942.809.299,08
EKUITAS AKHIR	6.257.538.991.861,35	5.827.035.251.154,08

Didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana terhadap koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar meliputi koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi aset tetap dan koreksi ekuitas lainnya.

5.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 dan 2020 yaitu sebesar Rp5.827.035.251.154,08 dan Rp5.627.267.690.493,14.

5.6.2. Surplus Defisit LO

Surplus/Defisit – LO Pemerintah Provinsi Bengkulu merupakan nilai dari Surplus/Defisit pada Laporan Operasional – LO tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp325.390.967.934,97 dan Rp155.924.643.189,86.

5.6.3. Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

a. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi nilai persediaan di TA 2021 sebesar Nihil, tidak ada koreksi yang mendasar yang dapat menambah/mengurangi ekuitas.

b. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi Ekuitas Lainnya TA 2021 sebesar Rp105.112.772.772,30 mengalami peningkatan sebesar Rp64.169.963.473,22 atau 156,73% dari Koreksi Ekuitas Lainnya TA 2021 sebesar Rp40.942.809.299,08.

No.	Uraian	Pengurang Koreksi	Penambah Koreksi
		(D)	(K)
1	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Pencatatan Kemitraan pada Pihak Ketiga		23.961.439.500,00
2	Penyesuaian UBH Pajak Daerah		16,30
3	Koreksi Ekuitas Lainnya atas realisasi Piutang Pajak Daerah	754.538.993,00	
4	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Pemusnahan Gedung dan Bangunan DTPHP	786.400.000,00	
5	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Pemusnahan Gedung dan Bangunan Dinkes	133.241.968,00	
6	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Pengalihan kewenangan Dishub	9.689.500,00	
7	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Hibah dari Kemenperindag		494.664.000,00
8	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Tagihan Jangka Panjang BPKD	36.000,00	
9	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Penambahan UJP TA 2020 RSUD	2.223.613.078,00	
10	Koreksi Ekuitas Lainnya atas Pemusnahan ALL Dinkes	7.400.000,00	
11	Koreksi Ekuitas Lainnya atas AT Tanah Diknas yang sudah di hitung oleh KJPP		86.517.624.988,00
12	KE Lainnya atas penghapusan AT Tanah Diknas yang sudah di hitung oleh KJPP	8,00	
13	Koreksi Ekuitas Lainnya atas AT Tanah Dishub P3D Ke Kemenhub	1.892.000.000,00	
14	Koreksi Ekuitas Lainnya atas AT Gedung Bangunan Dishub P3D Ke Kemenhub	54.036.185,00	
	JUMLAH	5.860.955.732,00	110.973.728.504,30
	JUMLAH Koreksi Ekuitas Lainnya		105.112.772.772,30

5.6.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 sebesar Rp6.257.538.991.861,35 meningkat sebesar Rp343.110.715.921,34 atau 5,89% dari ekuitas akhir TA 2020 sebesar Rp5.827.035.251.154,08.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Informasi Non keuangan yang dapat dijelaskan pada bagian ini antara lain adalah:

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi

Provinsi Bengkulu adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) memiliki luas 34.724,69 km² dengan luas daratan 19.795.15 km² dan luas lautan 14.929,54 km² (Bakosurtanal, 2010). Sejak tahun 1967, Provinsi Bengkulu mengalami beberapa kali pemekaran. Semula Provinsi Bengkulu terdiri dari tiga kabupaten dan satu kota, akan tetapi semenjak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu secara administratif terbagi menjadi delapan kabupaten dan satu kota. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu membagi Provinsi Bengkulu menjadi Sembilan kabupaten dan satu kota. Provinsi Bengkulu bagian utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat; bagian timur berbatasan dengan Provinsi Jambi, Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung; sedangkan bagian barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Secara geografis, Provinsi Bengkulu terletak pada 101° 01 - 103° 46 Bujur Timur serta 2° 16 - 3° 31 Lintang Selatan dan terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera, membujur dari Utara ke Selatan sepanjang Bukit Barisan yang merupakan hutan suaka alam dan hutan lindung di sebelah Timur dan Samudera Indonesia di sebelah Barat dan dataran tinggi yang membentang dari ujung Utara sampai ujung selatan dengan lebar ± 50 km. Dataran tinggi merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Provinsi Bengkulu memiliki bentuk wilayah relatif memanjang sejajar garis pantai dengan panjang garis pantai ± 525 km. Wilayah Provinsi Bengkulu memiliki kontur yang bergelombang dengan ketinggian tempat (*altitude*) berkisar antara 0 - 1.938 meter di atas permukaan laut. Titik terendah dijumpai di sepanjang pantai sedang titik tertinggi terletak di puncak Gunung Kaba.

6.2. Penjelasan Mengenai Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Penyusunan APBD TA 2021 Pemerintah Provinsi Bengkulu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Penyusunan APBD TA 2020. Serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas umum Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bengkulu memiliki tugas urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan

pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang yang mencakup:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri dari:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
 - e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Sosial.
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja;
 - b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. Pangan;
 - d. Lingkungan Hidup;
 - e. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - f. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Perhubungan;
 - i. Komunikasi dan Informatika;
 - j. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - k. Penanaman Modal;
 - l. Kepemudaan dan Olahraga;
 - m. Kebudayaan; dan
 - n. Perpustakaan dan Kearsipan.
3. Urusan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pariwisata;
 - c. Pertanian;
 - d. Kehutanan;
 - e. Energi Sumber Daya Mineral; dan
 - f. Perindustrian dan Perdagangan.

4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang terdiri dari :

- a. Administrasi Pemerintahan;
- b. Pengawasan;
- c. Perencanaan;
- d. Keuangan;
- e. Kepegawaian;
- f. Pendidikan dan Pelatihan; dan
- g. Penelitian dan Pengembangan.

6.3. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Kegiatan Operasional

Agar pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu terarah maka Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu TA 2016-2021 dengan visi terwujudnya Bengkulu yang maju, sejahtera, bermartabat, dan Berdaya Saing Tinggi.

Visi tersebut mengandung empat kata kunci yaitu:

1. Maju, mengandung makna masyarakat Provinsi Bengkulu yang berpengetahuan dan sadar akan kebutuhan secara individual atau kelompok serta mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan regional, nasional dan global dengan tetap mempertahankan ciri dan identitas masyarakat Provinsi Bengkulu yang beragam serta bijaksana dalam menghargai adat istiadat dan kearifan lokal;
2. Sejahtera, mengandung makna masyarakat Provinsi Bengkulu yang terpenuhinya layanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian rakyat serta terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani dalam kerangka kehidupan yang berkeselimbangan secara lahir dan batin;
3. Bermartabat, mengandung makna masyarakat Provinsi Bengkulu yang memiliki kebanggaan dan dihargai sebagai masyarakat yang memiliki kompetensi, bertakwa serta memiliki nilai-nilai luhur budaya bangsa; dan
4. Berdaya Saing Tinggi, mengandung makna bahwa Provinsi Bengkulu memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, yang tercermin dalam tata kelola pemerintahan, profesionalisme aparatur, pelayanan publik, iklim usaha dan investasi, infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis, komoditas unggulan, kemaritiman serta kepemudaan dan keolahragaan.

Adapun misi pembangunan Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai berikut.

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*);

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan professional melalui perbaikan tata kelola pemerintahan; pengelolaan APBD yang efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif serta konsisten dengan perencanaan daerah;

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahteraan social dan layanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan serta perekonomian rakyat berbasis keunggulan lokal.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang sejahtera melalui peningkatan kuantitas dan kualitas dibidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan dan bidang pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis keunggulan lokal;

3. Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu maju, sehat dan cerdas melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis.

4. Mewujudkan pola pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang sejahtera, bermartabat dan berdaya saing melalui program-program antara lain : mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya mineral yang berkelanjutan; meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya laut; memanfaatkan sumber daya panas bumi untuk memenuhi kebutuhan listrik lokal dan regional; pemanfaatan batu bara untuk kebutuhan pembangkit tenaga listrik; penciptaan nilai tambah produksi perkebunan dan program lain.

5. Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing
Pembangunan kemaritiman diarahkan untuk menunjang pembangunan poros maritime nasional melalui perumusan kebijakan dan program penanganan sektor-sektor kelautan;
6. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan; dan
8. Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agamis, berbudaya dan demokratis

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Bengkulu yang sejahtera dan bermartabat. Sebagai provinsi yang merefleksikan miniatur Indonesia yang didalamnya terdiri dari suku, agama dan golongan dengan beragam kepentingan.

Adapun kebijakan umum APBD Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2021 adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya-upaya sebagai berikut.

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun sumber-sumber penerimaan baru;

- b. Kebijakan dalam meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak;
 - c. Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi yang nyaman dan sederhana;
 - d. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur;
 - e. Meningkatkan dana dari pusat diluar DAU dan DAK; dan
 - f. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah.
2. Kebijakan belanja diprioritaskan pada:
- a. Peningkatan infrastruktur dasar;
 - b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka kualitas pendidikan, kesehatan, kemampuan aparatur, pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintah, hukum dan ketertiban umum;
 - c. Revitalisasi pengelolaan sumber daya pertanian, perternakan, perikanan dan kelautan, industri dan pariwisata dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan; dan
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021 disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan Keuangan tersebut mencakup:

1. Laporan Realisasi Anggaran – LRA;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
3. Laporan Operasional – LO;
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
5. Neraca;
6. Laporan Arus Kas; dan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dengan keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2021, diharapkan laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Bengkulu, Mei 2022

GUBERNUR BENGKULU

H. ROHIDIN MERSYAH